LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



MENGGALAKKAN ETIKA POLITIK DALAM SISTEM MANAJEMEN NASIONAL GUNA MEMUNCULKAN KEPEMIMPINAN YANG NEGARAWAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

OLEH:

DR. VALENTINUS, CP

KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP) PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) XLIX LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Salam damai sejahtera bagi kita semua.

Dengan terlebih dulu memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (taskap) dengan judul :

"MENGGALAKKAN ETIKA POLITIK DALAM SISTEM MANAJEMEN NASIONAL GUNA MEMUNCULKAN KEPEMIMPINAN YANG NEGARAWAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL".

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Judul Taskap dan Pengangkatan Tutor Taskap Peserta PPRA XLIX Tahun 2013 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2013 dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Mgr. Situmorang, OFM Cap serta Mgr. Agustinus Agus yang mengutus penulis untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayor Jenderal Eddy Susanto dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing untuk membuat serta menyelesaikan Taskap ini sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual serta penguasaan di bidang akademis, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, sehingga dengan segala kerendahan hati mohon diberikan

ii

kritik atau masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah

ini.

Besar harapan saya agar taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan

pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang barangkali

membutuhkannya dalam rangka membahas aktualisasi nilai-nilai Etika Politik dalam

Sistem Manajemen Nasional guna memunculkan kepemimpinan yang negarawan

dalam rangka membuat tangguh ketahanan nasional sebagai wujud konkret dari tujuan

dan cita-cita nasional yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan

masyarakat adil dan makmur serta sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk

serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada

Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.

Salam damai sejahtera bagi kita sekalian.

Jakarta, 29 Juli 2013

Penulis

DR. Valentinus, CP

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Valentinus, CP

Pangkat : -

Jabatan : Dosen Filsafat, Anggota Komisi Pendidikan

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Instansi : Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Alamat : JL. RAYA PANDAN LANDUNG No.48, MALANG

JAWA TIMUR

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke XLIX tahun 2013 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Kaya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia Taskap ini dibatalkan.
- 2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 29 Juli 2013

Penulis

DR. Valentinus, CP

DAFTAR ISI

Judul: MENGGALAKKAN ETIKA POLITIK DALAM SISTEM MANAJEMEN NASIONAL GUNA MEMUNCULKAN KEPEMIMPINAN YANG NEGARAWAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

	Halaman			
KATA PI	ENGANTARi			
PERNYA	TAAN KEASLIANiii			
DAFTAR	iv iv			
BAB I	PENDAHULUAN			
	1. Umum			
	2. Maksud dan Tujuan6			
	3. Ruang Lingkup dan Sistematika			
	4. Metode dan Pendekatan			
	5. Pengertian-Pengertian			
BAB II	LANDASAN PEMIKIRAN			
	6. Umum			
	7. Paradigma Nasional			
	8. Peraturan Perundang-undangan sebagai Landasan Operasional 15			
	9. Landasan Teori			
	10. Tinjauan Pustaka			
BAB III	KONDISI ETIKA POLITIK DALAM SISTEM MANAJEMEN NASIONAL (SISMENNAS) SAAT INI			
	11. Umum			
	12. Kondisi Etika Politik dalam Sismennas Saat Ini22			
	13. Implikasi Etika Politik dalam Sismennas Saat ini terhadap			
	Kepemimpinan yang Negarawan dan Implikasi Kepemimpinan			
	yang Negarawan terhadap Ketahanan Nasional (Tannas)35			
	14. Pokok-Pokok Persoalan yang Ditemukan			
BAB IV	PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS43			
	15. Umum			
	16 Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global 43			

	17. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional	45				
	18. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional	47				
	19. Peluang dan Kendala	52				
BAB V	KONDISI ETIKA POLITIK YANG DIHARAPKAN DALAM SISMENNAS					
	20. Umum	54				
	21. Kondisi yang Diharapkan	55				
	22. Kontribusi menggalakkan etika politik dalam Sismenna	as				
	terhadap upaya memunculkan kepemimpinan yang negarawa	ın				
	dan kontribusi kepemimpinan yang negarawan terhadap Tanna	as 67				
	23. Indikasi Keberhasilan	69				
BAB VI	KONSEPSI MENGGALAKKAN ETIKA POLITIK DALAM SISMENNAS GUNA MEMUNCULKAN KEPEMIMPINAN YANG NEGARAWAN DALAM RANGKA TANNAS					
	24. Umum	74				
	25. Kebijakan	75				
	26. Strategi	77				
	27. Upaya	87				
BAB VII	PENUTUP	96				
	28. Kesimpulan	96				
	29. Saran	100				
DAFTAR	R PUSTAKA					
DAFTAR	R LAMPIRAN					
1. AI	LUR PIKIR					
2. PC	OLA PIKIR					
3. IN	IDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA					
4. IN	IDEKS DEMOKRASI INDONESIA					
5. JU	JMLAH KASUS KORUPSI 2012 MENURUT KPK					

BABI

PENDAHULUAN

1. Umum

Di jaman modern etika politik dan kepemimpinan terus menerus dielaborasi dan disempurnakan. Hasil elaborasi dan penyempurnaan itu terungkap dalam banyak aspek baru yang berhubungan dengan aneka tipe dan teknik kepemimpinan sesuai dengan konteks perubahan jaman, beragam permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Namun demikian, secara umum dan prinsipil bermacam ragam teori baru kepemimpinan di era modern dan kontemporer tetap menganggap bahwa etika politik merupakan salah satu faktor kunci dalam tata kelola pemerintahan. Pemimpin dan kepemimpinan yang berpedoman pada kaidah-kaidah etika dan moral merupakan idaman semua kelompok dan bangsa, karena merupakan jaminan keberhasilan dalam menggapai cita-cita dan kepentingan bersama.

Secara konsepsional etika politik merupakan diskursus ilmiah yang mengkritisi dasar-dasar dari berbagai klaim politik kekuasaan dan strategi legitimasinya yang bersifat ideologis oleh penguasa. Etika politik secara tajam menuntut bahwa klaim-klaim politik kekuasaan dan strategi legitimasinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, argumentatif dan obyektif menurut prinsip-prinsip moral untuk menemukan legitimasi yang benar dan meminimalisir legitimasi ideologis yang manipulatif. Karena itu, etika politik sekaligus berupaya memberikan pedoman arah dan pegangan normatif dalam mengkritisi, menilai dan mengevaluasi kualitas tata laksana penyelenggaraan negara yang berlandaskan kemanusiaan dan keadilan. Jadi, etika politik membahas masalah legitimasi hukum dan kekuasaan serta penilaian kritis terhadap rangkaian legitimasi yang penguasa ajukan dalam perspektif prinsip-prinsip moral dasar.¹

Hubungan antara etika politik dan kepemimpinan merupakan tema klasik, global, esensial dan relevan sepanjang jaman untuk dibicarakan dan diperdalam. Hal itu terbukti dari beragam teori etika politik dan kepemimpinan yang sudah dielaborasi sejak jaman Yunani klasik dan Romawi antik. Hingga kini teori-teori etika politik dan kepemimpinan tersebut masih tetap dipelajari dan menjadi rujukan ilmiah. Pada

1

¹ Franz Magnis-Suseno. 1994. Etika Politik. Jakarta: Gramedia, 22.

masa Yunani klasik tema etika politik dan kepemimpinan digagas secara filosofis sejak jaman Sofis dan Sokrates yang berpuncak pada Platon² dan Aristoteles.³ Sementara di kekaisaran Romawi tema etika politik dan kepemimpinan direfleksikan dan dielaborasi secara sistematis oleh Cicero.⁴

Prinsip-prinsip moral dasar sebagai pedoman orientatif dan pegangan normatif dalam mengkritisi, menjustifikasi dan mengevaluasi etika politik adalah prinsip baik dan buruk suatu perbuatan, benar dan salah suatu cara yang digunakan serta adil dan tidak adil dampak dari sebuah tindakan dan kebijakan dalam ranah sosial - ruang publik untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Etika politik secara hakiki berurusan langsung dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak individu dan terutama pemimpin untuk mewujudkan keadilan sosial dalam seluruh hidup bersama. Dengan demikian, wilayah garapan etika politik adalah dimensi sosial individu sebagai zóon politikon - makhluk politik dan tujuan yang hendak diwujudkannya adalah keadilan sosial bagi semua. Aristoteles mengatakan bahwa kebaikan masing-masing individu sangat terpuji, tetapi jauh lebih mulia dan ilahi tatkala kebaikan demikian mencakup suatu masyarakat atau sebuah polis.⁵

Bertolak dari hubungan esensial etika politik dengan kepemimpinan, antara nilai-nilai etis-moral dan eksercitasi kekuasaan dalam ruang publik, maka dalam lingkup global muncul banyak teori kepemimpinan yang menggarisbawahi aspek keadilan, keterbukaan, kejujuran, kecakapan dan tanggung jawab dalam tata laksana penyelenggaraan negara. Dari elaborasi konseptual tersebut lahirlah istilah dan standard penilaian terhadap sebuah regim dan sistem pemerintahan yang diterapkan di suatu negara, seperti tata laksana pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan demokratis.

Tendensi permenungan global tentang pola kepemimpinan yang mendasarkan diri pada nilai-nilai etis-moral menjadi demikian penting dan urgen, mengingat umat manusia berhadapan dengan dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi massa. Teknologi komunikasi massa telah membuat dunia

² Platone. 2001. *Tutti gli scritti*. Milano: Bompiani. Platon atau Plato berasal dari kata *Platos* berarti lebar, luas, panjang dan merupakan julukan atau sebutan. Nama aslinya adalah Aristocles. Tema etika politik dan kepemimpinan dibahas dalam buku *Republika* terutama bab IV, V – VIII.

³ Aristotele. 1994. *Etica Nicomachea* (vol. 1-2). Milano: Biblioteca Universale Rizzoli; Aristotele. 1996. *Politica*. Roma – Bari: Laterza.

⁴ Lih. Cicero. 1995. *De Re Publica*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁵ Aristoteles. *Op cit.*, 87, (1094b).

menjadi sebuah kampung global, berada dalam jaringan relasi dan interaksi timbal balik yang mengatasi ruang dan waktu, sehingga membentuk generasi internet, *net citizen* atau biasa disingkat dengan *netizen*. Akibat dari tata pergaulan yang demikian intensif dan melampaui batas ruang dan waktu, maka secara sosio-politik dan kultural ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan cara pikir, pola sikap dan pola tindak yang merelativir semua sistem nilai, kepercayaan dan keyakinan ideologis serta melakukan penghancuran struktur-struktur (*des*trukturalisasi) pranata-pranata sosial.

Singkatnya, perkembangan ektra-pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah meruntuhkan klaim ideologis, kepercayaan religius dan legitimasi politik kekuasaan masyarakat modern, sehingga semua menjadi relatif dan mengambang. Dalam situasi demikian ini, pendidikan etika politik merupakan upaya untuk memberikan pendasaran filosofis bagi eksistensi nilai-nilai etis yang berlaku universal, sehingga individu dan negara dapat terhindar dari relativisme etis-moral yang malah melahirkan hukum rimba. Aneh tapi nyata, jika di banyak negara pendidikan etika secara umum dan etika politik mendapat perhatian serius, di Indonesia tidak ada ruang bagi pendidikan etika, apalagi untuk etika politik dalam kurikulum pendidikan nasional.

Dalam lingkup regional destrukturalisasi berbagai pranata sosial, *de*legitimasi klaim politik kekuasaan yang klasik-tradisional dan feodalistik serta pengaburan dan pengrusakan (*de*signifikasi) makna dalam dunia religius dan tataran kultural telah menimbulkan konsekwensi yang sangat serius bagi beberapa negara sekawasan. Tuntutan masyarakat agar pemerintah bersikap terbuka, demokratis, bersih, bertindak adil dan bertanggung jawab semakin kuat dan mendapat dukungan dunia internasional. Tuntutan demikian mustahil diabaikan tanpa menimbulkan gejolak sosial dan politik, misalkan di Malaysia, Thailand dan Myanmar. Jadi, dalam lingkup regional tata laksana penyelenggaraan pemerintahan negara harus mendasarkan diri pada prinsip-prinsip etis-moral dan selalu berorientasi pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh warga.

Secara nasional konsekwensi dari revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi baik terhadap klaim politik kekuasaan yang feodalistis, kolutif, koruptif dan nepotis maupun strategi legitimasinya sudah mewujud dalam peristiwa Reformasi 1998. Seluruh bangsa Indonesia sangat menginginkan aparatur negara dan tata kelola pemerintahan negara yang bersih, jujur, demokratis, bersikap dan bertindak adil serta

bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Aspirasi itu diterjemahkan ke dalam beragam keputusan dan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar lagi bagi seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pun sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali dalam rentang waktu 3 tahun (1999-2002) guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menyeimbangkan distribusi kekuasaan di antara semua lembaga negara. Sentralisasi kekuasaan yang begitu dominan selama regim Orde Baru diganti dengan desentralisasi kekuasaan, sehingga melahirkan sistem otonomi daerah. Konsekwensinya, pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota berpindah tangan dari DPR kepada rakyat dalam bentuk pemilihan langsung. Jadi, era reformasi identik dengan liberalisasi dan demokratisasi.

Mengarungi dan mengisi masa (pasca) reformasi dengan liberalisasi dan demokratisasi ibarat menunggang kuda liar. Karena semua merasa berhak tanpa rambu-rambu yang jelas dan aturan main yang tegas mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami disorientasi di segala bidang kehidupan, termasuk **disorientasi politik**. Reformasi yang secara hakiki berarti penataan kembali bentuk dan tata laksana pemerintahan negara supaya menjadi lebih baik, bersih, transparan, adil dan akuntabel justru melahirkan dan membiakkan fragmentasi yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA) dan secara sosio-politik melahirkan regim oligarki, aparat dan politisi yang terinfeksi penyakit gemar mencuri, *kleptomaniak* atau menilap uang negara. Demokrasi Pancasila yang otoriter dan militeristis semasa regim terdahulu diganti dengan praksis politik demokrasi adu-domba yang sekedar berorientasi pada perebutan kekuasaan dan pelanggengan *status quo*.

Desentralisasi dan distribusi kekuasaan dari pusat ke daerah dipahami dan dilakoni oleh beberapa pihak sebagai desentralisasi dan distribusi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) ke seluruh wilayah dan segenap strata kekuasaan. Sistem demokrasi dimaknai dan dipraktekkan sebagai pola hidup egosentristis, etnosentristis dan religiosentristis yang sangat antipati dengan orang lain, suku lain, agama lain, golongan lain dan ras lain. Sistem ekonomi nasional pun mengedepankan dan melegalkan prinsip kapitalis murni di mana yang kuat bertahan hidup dan memangsa yang lemah, sehingga jurang antara pihak yang kaya dengan rakyat jelata semakin menganga.

Sekat dan tembok di antara semua kelompok bukan ditipiskan, dibongkar dan dihilangkan, melainkan semakin ditambah tebal dan ditinggikan. Arus reformasi malah mendorong dan menyebabkan kelompok-kelompok berlomba membangun perisai, memasang kuda-kuda dan bersikap saling curiga, sehingga dari sudut pandang etika politik, cara memaknai kekuasaan dan strategi untuk melegitimasinya sungguh memiskinkan dan meluluhlantakkan keindonesiaan yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Degradasi etis-moral dalam tata laksana hidup berbangsa dan bernegara selama masa reformasi berimplikasi langsung pada kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional secara hakiki mengacu pada daya pengetahuan, keahlian, kemampuan dan kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memimpin, mengatur, menata, mengelola dan memberdayakan semua potensi bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan meraih tujuan nasional. Dalam praksis terkini pemunculan para (calon) pemimpin nasional malah menafikan kaderisasi dan regenasi yang berjenjang, sistematis, mengabaikan syarat manusia yang berpengetahuan dan berkemampuan, menafikan kemanusiaan, keadilan sosial dan kebaikan bersama. **Kita mengalami krisis keteladanan dari para pemimpin nasional.**

Secara konstitusional-yuridis peran luhur nan mulia kepemimpinan nasional sudah tertuang dan ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.* Catur emban nasional ini dilakukan dengan selalu bernafaskan nilai-nilai etismoral dan berpijak pada landasan hukum.

Namun sayang sekali bahwa hukum yang diharapkan dapat menjadi panglima dalam hidup sosial, malah berubah menjadi instrumen *status quo* untuk melindungi kepentingan pribadi, keluarga dan kroni, meningkatkan kekayaan sendiri dan sanak famili, mengutamakan identitas kesukuan, kedaerahan, golongan dan keagamaan. Indonesia yang berkemanusiaan, berkeadilan dan beradab seakan menjadi *utopia* dan *terra incognita - negeri antah berantah* bagi anak bangsa kontemporer. Hal itu terjadi karena **hukum dipisahkan dari etika** sebagai jiwa dasarnya.

Bertolak dari beberapa persoalan di atas tampak bahwa kepemimpinan nasional yang berkarakter negarawan belum terwujud. Carut marut dalam upaya memunculkan kepemimpinan nasional yang berkarakter negarawan membawa-serta implikasi Tannas. Tannas merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan, mengolah dan mengelola potensi yang ada menjadi realitas kekuatan nasional. Secara substansial intisari Tannas adalah sikap ksatria anak bangsa, pribadi yang tahu mengukur kemampuan sendiri dan menghargai identitas diri secara obyektif. Maka upaya mewujudkan Tannas yang mumpuni berhubungan dengan pembentukan karakter manusia sebagai subyek berpikir dan makhluk sosial. Bila warga negara menjadi tangguh, maka Tannas akan pun tangguh, sehingga kita mampu menjadi bangsa yang mandiri dan mawas diri guna mewujudkan kesejahteraan dan keamanan yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

Bertolak dari kerangka pemikiran di atas, pokok permasalahan dalam Kertas Karya Perorangan ini adalah *bagaimana menggalakkan etika politik dalam Sismennas guna memunculkan kepemimpinan yang negarawan dalam rangka Tannas*.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Kertas Karya Perorangan ini bermaksud memberikan gambaran mengenai permasalahan etika politik dalam Sismennas saat ini dan upaya memunculkan kepemimpinan yang negarawan dalam rangka Tannas.

b. Tujuan.

Tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran yang ingin memberikan pemahaman tentang esensialitas kedudukan, fungsi dan peran etika politik dalam Sismennas dan sumbangan pemikiran yang berdimensi strategis kepada pemerintah dan segenap komponen masyarakat agar selalu mengedepankan etika politik dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama guna memunculkan kepemimpinan nasional yang berkarakter negarawan di masa depan dalam rangka memperkokoh Tannas.

3. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup Kertas Karya Perorangan ini dibatasi hanya pada aspek etika politik dalam Sismennas sebagai upaya memunculkan suatu kepemimpinan yang negarawan. Secara konseptual terminologi etika politik sudah memuat secara eksplisit batasan pengertian bahwa pokok bahasannya hanya berfokus pada manusia sebagai makhluk individual yang relasional dipandang dari sudut kebaikan dan keburukan perilakunya sejauh berada dalam ranah Sismennas.

Adapun sistematika pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**. Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika pembahasan serta pengertian-pengertian yang digunakan dalam pembahasan ini.
- **BAB II Landasan Pemikiran**. Pokok bahasan dalam bab ini dimulai dengan pengantar, Paradigma Nasional Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, Tannas serta peraturan perundang-undangan terkait pokok bahasan, landasan teori dan tinjauan kepustakaan.
- BAB III Kondisi Etika Politik dalam Sismennas Saat Ini. Pokok bahasan dalam bab ini mencakup pengantar bab, kondisi etika politik dalam Sismennas saat ini, implikasi kondisi etika politik saat ini terhadap kepemimpinan yang negarawan dan implikasi kepemimpinan yang negarawan terhadap Tannas serta pokok-pokok persoalan yang ditemukan.
- **BAB IV Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis.** Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan pengantar, deskripsi tentang perkembangan global, regional dan nasional yang berpengaruh terhadap praksis etika politik dalam Sismennas.
- BAB V Kondisi Etika Politik dalam Sismennas yang Diharapkan. Bab ini diawali dengan pengantar, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kondisi etika politik dalam Sismennas yang diharapkan, kontribusi kondisi etika politik dalam Sismennas yang diharapkan terhadap kepemimpinan yang negarawan, kontribusi kepemimpinan yang negarawan terhadap Tannas dan indikasi keberhasilan.

BAB VI Konsepsi Etika Politik dalam Sismennas. Pada bab ini dielaborasi konsepsi yang dimulai dengan pengantar bab, kebijakan, strategi-strategi dan upaya-upaya untuk menggalakkan etika politik dalam Sismennas agar dapat memunculkan kepemimpinan yang negarawan dalam rangka memperkokoh Tannas.

BAB VII Penutup. Bab penutup berisi kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa persoalan yang ditemukan dan saran untuk ditindaklanjuti.

4. Metode dan Pendekatan

Pembahasan dalam elaborasi ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran, menjabarkan dan mengidentifikasi data-data dan fakta dari aneka peristiwa yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari internet maupun literatur. Kumpulan data dan fakta itu dianalisa dan dirangkai lagi menjadi suatu gambaran realitas, memakai pendekatan kesisteman yang komprehensif-integral dalam perspektif Tannas.

5. Pengertian-Pengertian

Etika menurut *Académie Française* (1986) adalah a) sebuah permenungan tentang tingkah laku manusia dan nilai-nilai yang mendasarinya, yang menjadi pedoman untuk membangun suatu doktrin, sebuah ilmu tentang moral; b) keseluruhan prinsip moral yang diterapkan kepada mereka yang melakukan profesi atau mempraktekkan aktivitas sejenis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah a) ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral; b) kumpulan asas/nilai yang berkenan dengan akhlak; c) nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat.

Etika politik adalah diskursus ilmiah tentang praktek membuat keputusankeputusan moral dan tentang tindakan-tindakan politik suatu pemerintahan⁸ atau suatu kumpulan kode bertindak dan berperilaku untuk menyeimbangkan kebutuhan situasi

⁶ Diunduh dari http://www.lettres-modeles.fr/definition/%C3%A9thique.html: Ethique est a) une réflexion relative aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent, menée en vue d'établir une doctrine, une science de la morale; b) ensemble des principes moraux qui s'imposent aux personnes qui exercent une même activité, Selasa, 16 April 2013, pkl. 20.17.

⁷ Lih. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi IV), Jakarta: Gramedia, lema etika.

⁸ Diunduh dari <u>www.Scholar.harvard.edu/files/political_ethics</u>, tgl. 30-08-2013, pkl. 08.15.

politik dan persoalan-persoalan etis. ⁹ Dari kedua definisi di atas dapat simpulkan bahwa etika politik merupakan sebuah permenungan filosofis dan ilmiah tentang dasardasar ilmiah yang dapat menjadi pedoman dan rujukan sikap dan tingkah laku siapa saja yang berkecimpung di dunia politik dan memegang kewenangan untuk membuat setiap keputusan politik menurut standard nilai baik dan buruk, adil dan tidak adil.

Kepemimpinan adalah kemampuan individu mempengaruhi, memotivasi dan memampukan orang-orang yang berada di bawah kewenangannya untuk berkontribusi terhadap efektivitas dan keberhasilan organisasi tempatnya bernaung.¹⁰

Kepemimpinan negarawan adalah kemampuan dari seorang manusia yang memiliki kemampuan hebat dan luar biasa dalam mempengaruhi, memotivasi dan memampukan orang lain secara hebat dan luar biasa untuk berkontribusi terhadap efektivitas dan keberhasilan organisasi tempatnya bernaung.

Sismennas adalah suatu perpaduan tata nilai, struktur, fungsi dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.¹¹

Sistem adalah totalitas yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terhubung, terpadu, tergantung dan tersinergis dalam mengemban fungsi tertentu.¹²

Manajemen adalah pengelolaan yang memuat unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian atas pemanfaatan sumber daya dan sumber dana secara hemat, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang tepat guna. ¹³

Nasional adalah kehidupan bersama sebagai suatu bangsa. 14

Tata laksana pemerintahan adalah mata rantai proses yang diberlakukan untuk merancang, mengatur dan mengelola, memutuskan dan menilai pemanfaatan semua sumber daya, sarana dan upaya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Tannas adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari luar maupun dari dalam,

⁹ Diunduh dari <u>www.wisegeek/political_ethics/.com</u>, tgl. 30-08-2013, pkl. 08 45.

¹⁰ Lemhannas. 2013. *Kepemimpinan Negarawan* (Manuscripto – No. 15). Jakarta: Lemhannas, 1.

¹¹ Id. 2013. Sistem Manajemen Nasional (Manuscripto – No. 10). Jakarta: Lemhannas, 3.

¹² *Ibid.*, 4.

¹³ *Ibid*.

¹⁶ Ibid.

langsung atau tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas, kontinuitas hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.¹⁵

Menggalakkan berarti mengupayakan atau mengusahakan suatu aktivitas atau menumbuhkembangkan sesuatu dengan penuh disiplin, ketegasan, kedisiplinan dan optimisme tinggi.

-

¹⁵ *Id. Wawasan Nusantara* (Manuscripto – No. 4). Jakarta: Lemhannas, 8.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum

Refleksi dan elaborasi tentang etika politik dalam Sismennas yang terarah pada pemunculan kepemimpinan yang berkarakter negarawan sehingga Tannas bertambah kokoh bukan bergerak di ruang hampa, tetapi mempunyai tali temali dengan kehidupan konkret manusia baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Karena itu refleksi dan elaborasi tersebut hendaklah memiliki landasan argumentatif yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka pikir di atas, Bab kedua ini memaparkan landasan argumentasi dari pokok bahasan tentang etika politik dalam Sismennas dengan bertitik tolak dari Paradigma Nasional, yakni Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visional, Tannas sebagai landasan konsepsional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan operasional.

7. Paradigma Nasional

a. Pancasila sebagai Landasan Idiil

Setiap negara di dunia memiliki falsafah hidup, dasar negara dan ideologi entah diberi nama atau tanpa nama sebagai identitas bangsanya. Negara-bangsa Indonesia pun memiliki ideologi nasional bernama PANCASILA. Secara konseptual Pancasila adalah sintese genial yang dielaborasi *founding Fathers* dari nilai-nilai luhur peradaban manusia, nilai-nilai religius maupun adat istiadat yang hidup dalam budaya-budaya lokal sejak purbakala. Di dalam Pancasila tergambar kearifan lokal yang berlaku universal tentang hubungan tri dimensional manusia, yakni: relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam. Karena itu, Pancasila merupakan sumber etika dan moralitas, sumber dasar hukum nasional yang berfungsi sebagai landasan ideal.

Pancasila sebagai landasan idiil bangsa merupakan prinsip-prinsip dasar yang berfungsi sebagai pedoman orientasi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Secara bernas dan lugas para Bapa pendiri bangsa telah merumuskan dalam Pancasila

bagaimana Indonesia harus dipimpin, diatur, dikelola dan diberdayakan oleh lembaga pemerintahan negara. Sistem kepemimpinan nasional dan Sismennas harus bertumpu pada asas kemanusiaan yang adil dan beradab guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Asas kemanusiaan menggarisbawahi manusia sebagai subyek politik dan tujuan politik. Manusia adalah subyek yang membawaserta dalam dirinya citra sang Khalik, sehingga harkat dan martabatnya harus dilindungi dan dihormati. Asas kemanusiaan yang diamanatkan Pancasila berciri adil dan beradab, bukan paham kemanusiaan yang berpusat pada individualisme absolut atau kemanusiaan yang diserap tuntas negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang menghormati harkat dan martabat pribadi seturut hak dan kewajibannya berdasarkan norma yuridis dan prinsip etis-moral yang berlaku universal. Maka, sebagai subyek politik, manusia wajib dijaga dan diberdayakan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara, mengingat pembangunan sejati adalah membuat manusia menjadi pribadi yang utuh dan menyeluruh dalam segala dimensinya.

Etika politik yang hendak digalakkan di sini merupakan penjelasan turunan dari prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila. Prinsip etis-moral dalam Pancasila yang memuat konsep etika politik dan yang hendak diperjuangkan serta diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan sosial. Langgam politik kekuasaan di tanah air dan strategi legitimasinya dalam wilayah sosial atau pola kepemimpinan nasional dan aplikasi Sismennas selalu diukur oleh kadar keadilan sosial yang sudah berhasil diejawantahkan. Keadilan sosial mengacu pertama-tama pada pemenuhan hak dan kewajiban setiap individu serta perwujudan kepentingan umum sebagai keseluruhan dalam ruang publik. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa Pancasila memberikan pedoman orientatif dan mensyaratkan penerapan etika politik dalam gerak kepemimpinan nasional dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan negara.

b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila dijabarkan dalam Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada bagian Pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara tegas cita-cita nasional, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita tersebut diejawantahkan dalam empat tujuan nasional dan pelaksanaan keempat tujuan nasional ini harus berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan **keadilan sosial**. Lebih afirmatif lagi, UUD 1945 merinci dan menerapkan prinsip keadilan sosial ke dalam aneka bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, misalkan pasal 7A-B tentang pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden, pasal 22 E: Pemilu, pasal 24: kekuasaan kehakiman, pasal 27: warga negara dan penduduk, pasal 28: hak asasi manusia, pasal 31: pendidikan dan pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Menyangkut etika politik dan kepemimpinan nasional dalam hubungannya dengan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan negara, UUD 1945 secara tidak langsung membicarakannya melalui pasal 7A-B tentang pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden: "apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela".

Jika UUD 1945 pasal 7A-B ini dirumuskan secara positif, maka secara tegas diamanatkan bahwa pola kepemimpinan nasional hendaklah sejalan dengan prinsip etika politik yang mengedepankan kaidah transparansi, nilai kejujuran, prinsip kesetaraan, inklusivitas, keadilan dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional

Wawasan Nusantara adalah sebuah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri, lingkungan dan tanah airnya serta eksistensinya sebagai warga dunia dalam jaringan relasi dengan negara-negara di seluruh dunia berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945¹⁶ yang merupakan sintesis dari kebijaksanaan peradaban umat manusia, kearifan lokal dan sistem nilai yang diwarisi dari generasi ke generasi serta pengalaman historis yang khas dan kondisi sosial budaya yang beragam untuk mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan semangat cinta damai, *pro iustitia* dan rasa kemanusiaan.

Sebagai landasan visional Wawasan Nusantara mempunyai dua (2) dimensi pemikiran, yaitu dimensi kewilayahan yang menampilkan realitas teritorial dan dimensi kehidupan sosial sebagai fenomena eksistensial yang terikat dengan jaringan struktural dan relasional. Dalam konteks kehidupan sosial, Wawasan Nusantara secara langsung turut mensyaratkan eksistensi dan peran etika politik sebagai satu instrumen

¹⁶ Bdk. Lemhannas. 2013. Wawasan Nusantara (Manuscripto – No. 04). Jakarta: Lemhannas, 49-49.

nilai yang menyemai dan memperkuat integrasi nasional, menumbuhkan rasa senasib, memunculkan pemimpin nasional yang mewakili semua warga, menjamin pembagian kekuasaan yang adil.

Dalam konteks sosial-politik-kultural, Wawasan Nusantara menjadi penjamin eksistensi semua warga, memberikan kepastian hukum, rasa aman dan mendatangkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua. Keadilan yang dimaksudkan ialah pola pikir, pola sikap dan tata laku "yang memberikan dan mendapatkan hak dan kewajiban yang pantas dan proporsional bagi semua komponen bangsa pada segenap aspek kehidupan". ¹⁷ Jadi, Wawasan Nusantara mengafirmasi peran substansial etika politik dalam Sismennas.

d. Tannas sebagai Landasan Konsepsional

Sebagai landasan konsepsional Tannas merupakan kondisi dinamis bangsa yang memuat semangat ulet dan ketangguhan untuk mengembangkan, mengolah dan mengelola potensi menjadi realitas kekuatan nasional¹⁸ sehingga kita mampu menjadi bangsa yang mandiri dan mawas diri guna mewujudkan kesejahteraan dan keamanan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Kondisi dinamis multi aspek bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan mengacu pertama-tama pada aspek mental, intelektual dan spiritual dan bukan pada aspek instrumental dan teritorial.

Konsep keuletan dan ketangguhan mental, intelektual dan spiritual merupakan ekspresi nilai-nilai moral dasar dan etika politik yang sangat diperlukan oleh segenap komponen bangsa, terutama para pemimpin nasional dalam memimpin, mengelola dan memberdayakan semua potensi bangsa. Manakala tata perilaku Individu dijiwai oleh standard nilai baik dan buruk, adil dan tidak adil, benar dan keliru secara moral, maka dia masuk dalam kategori manusia yang mandiri, berintegritas dan tangguh.

Tannas berarti sikap ulet dan tangguh, memiliki profesionalitas dan integritas moral untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang bersifat militer dan nir militer atau sistem nilai, semesta konsep, ekonomi dan sikap hidup yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam konteks lokal-nasional wujud konkret dari ancaman terhadap Tannas ialah bahaya KKN, konflik sosial yang menggerogoti tata laksana pemerintahan. Jadi, Tannas secara eksplisit mengafirmasi peran penting etika politik dan etika politik merupakan *conditio sine qua non* bagi Sismennas.

_

¹⁷ *Ibid.*, 55.

¹⁸ *Id. Konsepsi Ketahanan Nasional*. (Manuscripto – No. 06). Jakarta: Lemhannas, 11.

8. Peraturan Perundang-undangan sebagai Landasan Operasional

Landasan operasional untuk menggalakkan etika politik dalam Sismennas sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Semua aturan perundang-undangan (UU) ini menegaskan secara implisit atau eksplisit bahwa etika politik menduduki posisi kunci dan peran yang signifikan dalam tata laksana penyelenggaraan pemerintahan negara untuk membangun bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

a. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

UU No. 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menggarisbawahi secara implisit etika politik dalam tata laksana penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai negeri di Indonesia. Menurut UU ini, dalam rangka mencapai tujuan nasional, maka diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat untuk segera "mewujudkan masyarakat madani yang **taat hukum**, berperadaban modern, demokratis, makmur, **adil**, dan **bermoral**".

Bagian penjelasan UU. No. 43 Tahun 1999 pasal 1 menyatakan "bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang bertugas sebagai abdi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional dan tugas luhur tersebut sangat tergantung pada *kesempurnaan* aparatur negara khususnya Pegawai Negeri".

b. UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wujud konkret dari kesadaran seluruh anak bangsa, mulai dari aparatur negara dan segenap lapisan masyarakat tentang betapa sistem tata kelola pemerintahan negara harus memiliki landasan moral dan etika dinyatakan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pemberantas tindak pidana korupsi. Aturan perundangan yang dibentuk pertama adalah UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian dilengkapi lagi dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan kemudian disempurnakan lagi dengan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap etika politik dalam Sismennas. Jiwa dasar yang menganimasi aturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pemahaman bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga masuk dalam kategori kejahatan. Karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi harus kontinyu, sistematis dan dilakukan secara luar biasa.

c. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pada alasan menimbang poin b menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Pada pasal 3 digarisbawahi bahwa pendidikan nasional "berfungsi mengembangkan kemampuan (...) agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia".

Untuk mewujudkan program pendidikan nasional, Pemerintah menyusun dan memberlakukan kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi (pasal 36 ayat 3) dengan mempertimbangkan aneka faktor antara lain: "peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, agama ...". Pada pasal 37 ayat 1 dan 2 bahan ajaran di tingkat dasar dan menengah "wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan", sedangkan bagi "pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa".

d. UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman

Gagasan tentang etika politik secara eksplisit sudah menjadi perhatian besar dalam sistem tata kelola pemerintahan negara seperti terumuskan dalam UU No. 37/2008 tentang Ombudsman. Ditegaskan bahwa "pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum (...) untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, pengawasan pelayanan (...) menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, (...) terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme".

Tujuan Ombudsman dinyatakan dalam pasal 4 adalah "mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme (...) yang berintikan kebenaran serta keadilan".

e. UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Masyarakat umum, aparatur negara dan pejabat pemerintahan memiliki kesamaan visi dan konsepsi tentang betapa fundamental kedudukan dan fungsi etika politik dalam pengaturan, pengelolaan dan pemberdayaan segenap sumber daya dan sumber dana yang dimiliki bangsa ini. Kesamaan visi dan konsepsi itu dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam UU terbaru ini disebutkan secara eksplisit tema tentang **etika politik**.

Tema etika politik dinyatakan secara tersurat dalam pasal 31 ayat 2 dan ditempatkan dalam kerangka tugas yang diemban oleh setiap partai politik di tanah air guna "melakukan pendidikan politik dan tujuannya adalah **membangun etika** dan budaya **politik** sesuai dengan Pancasila". Lebih lanjut, pasal 34 ayat 3b poin b secara lebih rinci memberikan penjelasan tentang arti pendidikan politik sebagai "pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam **membangun etika** dan budaya **politik**".

f. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 adalah *Indonesia yang sejahtera*, *demokratis dan berkeadilan*. Visi itu dirinci ke dalam lima agenda pembangunan nasional, di antaranya "perbaikan tata kelola pemerintahan" (agenda kedua), "penegakan hukum dan pemberantasan korupsi" (agenda keempat). Sementara itu, arah kebijakan umum yang digariskan adalah memperkuat dimensi keadilan dan pemberantasan korupsi secara konsisten untuk mencapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Dalam RPJMN 2010-2014 Buku II bab 6.1.3 poin b, langkah yang diambil guna mewujudkan arah kebijakan dan strategi pembangunan adalah "pelaksanaan pendidikan politik, termasuk di dalamnya (...) etika politik demokrasi". Dengan

demikian, hakekat pembangunan nasional terarah pada pembangunan manusia yang berwawasan keadilan sosial, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, menghargai kemajemukan, mengutamakan sikap hormat terhadap hak dan kewajiban dalam semangat demokrasi yang beretika dan bermoral.

9. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori etika politik keutamaan menurut Aristoteles dan teori Hasta Brata menurut R. Ng. Ronggowarsito.

a. Teori Keutamaan Etis

Aristoteles mengatakan bahwa keutamaan (*aretè*) berasal dari kebiasaan (*habitus*) yang dilakukan oleh individu secara berulang-ulang menurut tata aturan dan sistem nilai tertentu. "Kebiasaan-kebiasaan lahir dari kualitas karakter yang bersifat permanen. Maka, aneka aktivitas yang dilakukan harus memiliki kualitas karakter permanen tertentu: karena begitu aktivitas ini sejalan dengan aneka perbedaan kualitas yang ada muncullah kebiasaan". ¹⁹ Jika polis menginginkan semua anggotanya hidup menurut nilai-nilai etis, maka mereka wajib diberikan pendidikan etika.

Pendidikan etis merupakan sebuah sarana untuk membentuk individu menjadi manusia yang sadar, mampu memilih dengan bebas, bertindak adil dan moderat. Gagasan adil dan moderat mengacu pada posisi di tengah, *in medio stat virtus* - keutamaan berada di tengah. Aristoteles mengatakan, "kita biasa mengatakan bahwa untuk perbuatan yang baik tidak ada yang harus dibuang atau ditambah...(karena) kelebihan dan kekurangan merusak kesempurnaan, tetapi berada di tengah-tengah menyelamatkannya".²⁰

Apa arti keutamaan menurut Aristoteles? Keutamaan merupakan *locus* - tempat menerjemahkan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan norma-norma rasionalitas ke dalam praksis tindakan dan kesempurnaan intelektual yang berciri konseptual-teoretis murni ke dalam bentuk yang operasional. Aristoteles menekankan keutamaan karena warga polis merupakan orang yang mengemban tugas menata, mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan menangani bidang

¹⁹ Aristoteles. 1994. Etica Nicomachea. Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 147: II, 1, 1097 b 22-24.

²⁰ *Ibid.*, 165: II, 5, 1106 b 10.

kehakiman.²¹ Dalam memimpin dan mengurus polis, bagian yang dominan adalah jiwa sensitif atau perasaan, keinginan dan hasrat. Artinya selalu terbuka peluang bagi pejabat polis untuk menyimpang dari idealitas masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip etis. Atas pertimbangan itu Aristoteles menekankan keutamaan dan pendidikan etika politik sebagai prasyarat utama bagi warga polis.

b. Teori Hasta Brata

Doktrin hasta brata atau delapan kebajikan yang digagas Ronggowarsito sungguh-sungguh komprehensif dan fundamental dalam pendidikan etika dan moral, terutama berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam doktrin hasta brata terungkap secara eksplisit nilai-nilai etika politik berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara.

Delapan kekuatan alam semesta²² (matahari, bulan, bintang, awan, air, bumi, angin dan api) merupakan simbolisasi dan analogi dari kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Matahari menggambarkan kecerdasan dan kecemerlangan nalar, bulan menyimbolkan kehalusan budi, bintang menampilkan kemampuan mengambil jarak supaya dapat memberikan solusi yang tepat guna, awan memanifestasikan sifat dan watak yang adil, menghargai dan menghukum, angin mengungkapkan karakter yang bijaksana, kuat dan lembut, laut menyimbolkan keluasan wawasan dan kebesaran hati untuk memaafkan, bumi mengekspresikan sifat yang murah hati, sumber hidup dan berani berkurban, api menampilkan kemampuan memotivasi, memberikan harapan dan membangun optimisme.

Kedelapan kebajikan tersebut mustahil dimiliki oleh manusia tanpa media dan strategi yang tepat. Sama seperti yang digagas Aristoteles, doktrin hasta brata dapat dipahami dan diamalkan hanya lewat pendidikan yang intensif, terpadu dan berjenjang sehingga menghasilkan manusia dan pemimpin yang berkeutamaan.

10. Tinjauan Pustaka

a. Franz Magnis-Suseno SJ. 1988. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.

Dalam buku ini Magnis-Suseno membicarakan persoalan etika politik secara historis, sistematis dan mendalam. Pokok kajian diawali dengan membahas

_

²¹ Id. 1996. Politica. Roma-Bari: Laterza, 75: III, 1, 1274 b 40.

²² Bdk. Lemhannas. 2013. *Kepemimpinan Negarawan* (Manuscripto – No. 15). Jakarta: Lemhannas, 8.

definisi makna, bidang garapan, metode yang digunakan, landasan teoretis dan relasi etika politik dengan ilmu-ilmu politik yang lain. Lalu, diberikan panorama historis tentang legitimasi kekuasaan yang bernuansa religius dan upaya untuk keluar dari hegemoni keagamaan dengan menemukan bentuk legitimasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara argumentatif - rasional.

Pembahasan etika politik menurut Magnis-Suseno terkait erat dengan hukum. Etika politik memberikan tuntunan, acuan dan pedoman yang orientatif bagi penguasa. Namun orientasi tersebut harus diwujudkan dalam tatanan praktis dan dirumuskan dalam format yuridis-formal, seperti hubungan hak dan kewajiban, kesederajadan, kebebasan, solidaritas, keadilan sosial, hak asasi manusia, kekuasaan negara dan legitimasi moralnya. Etika politik selalu berada dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan menganut prinsip keadilan sosial.

Tulisan ini terinspirasi gagasan Magnis-Suseno yang memahami tugas negara untuk mendukung dan melindungi nilai-nilai moral yang memberikan identitas kepada seluruh warganya. Kesempurnaan moral pribadi selalu berada dalam wewenang dan tanggung jawab personal, sedangkan negara dapat bertindak jika perbuatan individu melanggar norma-norma yuridis dalam ruang publik. Perbedaan antara penulis dengan Magnis-Suseno terletak pada pembahasan yang diakhiri dengan penentuan kebijakan, strategi-strategi dan langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya.

b. Dennis F. Thompson. 2001. *Etika Politik Pejabat Negara* (Terj. Benyamin Molan). Jakarta: Obor.

Pendahuluan buku ini dibuka dengan frase yang sepintas lalu antagonistis: "Politik berkata, 'Karena itu cerdiklah seperti ular', namun moral menambahkan syarat yang membatasi, "dan tulus seperti merpati". Seakan-akan antara etika dan politik terdapat konflik yang mustahil didamaikan. Namun kesan antagonistis tersebut lenyap, karena pengarang justru menegaskan keterkaitan intrinsik etika dengan politik bahwa eksercitasi kekuasaan dalam ranah publik memiliki batasan-batasan etis yang memungkinkan penyalahgunaan-nya diminimalisir dan kesejahteraan umum direalisasikan.

Alasan dasar dari keterkaitan etika dengan politik ialah fakta bahwa politik selalu bertalian dengan relasi dan interaksi antarmanusia dalam hidup sosial guna

mewujudkan kepentingan bersama. Tindakan mewujudkan kepentingan bersama selalu menyentuh hak dan kewajiban pihak-pihak lain. Maka, dalam hal ini moralitas dapat memberikan acuan dan pedoman kepada politik untuk mengambil sikap dan sekaligus melakukan suatu tindakan.

Tuntutan etika mensyaratkan bahwa setiap pelanggaran yuridis harus diproses, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara karena dapat memacu demokratisasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Tindakan hukum diperlukan supaya menghindari arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi ciri kekuasaan paternalistik, pemerasan terhadap pejabat publik akibat privasi yang dilanggar dan masyarakat yang menjadi obyek eksperimen sosial dari berbagai kebijakan demi kebaikan bersama sebelum diberlakukan secara menyeluruh.

Buku ini sungguh memberikan wawasan tentang kerumitan hubungan etika dengan politik. Secara umum buku ini mempunyai kesamaan tematis dengan tema yang penulis elaborasikan, yaitu hubungan intrinsik etika dan politik. Namun, tetap ada perbedaan signifikan, mengingat ruang cakupan pembahasan ini melingkupi semua komponen masyarakat yang terlibat dalam Sismennas.

BAB III

KONDISI ETIKA POLITIK

DALAM SISTEM MANAJEMEN NASIONAL SAAT INI

11. Umum

Gagasan tentang masa kini mempunyai nilai penting bagi hidup manusia, karena masa kini menjadi pijakan untuk melihat kembali masa lampau dan meneropong masa depan. Melihat kembali masa lampau tercetus dalam sejarah, sedangkan meneropong masa depan terungkap dalam cita-cita dan harapan. Upaya untuk menggalakkan etika politik dalam Sismennas guna memunculkan kepemimpinan yang negarawan dalam rangka Tannas selalu berada dalam konteks ruang dan waktu, di sini dan saat ini.

Konteks ruang dan waktu mengisyaratkan bahwa proses memasyarakatkan etika politik perlu bertitik tolak dari praksis politik yang sedang berlangsung saat ini untuk memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan dihadapi bangsa. Dari kajian terhadap praksis politik yang sedang berjalan, kita dapat menemukan keterkaitan dari berbagai macam faktor dan aktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam praksis politik kontemporer anak bangsa, yang akan membantu untuk mengidentifikasi aneka persoalan yang terkait dengan etika politik dalam Sismennas.

12. Kondisi Etika Politik dalam Sismennas Saat Ini

Secara konkret dan faktual dunia politik dapat dianalogikan dengan ring tinju dan politik merupakan kecakapan dan keterampilan (art) untuk menetralisir dan mengalahkan lawan. Di dalamnya terlibat banyak faktor dan aktor yang saling beradu kekuatan, terlibat perebutan kekuasaan dan berusaha meraih kemenangan dengan menghalalkan segala cara, sehingga pendapat umum mencap politik itu kotor! Banyak yang sering lupa bahwa politik an sich berurusan dengan orang banyak, menyangkut kepentingan umum dan hak-hak individu yang mustahil dilenyapkan begitu saja.

Realitas ini secara intrinsik mengandaikan bahwa dunia politik merupakan sebuah konstruksi atau bangunan sosial yang dikerjakan menurut suatu sistem berpikir tertentu. Sistem politik otoriter atau sistem politik demokratis, sosialis-komunis maupun Pancasila merupakan sebuah opsi, pilihan dan keputusan politik perorangan atau

kelompok tentang bagaimana sebuah kelompok, komunitas atau bangsa dipimpin, diorganisir, dikelola dan diberdayakan. Dalam dunia politik tidak berlaku fatalisme, guratan nasib-*predistinasi* ilahi; kotor atau bersih, bergantung pada pemahaman dan kehendak manusia, sehingga secara prinsipil politik menuntut tanggung jawab.²³ Politik yang bertanggung jawab menuntut kehadiran etika politik dan menjadi manifestasi politik yang beretika.

Bangsa Indonesia telah belajar banyak tentang praksis politik yang otoritarian dan perebutan kekuasaan dengan kekerasan serta upaya justifikasi diri melalui hukum untuk melegitimasikannya. Saat ini bangsa Indonesia semakin sadar bahwa realitas politik yang sarat dengan pertarungan untuk merebut kekuasaan dan menghalalkan segala cara mengkhianati prinsip-prinsip etis-moral Pancasila dan UUD 1945. ²⁴ Rakyat Indonesia ingin berubah dan menginginkan praksis politik yang mengutamakan keteraturan, keharmonisan dan kedamaian untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, sehingga dalam landasan hidup bersama setiap kebijakan dan tindakan memerlukan legitimasi atau persetujuan seluruh warga bangsa.

Kebutuhan terhadap legitimasi mengandaikan bahwa politik harus bersifat rasional²⁵, dalam artian pembenarannya mengisyaratkan wacana normatif dan budaya politik yang menghargai dan mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, hakhak asasi manusia, kehormatan bangsa dan ketertiban dunia. Kesadaran anak bangsa tentang politik yang bertanggung jawab terhadap kemanusiaan, kesejahteraan, keadilan, nama baik dan jatidiri bangsa di tengah percaturan dunia dinyatakan dalam reformasi 1998.

Sejak reformasi bergulir, banyak sekali perubahan yang terjadi di Indonesia baik dalam pengertian positif maupun negatif. Perubahan itu terjadi di segala bidang dan pada setiap strata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan yang berlangsung memberi beragam dampak yang sangat signifikan terhadap praksis hidup berbangsa dan bernegara entah di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Salah satu aspek sangat penting yang muncul sejak transformasi multi dimensi bergulir adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat luas mengenai kedudukan dan fungsi etika politik dalam Sismennas.

_

²³ Bdk. Franz Magnis-Suseno. 1994. *Etika Politik. Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.* Jakarta: Gramedia, 17.

²⁴ Bdk. Perpres No. 5 Tahun 2010. RPJMN 2010-1014. Buku I, Bab II, 1-5.

²⁵ Bdk. Dr. Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas, 1-2.

Secara umum terdapat banyak sekali capaian dan kemajuan yang sangat berarti dan membanggakan di segala bidang selama era reformasi. Begitu pula pengertian dan kesadaran terhadap sentralitas dan urgensi etika politik dalam tata kelola pemerintahan negara dan pola kepemimpinan yang mengutamakan politik yang bernurani cukup memberikan harapan dan membangkitkan optimisme. Capaian dan kemajuan yang memberikan optimisme dan harapan pada upaya menggalakkan etika politik dalam tata kelola pemerintahan negara tersimpul dari sekian banyak aturan perundang-undangan yang dibentuk dan diberlakukan. Semua norma yuridis tersebut mengarah pada satu tujuan, yakni mewujudkan pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka meraih cita-cita Indonesia yang sejahtera, berbudi luhur dan berkeadilan.

Namun demikian, masih terdapat mata rantai persoalan yang menunggu untuk dibenahi termasuk bagaimana menggalakkan etika politik dalam tata penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁶ Etika politik dan politik yang bernurani bukan sekedar wacana dan kesadaran, melainkan harus mendarat dalam kenyataan, memberi inspirasi dan terbukti dalam perbuatan. Jika etika politik dan politik yang bernurani mulai tertanam kuat, maka proses dan peluang untuk memunculkan para calon pemimpin dan langgam kepemimpinan yang negarawan terbuka lebar dan Tannas yang tangguh bisa terwujud.

a. Tata Kehidupan Masyarakat

Sejak reformasi bergulir tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mengalami perubahan yang signifikan. Indonesia adalah negara demokratis. Di mana-mana menjamur berbagai kelompok, organisasi massa dan partai politik baik yang bernafaskan nasionalisme, agama maupun kedaerahan. Jadi, kebebasan sipil di tanah air menunjukkan kinerja yang positif, memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat seperti diamanatkan dalam UUD 1945.²⁷

Alam kebebasan yang tercipta sejak era reformasi semakin meningkatkan intensitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial politik. Intensitas partisipasi masyarakat dikatakan meningkat karena secara kultural bangsa Indonesia memang sangat menekankan kehidupan bersama di mana sikap tolong-

²⁶ Bdk. Perpres No. 5 Tahun 2010. *Op cit*. Buku II, Bab VI, II.6-11,-12.

²⁷ *Ibid.*, II.6-1.

menolong dan hidup berorganisasi seakan sudah mengalir dalam darah manusia Indonesia. Realitas ini dibuktikan oleh hasil studi Indeks Masyarakat Sipil Yappika (tahun 2006) bahwa empat dari lima orang Indonesia pernah memberikan bantuan kepada warga lain, separuh pernah menjadi anggota suatu organisasi dan satu dari tiga orang Indonesia pernah menjadi anggota lebih dari satu organisasi.²⁸

Partisipasi aktif rakyat Indonesia dalam mendukung dan menggerakkan roda organisasi bukan hanya berhenti pada donasi material dan finansial. Keterlibatan mereka diwujudkan pula dalam aktivitas konkret yang berorientasi pada perubahan cakrawala, pola sikap dan pola tindak warga bangsa dalam ruang publik. Hal itu terbukti dari kehadiran sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia dan kinerja mereka yang cukup berhasil dalam memperjuangkan demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM), pemberdayaan warga negara, memberikan *pressure* kepada aparatur negara agar mengusahakan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN.

Di samping keberhasilan yang telah hadir di depan mata, harus diakui pula bahwa tatanan hidup bersama sebagai sebuah bangsa masih harus diperjuangkan dan tingkatkan lagi. Pemerintah pun dengan lapang dada mengakui bahwa tata kehidupan masyarakat masih jauh dari sempurna. Kemampuan dan partisipasi masyarakat untuk menjadi partner yang produktif dan konstruktif bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan publik dan melakukan pengawasan kepada penyelenggara negara masih jauh dari memadai. Realitas ini dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 dengan rincian persoalan yang jelas.

Kelemahan *pertama*, kekurangan dalam manajemen tata pengorganisasian masyarakat termasuk dalam pengkaderan dan pengelolaan segenap potensi warga masyarakat. Kelemahan *kedua* berkenaan dengan kelemahan terhadap akses informasi oleh warga masyarakat dan bahkan organisasi masyarakat sipil. *Ketiga*, dukungan sarana prasarana, pelatihan, permodalan serta akses distribusi dan pemasaran pada proses pengembangan unit-unit produksi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil masih terbatas. Kelemahan *keempat* menyangkut keterbatasan dalam dialog yang memberi peluang bagi proses pertukaran gagasan, pengalaman dan pembelajaran di kalangan warga masyarakat dan antar-organisasi masyarakat akibat keterbatasan mobilitas mereka. *Kelima*, wabah korupsi dan ketidaktransparan yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun wadah

²⁸ *Ibid.*, II.6-6.

organisasionalnya turut memberi andil terhadap sikap apartis warga dan kesulitan dalam pemberdayaan masyarakat.²⁹

Lebih lanjut, pemerintah menyadari pula bahwa masyarakat kerap diperlakukan sebagai obyek manipulasi dan instrumen politik kekuasaan daripada kelompok sosial yang bermartabat dan elemen penting dalam menyeimbangkan tarik-menarik kepentingan di antara elit politik. Ketika terjadi suatu kasus yang melibatkan aparat dan masyarakat, kegiatan advokasi sering memobilisasi rakyat atau sekelompok masyarakat korban sebagai barisan pagar betis daripada memberdayakan masyarakat sebagai basis perubahan.³⁰

Secara kesatria Pemerintah mengakui pula bahwa pemenuhan hak-hak politik rakyat masih terkendala oleh persoalan normatif tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik rakyat dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah. Sebagai perbandingan, dalam Pemilu Legislatif 2009 partisipasi politik masyarakat mencapai angka 70,99%, sementara pada Pemilu Presiden 2009, angka partisipasi politik rakyat berada pada kisaran 72,56%. Tingkat partisipasi politik rakyat pada Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2009 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2004 yang angka partisipasi politik dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif masing-masing meraup 77,44% dan 84,07%.³¹

Singkat kata, dalam tata kehidupan masyarakat, etika politik masih belum menjadi prioritas utama, sehingga kerap kali aspirasi rakyat sebagai elemen pemasok kepentingan dalam siklus perumusan dan perencanaan kebijakan pembangunan nasional terdeviasi dan terhenti pada level organisasi masyarakat sipil. Kebuntuan dan deviasi demikian turut memicu ketegangan vertikal maupun horizontal, karena khalayak ramai merasa bahwa pemerintah mengambil kebijakan sepihak yang tidak *pro* rakyat.

b. Tata Politik Nasional

Salah satu capaian terbesar dari era reformasi adalah pembaharuan dalam bidang politik untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Indonesia berhasil melewati transformasi politik dari tatanan politik yang otoriter kepada

_

²⁹ Bdk. Perpres No. 5 Tahun 2010. *Op cit.* Buku II, Bab VI, II.6-13,-14.

³⁰ Bdk. Ibid.

³¹ Bdk. *Ibid*. Buku II, Bab VI, II.6-2.

tatanan politik yang relatif demokratis. ³² Pemerintah mengapresiasi dan memberikan dukungan konkret dalam bentuk revisi terhadap aturan perundangundangan yang mengatur tata politik nasional. Sejak reformasi 1998, UU tentang partai politik telah direvisi selama 4 kali, mulai dengan UU No. 3 /1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang direvisi dan diganti dengan UU No. 3 Tahun 1985, UU No. 3 Tahun 1985 disubstitusi dengan UU No. 2 Tahun 1999 dan UU No. 2 Tahun 1999 diperbaiki dan diganti dengan UU No. 31/2002, dan UU No. 31/2002 direvisi dan diganti dengan UU No. 2/2008 dan UU No. 2 Tahun 2008 direvisi dan diganti dengan UU No. 2/2011.

Revisi demi revisi terhadap UU tentang partai politik menunjukkan adanya proses pendewasaan dan kedewasaan politik anak bangsa. Dalam UU No. 2/1999 sangat terasa semangat reformasi. Mengingat ada keberagaman masyarakat, maka beragam pula opini dan persepsi yang dimanifestasikan dalam pembentukan berbagai partai politik. Dengan demikian, negara mengakomodir partai-partai politik yang dibentuk oleh rakyat dan harus bersifat terbuka, bukan pemicu disintegrasi tetapi perekat dan pengikat integrasi bangsa.³³

Dalam UU No. 31/2002 ditekankan kedewasaan berpolitik dan tanggung jawab partai-partai politik dalam mewujudkan cita-cita bangsa secara utuh dan terpadu melalui penyederhanaan jumlah partai politik yang berkompetisi. Kedewasaan berpolitik dan demokrasi yang bertanggung jawab dapat dicapai hanya melalui penataan kehidupan kepartaian, ketersediaan sistem dan proses pelaksanaan Pemilu secara jujur, bersih, transparan, adil dan merata.³⁴

Dalam UU No. 2/2008 digarisbawahi beberapa paradigma baru yang diakomodir untuk memperkuatkan konsolidasi demokrasi yang diarahkan untuk memperkokoh sistem dan kelembagaan partai politik. Paradigma-paradigma baru itu meliputi demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik, peningkatan partisipasi perempuan sebagai wujud kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional yang mencerminkan karakter bangsa serta pendidikan politik.³⁵

³² Bdk. Ibid. Buku I, Bab II. 2.2. Pencapaian Pembangunan Nasional 2004-2009, I-5,-9.

³³ Bdk. UU No.2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik: Penjelasan Umum.

³⁴ Bdk. UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik: Penjelasan Umum.

³⁵ UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik: Penjelasan Umum.

Selanjutnya, UU No. 2/2011 menekankan dua aspek yang dapat mendukung sistem politik presidensil. Aspek *pertama* berkaitan dengan pembentukan sikap dan perilaku partai politik guna mewujudkan budaya politik yang menghargai sistem demokrasi dengan menyeleksi dan merekruit semua anggota, memprioritaskan pengkaderan dan pengembangan sistem kepemimpinan yang sungguh kuat. *Kedua*, memaksimalkan fungsi partai politik lewat pendidikan politik, pengkaderan dan rekruitmen politik yang efektif, supaya menghasilkan calon pemimpin yang cakap dan berintegritas. ³⁶

Pada tataran praksis politik, sejak era reformasi bergulir telah berdiri kurang lebih 160 partai politik di Indonesia. Pada Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009, masing-masing diikuti oleh sebanyak 48, 24 dan 44 partai politik, termasuk 6 parpol lokal yang menjadi kontestan Pemilu dan tahun 2014 diikuti oleh 15 partai politik plus 3 partai politik lokal di Aceh.³⁷ Saat ini partai politik telah memiliki *bargaining power* yang amat diperhitungkan, berperan sebagai representasi dan manifestasi politik, terlibat dalam konstruksi pemilu yang kompetitif dan politik yang dialogis. Singkat kata, partai politik sudah mewakili agregasi dan artikulasi kepentingan sosial serta menyiapkan sosialisasi politik.³⁸

Konsolidasi demokrasi dalam tata politik nasional mencapai puncaknya dengan keputusan yang sangat berani melalui pemberlakuan Pemilu langsung Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia pada tahun 2004 dan Pemilu langsung kepala daerah pada 2005 hingga kepala desa. Kini seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh tanah air dipilih langsung oleh rakyat.³⁹

Partisipasi politik rakyat untuk terlibat aktif dalam partai-partai politik yang ada di tanah air belum diimbangi oleh kinerja partai-partai politik yang berorientasi pada politik yang cerdas dan santun, politik etis dan bernurani yang mengutamakan bonum commune. Akibat pengaruh liberalisme dan demokrasi yang individualistis, dalam semesta wacana politik yang berkembang di ruang publik, terutama yang ditampilkan di media massa cetak dan elektronik, langgam komunikasi politik cenderung memihak, mengadili dan menghukum secara publik orang-perorangan

.

³⁶ UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan terhadap UU No. 2 Tahun 2008: Penjelasan Umum.

³⁷ http://www.kpu.go.id/: Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg DPR RI, diakses 8 Mei 2013, pkl. 21.00.

³⁸ Bdk. Perpres No. 5 Tahun 2010. *Op cit.*, Buku II, Bab VI, II.6-5.

³⁹ *Ibid*.

atau suatu institusi sebelum pihak yang berwenang menjatuhkan keputusan yang bersifat yuridis.

Selain itu, komunikasi politik kontemporer yang berbudaya, berkeadilan dan beradab perlahan-lahan ditinggalkan dan diganti dengan pola komunikasi politik yang mengedepankan aneka kepentingan yang sektoral, bernuansa kedaerah dan keagamaan. Paralel dengan pola komunikasi politik yang cenderung melakukan abuse of power dan character assassination adalah senjakala budaya politik yang menghargai perbedaan keyakinan politik dan agama, keanekaragaman suku bangsa dan sistem nilai, menaruh hormat terhadap asas praduga tidak bersalah.

Dalam lingkup roda organisasinya, partai-partai politik masih berkutat dengan konflik internal dan lebih berorientasi mengejar kekuasaan daripada misi luhur untuk membangun bangsa yang makmur, adil dan sejahtera. Potret buram tata politik nasional disimpulkan dalam RPJMN 2010-2014 bahwa partai politik belum melaksanakan fungsi utamanya seperti agregasi dan artikulasi politik, komunikasi politik dan pendidikan politik.⁴⁰

Yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah ialah bagaimana memperbaiki tata politik nasional, terutama mencari solusi untuk menurunkan biaya politik yang tinggi, memperbaiki pola rekruitmen, kaderisasi dan meningkatkan kesadaran moral (calon) politisi mengenai tanggung jawab sosial terhadap konstituen dan rakyat. Keprihatinan dan pekerjaan rumah ini lahir dari keterlibatan para wakil rakyat dalam beragam kasus baik kesusilaan maupun korupsi. Menurut Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri yang dikutip Tempo, sejak reformasi hingga 2012 terdapat 431dari total 2008 anggota DPRD di seluruh Indonesia terlibat korupsi. ⁴¹

Wabah korupsi yang menggerogoti dunia perpolitikan nasional akibat biaya politik yang tinggi dan terus memakan korban demi korban di kalangan politisi merupakan tanda bahwa etika politik belum menjadi parameter dan pertimbangan utama bagi partai-partai politik dalam merekrut anggota, mengadakan kaderisasi kepemimpinan dan menjalankan aktivitas politik. Hal ini merupakan alasan utama mengapa menggalakkan etika politik dalam sistem manajemen mendapat momentum yang tepat.

.

⁴⁰ Ibid. Op cit. Buku II, Bab VI, II.6-12.

⁴¹ http://www.tempo.co/read/news/2012/08/29/078426251/Ribuan-Pejabat-Daerah-Terlibat-Kasus-Korupsi, diunduh Jumat, 5 April 2013, pkl. 20.37.

c. Tata Administrasi Negara

Sejak masa reformasi hingga saat ini tata administrasi negara telah mengalami banyak perbaikan untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi, mengusahakan pemerintah yang baik dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, terbuka dan akuntabel. Rangkaian perbaikan itu dimulai dengan mengamandemen UUD 1945 dan ditindaklanjuti dengan banyak UU dan aturan turunannya serta dikonkretkan melalui RPJMN dengan beragam prioritas, kebijakan, strategi dan upaya.

Dari 2007 sampai dengan tahun 2013 sejumlah landasan struktural penting berhasil dibuat untuk memberikan landasan yang kuat bagi lembaga demokrasi, proses konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan dan penyelenggaraan Pemilu 2014 yang berkualitas. Undang-undang politik pun telah mengalami revisi demi revisi dan yang terbaru adalah UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mengganti UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Pemilu.

Keseriusan Pemerintah dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan negara supaya terwujud tata pemerintahan yang bersih, berkeadilan, transparan, akuntabel dan memberi tempat bagi politik yang beretika dinyatakan dalam pembentukan UU No. 43/1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UU No. 7/2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dan ditindaklanjuti dengan UU No. 3/2010 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4/2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30/2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 17/2007 Tentang RPJMN 2005-2025 dan UU No. 37/2008 Tentang Ombudsman.

Di luar semua perbaikan dalam tata administrasi negara, masih terdapat banyak persoalan yang harus ditangani dan dipecahkan. Persoalan yang kerap kali ditemukan justru terletak pada penerapan peraturan perundang-undangan yang cenderung bersifat ego sektoral. Aturan perundang-undangan yang bermaksud memberikan landasan struktural untuk mempermudah dan memperlancar kerjasama lintas instansi dan antar-lembaga dalam proses pembangunan bangsa

malah dimaknai secara sempit, sehingga menimbulkan benturan kepentingan di antara berbagai pihak.

Persoalan berat lain yang perlu disikapi dengan serius dan ditemukan segera solusinya adalah kelemahan dalam sistem administrasi kependudukan nasional. 42 Kelemahan ini bersinggungan langsung dengan hak-hak setiap warga negara yang harus dijamin, dilindungi dan dihargai oleh negara. Akibat dari kelemahan dalam sistem administrasi kependudukan adalah ketersisihan dari aktivitas hidup, berbangsa dan bernegara, terpinggirkan dari proses dan penikmatan hasil pembangunan. Misalkan dalam Pemilu legislatif 2009, sekitar 45 juta jiwa tidak bisa memilih 43 dan kejadian itu terus berulang di semua daerah hingga hari ini. Secara konkret, implikasi langsung dari kelemahan sistem administrasi kependudukan nasional adalah banyak penduduk tidak dapat menikmati subsidi, bantuan sosial dan menggunakan hak pilih karena tidak tercantum sebagai warga negara. Kekeliruan ini seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi di negara yang berdasarkan Pancasila.

Benturan kepentingan di antara para pemangku kekuasaan, kelemahan dalam sistem administrasi kependudukan yang terjadi berulang-ulang dan sistemik di tengah masyarakat merupakan indikasi bahwa etika politik masih belum menjadi prioritas pertama dan utama dalam tata laksana penyelenggaraan pemerintahan negara pada umumnya dan tata administrasi negara pada khususnya. Keprihatinan semata terhadap potret buram Indonesia tidak bermakna apapun. Indonesia memerlukan langkah nyata untuk memicu dan memacu proses hidup bersama yang mengedepankan etika politik sebagai jiwa dasar dan nafas kehidupan badan Republik Indonesia.

d. Tata Laksana Pemerintahan

Secara struktural, yuridis-formal aturan perundang-undangan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara telah cukup mampu menjadi landasan bersama untuk mengakomodasikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat bagi perbaikan demokrasi, kinerja parlemen dan eksekutif. Tata laksana pemerintahan sudah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan

⁴² *Ibid.*. II.6-4.

⁴³ http://news.detik.com/read/2009/04/14/110000/1115094/700/pramono-45-jutaan-warga-tak-bisa-memilih, diunduh Jumat, 5 April 2013, pkl. 20.45.

sejak era reformasi seperti tergambarkan dalam beberapa peristiwa yang terjadi selama lima tahun belakangan ini.

Bila menoleh ke belakang, Pemilu pada tahun 2009 berjalan dengan demokratis, aman dan damai, walaupun dapat dikategorikan sebagai Pemilu yang paling kompleks dalam sejarah Pemilu. Kompleksitas itu terjadi karena dalam satu hari dilangsungkan Pemilu untuk memilih 560 anggota DPR, 132 orang anggota DPD serta 16.253 orang anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah pemilih mencapai 171.265.442 orang, TPS berjumlah 519.920 buah, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 76.711 orang, jumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah 6471 orang dan 471 KPU Kabupaten/ Kota serta 33 KPU Provinsi.⁴⁴

Perkembangan politik yang demokratis ditandai dengan pemilihan seluruh kepala daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia secara langsung oleh rakyat. Secara umum Pemilu kepala daerah yang sudah berlangsung sejak 2005 telah meletakkan dasar-dasar tradisi berdemokrasi berupa pembelajaran cara berpolitik dan berdemokrasi dan kemampuan masyarakat untuk terlibat langsung mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah sampai selesai. Semua ini merupakan modal sosial yang sangat hakiki dan bernilai strategis bagi kemajuan demokrasi pada masa mendatang.

Ditinjau dari dari sudut tata laksana penyelenggaraan pemerintahan negara, salah satu capaian cukup signifikan dalam proses transformasi untuk mewujudkan keadilan adalah kesadaran bangsa tentang tatanan pemerintahan yang makin bersih dan makin berwibawa. Rakyat terus menyuarakan dan menuntut *good governance* and clean government, genderang perang terhadap tata kelola pemerintahan yang sarat dengan praktik KKN terus ditabuh. Tuntutan tersebut mulai menampakkan hasil dan Indonesia pun berupaya menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa, dan bebas dari kepentingan pribadi dan golongan.⁴⁵

Dari segi akuntabilitas ada indikasi yang memberi harapan. Akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah terus membaik dan beberapa kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja yang bagus selama masa pemerintahannya pun terpilih

⁴⁴ Perpres No.5 Tahun 2010. Op cit. Buku II, Bab VI, II.6-4.

⁴⁵ *Ibid*. Buku I, Bab II, I-6.

kembali. Bahkan banyak pula kepala daerah kabupaten/kota yang memiliki rapor bagus terpilih menjadi gubernur dan atau wakil gubernur. Selain itu, pemerintah pun terus berupaya menggalakkan mekanisme *checks and balances* yang ruang cakupannya telah diperluas ke seluruh lembaga penyelenggara negara di pusat maupun di daerah. Sebagai langkah konkret dari upaya tersebut, berbagai institusi independen pun sudah didirikan untuk memperkuat mekanisme *check and balances*. ⁴⁶

Upaya meningkatkan integritas birokrasi tampak dari peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara seperti tergambar dari opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah. Kemampuan pemerintah pusat dan daerah mempresentasikan laporan keuangan sejak tahun 2005 menunjukkan perbaikan kinerja yang berarti dari tahun ke tahun dan hal ini merupakan catatan sejarah tersendiri dalam tata laksana penyelenggaraan keuangan negara, walaupun kategori opini BPK masih berstatus *disclaimer* atas laporan keuangan pemerintah pusat.⁴⁷

Dalam bidang penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi, penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi lembaga yang sangat disegani oleh para pelaku korupsi dan tumpuan asa bangsa Indonesia untuk mewujudkan tata kelola negara yang bersih, adil, transparan dan akuntabel. Sikap tegas KPK terbukti dari penetapan status tersangka kepada banyak pejabat tinggi dan partai politik yang terlibat dalam tindakan korupsi. Realitas ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk aparat penegak hukum dan pejabat tinggi negara.

Selain capaian-capaian yang pantas dibanggakan, bermacam permasalahan dan persoalan masih melilit hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Satu persoalan yang perlu disikapi dengan serius dan segera ialah wabah korupsi yang melanda dunia pemerintahan. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Transparency International* untuk tahun 2012, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 48 mendapat nilai 32 dari skor 0 - 100 dan menempati di peringkat 118 dari 174 negara yang

_

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ *Ibid.*, Buku II, Bab VIII, II.8-6.

⁴⁸ Diunduh dari http://www.transparency.org/Corruption Perceptions Index 2012, 6 April, 2013, pkl. 09.00.

disurvei. Ini menandakan bahwa korupsi di tanah air sudah akut dan terjadi di semua lini kehidupan, yang seakan-akan membenarkan anggapan publik bahwa secara terbuka mulai dari jalan raya hingga ruang-ruang kerja, uang siluman dan pungutan sudah biasa berseliweran.⁴⁹

Wabah korupsi yang sedang menimpa Indonesia merupakan bukti tentang pengabaian publik terhadap etika politik dalam tata laksana pemerintahan. Berdasarkan laporan tahunan KPK untuk tahun 2012, terdata 917 kasus korupsi. Secara kategoris jumlah pejabat publik yang didakwa terlibat korupsi berdasarkan tingkat jabatan adalah kementerian: 1 kasus, walikota/bupati/ wakil bupati: 4 kasus, eselon I, II, III: 8 kasus dan hakim: 2 kasus. Berdasarkan instansi: dari kementerian/lembaga terdapat 18 kasus, BUMN/BUMD: 1 kasus, Pemerintahan Provinsi: 13 kasus, Pemerintah kabupaten/ Pemerintahan kota: 10 kasus. Datadata mengenai keterlibatan pejabat negara dan pemerintahan dalam tindak pidana korupsi pasti terus bertambah dengan berbagai kasus selama tahun 2013 ini.

Tampaknya, semakin KPK berupaya memberantas korupsi semakin aktor-aktor korupsi beranak-pinak dengan tingkat kecepatan yang mencengangkan. Regenerasi koruptor pun sudah berhasil dengan baik seperti terbukti dari para pelaku korupsi yang masih berusia muda. Terhadap fenomena metamorfosis dan regenerasi pelaku korupsi di di seluruh tanah air, Tajuk Rencana Harian Kompas tgl. 8 Mei 2013 secara tepat dan padat menangkap dan mengungkapkannya dengan memberi judul yang sarkastis: *Yang Muda Yang Korupsi*!

Banyak istilah yang digunakan untuk melukiskan masivitas praktek korupsi yang berlangsung di seluruh strata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti politik tanpa etika, negeri para koruptor, Republik Badut atau politik minus nurani. Semua sebutan ini menggambarkan kegeraman semua warga dan kebuntuan nalar di hadapan banalitas korupsi yang terjadi di negeri yang berketuhanan dan berkeadilan sosial. Korupsi adalah paradoks Negara Pancasila dan karena itu, menggalakkan etika politik merupakan opsi wajib untuk membuat politik beretika dan plus nurani, sehingga Indonesia disebut negeri Jalan Lurus para bijak bestari.

⁴⁹ HCB. Dharmawan dkk. 2004. Surga Para Koruptor, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 3-47, 48-56.

⁵⁰ Dikutip dari http://www.kpk.go.id/id/. KPK. 2012. Laporan Tahunan 2012. Jakarta: KPK, 51, Sabtu, 6 April 2013, pkl. 09.10.

⁵¹ *Ibid.*, 73.

13. Implikasi Etika Politik dalam Sismennas Saat ini terhadap Kepemimpinan yang Negarawan dan Implikasi Kepemimpinan yang Negarawan terhadap Tannas

a. Implikasi Etika Politik dalam Sismennas Saat ini terhadap Kepemimpinan yang Negarawan

Negara merupakan sebuah organisasi raksasa dan kompleks sekali. Sebagai sebuah organisasi, negara secara otomatis memerlukan sistem tata kelola atau sistem manajemen yang berskala nasional guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Pendekatan yang dipakai dalam tata kelola hidup berbangsa dan bernegara adalah kesisteman, yaitu memandang negara sebagai sebuah lembaga yang saling terhubung (inter-relasi), saling mempengaruhi (interaksi), saling bergantung (interdepensi) dalam gerak bersama sebagai satu keseluruhan seturut fungsi masing-masing ke suatu arah yang telah ditetapkan. Sistem tata kelola negara dan pemerintahan secara holistik dan integral disebut Sismennas.⁵²

Sistem mengacu pada jaringan dari bagian demi bagian yang membentuk satu totalitas ada dan saling berhubungan, berpadu, bergantung, bekerja dan bersinergi seturut fungsi masing-masing. Manajemen merupakan proses tata laksana dan tata kelola suatu organisasi dengan cara merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menilai segala upaya penggunaan sumber dana dan sumber daya guna meraih tujuan tertentu. Nasional berarti tata laksana dan tata kelola keorganisasian berada dalam ruang lingkup hidup bersama, berbangsa dan bernegara dengan segala aspeknya. Jadi, Sismennas merupakan himpunan usaha yang terdiri dari tata nilai, struktur, fungsi dan proses untuk memperoleh keteraturan, kehematan, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber dana dan sumber daya nasional guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Secara hakiki Sismennas merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai jiwa bangsa dan UUD 1945 sebagai konstitusi atau sumber hukum. Eksistensi Sismennas diperlukan untuk mengatur, menata dan mengelola wilayah (wadah), penduduk (isi), pemerintahan (tata kelola-laksana) sebagai tiang penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara agar potensi nasional (gatra alamiah) menjadi kemampuan nasional (gatra

⁵² Pokok bahasan tentang *Sistem Manajemen Nasional* di bawah ini diambil dari Lemhannas. 2013. *Sistem Manajemen Nasional* (Manuscripto – No.10).

sosial). Adapun barometer yang digunakan adalah kinerja yang diukur dari tertib administrasi, tertib politik dan tertib sosial sebagai elemen penting dalam Tannas. Secara umum indikasi yang terlihat adalah pemerintahan yang baik, keamanan nasional yang mapan, kepastian hukum, kesejahteraan rakyat dan manusia yang kompetitif.

Dalam empat tatanan kehidupan sosial yang membentuk struktur Sismennas (tata kehidupan masyarakat, tata politik nasional, tata administrasi negara dan tata laksana pemerintahan) terdapat bermacam ragam permasalahan dan persoalan yang berasal-muasal terutama dari keabsenan etika politik. Baik pada tataran *outer setting* maupun *inner setting* terdapat empat persoalan yang menonjol dan berimplikasi langsung pada kemunculan kepemimpinan yang berkarakter negarawan, yakni a) kelemahan dalam proses rekruitmen keanggotaan dan kaderisasi, b) kepentingan yang ego sektoral dan bernuansa SARA, c) biaya politik yang tinggi dan d) wabah penyakit KKN yang menggerus dan menggerogoti secara intensif dan sistematif Sismennas.

Keempat persoalan di atas merupakan virus mematikan bagi Sismennas, karena daya kerusakannya berawal mula dari kehancuran tatanan rasio, moral dan etika yang menjadi hakekat, ciri khas dan pedoman hidup setiap manusia. Tatkala tata nalar, tata etis-moral individu yang mengoperasikan suatu sistem telah tercemar, maka lama kelamaan sistem tersebut pasti akan ambruk. Kerusakan nalar dan hidup etis-moral individu yang diperparah kebobrokan sistem sosial yang menganimasi masyarakat akan menghambat, mempersulit dan bahkan merusak semua proses alamiah untuk melahirkan calon pemimpin yang jujur, adil, profesional, memiliki integritas dan sikap bertanggung jawab. Jadi, upaya untuk memunculkan kepemimpinan yang negarawan menjadi sulit tatkala etika politik kurang mendapat tempat dalam suatu bangsa.

b. Implikasi Kepemimpinan yang Negarawan terhadap Tannas

Manusia adalah *zóon politikon* - makhluk sosial - warga negara. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan (calon) pemimpin dan sistem kepemimpinan untuk menuntun, membantu, memotivasi, memberdayakan semua potensi anggota, menemukan solusi bila menghadapi persoalan, mengambil serta melaksanakan suatu keputusan guna mencapai tujuan bersama. Mencermati problematika yang menerpa Indonesia sebagai bangsa dan negara membutuhkan bukan hanya seorang pemimpin yang cakap, melainkan seorang pemimpin dan kepemimpinan yang negarawan.

Pemimpin negarawan adalah manusia Indonesia yang memiliki kemampuan luar biasa dan kewenangan untuk menuntun dan memberdayakan segenap potensi warga negara dan sumber kekayaan alam guna mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan senantiasa tetap mempertimbangkan dinamika yang berkembang dalam lingkungan strategis nasional, regional dan global.

Secara teoretis esensi kepemimpinan nasional mencakup beberapa hal: a) unsur kepemimpinan yang terdiri atas manusia sebagai pelaksana, sarana (teknik dan prinsip) dan tujuan, b) unsur moral yang bersumber dari nilai dasar Pancasila meliputi moral takwa dalam dimensi vertikal dan horizontal, moral kemanusiaan, moral kebersamaan dan kebangsaan, moral kerakyatan, moral keadilan, c) unsur etika yang terdiri atas etika keorganisasian, etika kelembagaan, etika kekuasaan dan etika kebijaksanaan. Dengan demikian seorang pemimpin nasional wajib memiliki integritas, karakter bangsanya, komitmen, kompetensi dan profesionalitas.

Dalam praksis hidup bersama ternyata upaya memunculkan kepemimpinan yang negarawan terbentur wabah kolusi, korupsi dan nepotisme yang menggerogoti Sismennas dan mengacau-balaukan proses rekruitmen keanggotaan dan kaderisasi baik pada tataran *outer setting* maupun *inner setting*. Proses kemunculan para pemimpin nasional sangat instan dan sebagian amat besar mengandalkan diri pada citra, alasan bernuansa SARA dan dana yang melimpah dan bukan dari proses kaderisasi yang berjenjang, sistematis dan kualitatif. Pemimpin dan kepemimpinan yang negarawan masih menjadi impian bagi bangsa Indonesia.

Keabsenan pemimpin dan kepemimpinan yang negarawan pasti berimplikasi langsung pada Tannas. Tannas merupakan suatu kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan, mengolah dan mengelola potensi menjadi realitas kekuatan nasional, sehingga kita mampu menjadi bangsa yang mandiri dan mawas diri guna mewujudkan kesejahteraan dan keamanan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.⁵³ Kondisi dinamis multi aspek bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan mengacu pertama-tama pada aspek mental, rasional dan spiritual dan bukan pada aspek instrumental dan teritorial. Jadi, Tannas yang sejati berada dalam pikiran, kesadaran, hati sanubari manusia yang bermartabat, mandiri dan berkarakter.

⁵³ *Id. Konsepsi Ketahanan Nasional*. (Manuscripto – No.06). Jakarta: Lemhannas, 11.

Proses kemunculan para pemimpin dan kepemimpinan tingkat nasional saat ini yang sekedar menjual citra, mengandalkan kelimpahan dana dan harta serta dukungan politik yang bermotif SARA secara otomatis melemahkan dan membahayakan Tannas. Mereka adalah pemimpin oportunis dengan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan sendiri dan kelompok dan bukan pada realisasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Jadi, secara logis maupun etis terdapat korelasi antara upaya memunculkan kepemimpinan yang negarawan dan Tannas .

14. Pokok-Pokok Persoalan yang Ditemukan

Dari uraian tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa pokok persoalan yang menonjol dalam menggalakkan etika politik supaya memunculkan kepemimpinan yang negarawan. Pokok-pokok persoalan itu adalah sebagai berikut.

a. Pendidikan Etika Politik belum masuk dalam kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Perguruan Tinggi (PT)

Dari penelisikan terhadap beragam permasalahan dan persoalan yang mendera kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau secara khusus yang terjadi dalam Sismennas, sebab musababnya berakar pada keabsenan pendidikan etika politik dalam kurikulum baik untuk tingkat menengah maupun pendidikan tinggi. Jangankan pendidikan etika politik, bidang studi etika tidak dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Padahal, etika secara umum merupakan suatu permenungan atau diskursus yang mencari prinsip-prinsip rasional dan dasar-dasar argumentasi yang obyektif untuk menganalisa, mempertimbangkan dan menilai apakah sikap dan tindakan manusia secara etis-moral bisa dikategorikan baik atau buruk.

Di banyak negara maju pendidikan etika diberikan pada semester akhir di tingkat SMU. Pertimbangan mengajarkan etika di SMU didasarkan pada realitas yang multi aspek, seperti psikologis, epistemologis, sosial dan kultural. Secara psikologis dan epistemologis, subyek bina yang sudah berada di tingkat pendidikan menengah atas dianggap sudah cukup matang dan mampu berpikir secara logis, terstruktur dan distingtif, sehingga terbuka peluang bagi pemikiran mengenai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau riba, bertanggung jawab atau menyingkir dari tanggung jawab secara argumentatif, rasional dan dialogis. Dengan demikian, pembentukan karakter yang berwawasan etis dan pembinaan kesadaran nurani diperkuat dengan kedalaman

pemikiran, elaborasi yang sistematis dan justifikasi yang tajam tentang sistem nilai etismoral yang menata dan menggerakkan realitas sosial kehidupan masyarakat.

Pada tingkatan usia dini pendidikan budi pekerti sudah dihapus juga dari kurikulum sekolah dasar (SD) dan diganti dengan pelajaran agama. Perlu dicatat bahwa pelajaran agama di SD lebih banyak bersifat teori, hafalan dan berorientasi pada nilai rapor daripada pendidikan nilai-nilai dasar yang disertai dengan contoh dan teladan. Dengan akibat, mata pelajaran agama di sekolah malah cenderung memperkuat aspek ritualis dan yuridis-formal subyek bina yang menumbuhkan sikap tertutup, ekstremisradikal, kesadaran dan perasaan berbeda secara agama daripada pembentukan karakter anak yang humanis, terbuka, toleran dan menghargai kemajemukan.

Makna penting yang hendak ditegaskan adalah kekosongan bidang studi etika dan etika politik dalam kurikulum nasional membuat manusia Indonesia tidak memiliki basis pengetahuan ilmiah untuk membedakan dan menilai segi baik dan buruk dari tindakannya sendiri. Keabsenan ini bertambah berat manakala diterapkan pada lingkup sosial yang sangat kompleks dan penuh dengan bermacam kepentingan yang saling bertolak belakang. Ketika tiada ukuran untuk menilai baik dan buruk suatu perbuatan, maka individu akan menjadikan dirinya sebagai ukuran dan masyarakat cenderung membiarkan dan menerima. Jadi, bangsa Indonesia termasuk abai dalam pembinaan etis-moral warganya, sehingga secara administratif dan sosial menyebabkan terjadi kemerosotan di segala bidang kehidupan.

b. Disorientasi Politik: Politik Minus Etika

Persoalan berikut yang mengemuka dan sekaligus sebagai dampak dari absensi etika politik dalam kurikulum pendidikan nasional adalah disorientasi politik yang ditandai dengan politik minus etika atau praksis politik minus nurani. Sejak reformasi bergulir, bangsa Indonesia mengalami eforia kebebasan yang cenderung ke arah pemujaan individu secara berlebihan (individualisme absolut) dan sistem demokrasi liberalistis tanpa rambu dan norma apapun. Norma-norma yuridis, nilai-nilai luhur Pancasila, kaidah etis dan ajaran moral keagamaan dikesampingkan dan bahkan dianggap sebagai warisan kuno yang sudah usang bagi manusia Indonesia kontemporer pasca reformasi.

Konsekwensi yang muncul dari individualisme absolut, praksis kehidupan politik yang liberalistis dan egosentris adalah kegamangan politik. Bangsa Indonesia

seakan-akan berjalan di tengah rimba raya yang gelap gulita dengan menganut asas yang kuat bertahan hidup, yang lemah menuju alam maut. Penerapan hukum rimba ini tampak jelas dalam praksis politik dewasa ini yang selalu berorientasi pada perebutan kekuasaan, pelestarian *status quo* dan preferensi pada kepentingan kelompok. Amanat luhur Pancasila agar politik memperjuangkan kebaikan bersama, keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua telah diabaikan dan disubordinasikan pada kepentingan partai dan golongan.

Hegemoni kepentingan yang bersifat sektoral dan bernuansa SARA diperparah oleh perilaku KKN yang melibatkan semua aparatur negara dan pejabat pemerintahan mulai dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah. Yang memiriskan dari praktek KKN yang terjadi adalah sikap tidak tahu malu dan tanpa rasa bersalah dari para pelaku yang ditampilkan di layar kaca. KKN seolah bukan lagi perbuatan jahat yang memalukan bagi para pelaku, melainkan kebiasaan yang terkristalisasi dalam langgam birokrasi dan bunga-bunga administrasi.

Disorientasi politik nasional dan praksis politik minus nurani tampak sekali berada di titik nadirnya. Kaum agamawan dan awam yang prihatin dengan kondisi perpolitikan nasional yang sarat dengan KKN akhirnya mengikuti anjuran Platon untuk turun gunung guna menerangi jalan terjal dan gelap gulita dengan keyakinan religius dan perilaku yang terpuji. Namun, dalam perjalanan waktu, seiring dengan kekuasaan besar yang digenggam serta kekayaan melimpah yang dimiliki, kemudahan, kenyamanan dan service yang dinikmati, sepak terjang politisi yang beraliran religius pun tidak lebih baik daripada politisi lama yang sudah berkubang dalam kebejatan. Ketika nabi dan imam berkeliaran mencari kenikmatan, maka massa kebanyakan pun berjalan tanpa tujuan, sehingga sindiran bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami kematian nurani hampir mendekati kenyataan.

c. Krisis Keteladanan

Ketika dunia politik nasional diwarnai oleh aksi saling jegal dan saling jagal sekedar demi menggenggam kekuasaan, mengeruk keuntungan, mengamankan semua kepentingan dan melestarikan kemapanan, yang dipelajari oleh seluruh warga bangsa dari para pemimpin tingkat nasional tiada lain adalah "tradisi" kekerasan, moralitas yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, sikap dan perilaku yang sarat dengan kecurangan, tipuan, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, pembenaran

ketidakadilan, perampokan terhadap kepemilikan pribadi dan kelompok yang dianggap sebagai ancaman dan lawan.

Dalam dunia kepemimpinan yang abai terhadap kebenaran, menutup telinga terhadap jeritan ketidakadilan, menutup mata atas realitas kemelaratan dan membasuh tangan untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban, maka yang dirasakan dan dialami oleh seluruh bangsa adalah krisis keteladanan. Tiada lagi yang dapat diyakini dan diamini, ditiru dan digugu, karena para pemimpin bukan lagi menampilkan diri sebagai pedoman, acuan, contoh-teladan bagi massa kebanyakan, tetapi memposisikan diri sebagai rakyat biasa yang ketiban rejeki untuk mengemban misi suci yang terlalu berat untuk dijalani. Mereka *an sich* bukanlah pemimpin yang disegani dan patut diteladani, tetapi orang-orang yang jadi pemimpin karena mampu membeli.

Kaum cerdik pandai dan kalangan agamawan pun yang terjun dalam perebutan kekuasaan sudah terkontaminasi KKN. Idealisme politik berwajah etis dan tatanan sosial berpedoman ajaran suci nan ilahi hanya berlangsung sesaat sebelum harta, kuasa dan wanita terasa nikmat di raga. Sementara kalangan bijak bestari yang masih setia mendengar nurani dan melakukan perbuatan terpuji, tetapi berada jauh dari pusaran kekuasaan hanya dapat menggertakkan gigi dan menjadi barisan sakit hati. Tampilan mereka hanya seperti macan ompong dan kritikan mereka ditanggapi dengan nada sumbang dan *refren*: kalau kalian sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan, maka pasti belepotan dan tidak karuan seperti kami. Dalam praksis politik nasional kontemporer, para pemimpin nasional bukan lagi berperan sebagai lentera peradaban bangsa, tetapi menyulap diri menjadi drakula yang terus kehausan.

Krisis keteladanan ini tampaknya masih terus berlanjut, sementara langkah-langkah untuk menemukan "obat mujarab" guna menyembuhkannya selalu mendapat resistensi dari banyak pihak, terutama dari kalangan politikus dan sebagian besar aparatur negara dan pejabat pemerintahan yang selama ini menikmati hasil-hasil KKN. Tampaknya penantian anak bangsa terhadap pemimpin yang cakap dan berintegritas, kepemimpinan yang negarawan sama seperti penantian milenaris Ratu Adil. Semua harus bersabar dalam harapan yang tak bertepi.

d. Pemisahan Hukum dari Etika

Dalam sebuah masyarakat yang sarat dengan konflik dan pertentangan, hukum merupakan kunci untuk mengakhiri, solusi guna mengharmonisasi pihak-pihak yang

berkonfrontasi. Masalah menjadi lain, manakala penegakan hukum tidak berjalan sesuai alurnya. Dalam dunia peradilan dewasa ini, tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga penegak hukum berada di titik nadir. Selain persoalan KKN yang begitu kentara mewarnai dunia peradilan, hal yang hakiki ialah pemisahan secara tegas hukum dari etika.

Secara substansial hukum dijiwai oleh etika dan mengusahakan dalam tatanan konkret tuntutan-tuntutan etis moral. Karena itu, yang dicari dan diharapkan dari dunia pengadilan bukan sekedar keputusan yuridis formal, melainkan keputusan yang sungguh mencerminkan rasa keadilan. Dalam praktek yang sedang berlangsung di tanah air, keputusan pengadilan lebih mencerminkan arogansi kekuasaan, berdasarkan pertimbangan dan penafsiran subyektif daripada rasa keadilan, sehingga menimbulkan antipati, resistensi dan kemarahan publik.

Hukum yang berjiwa etis dan menghasilkan keputusan yang mempunyai rasa keadilan masih jauh dari harapan rakyat Indonesia. Fakta bahwa pisau hukum tajam untuk membabat kejahatan berskala kecil dan dilakukan oleh rakyat jelata dan tumpul terhadap kejahatan berskala besar yang melibatkan kaum kaya dan berkuasa menjadi pemandangan harian seluruh masyarakat. Jadi, hukum tanpa etika adalah realita dan bukan sekedar cerita; itulah fakta dan derita yang dirasakan para korban dari kalangan yang berada di luar lingkaran kekuasaan.

BAB IV

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

15. Umum

Secara umum tendensi yang muncul dalam dinamika hubungan internasional kontemporer adalah saling terkait dan saling tergantung di antara bangsa-bangsa. Konsepsi menggalakkan etika politik dalam Sismennas sebagai upaya memunculkan kepemimpinan yang negarawan dalam rangka memperkokoh Tannas dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis pada tingkat global, regional dan nasional serta diwarnai berbagai isu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sistem kepemimpinan, pertahanan dan keamanan.

Bertolak dari pemahaman di atas, maka bagian ini mencoba mendeskripsikan dan sekaligus mengelaborasi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional untuk menemukan *trend* dan isu aktual yang berkaitan dengan etika politik. Berdasarkan deskripsi dan elaborasi atas lingkungan strategis ini, penulis mencoba mengidentifikasi beragam peluang dan kendala yang ikut berpengaruh pada upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas guna memunculkan kepemimpinan yang negarawan.

16. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global

Perkembangan lingkungan strategis global ditentukan oleh dua faktor yang berdampak secara langsung pada kedudukan dan fungsi etika politik dalam tata kelola negara. Kedua faktor itu adalah a) dominasi teknologi dan mentalitas teknologis⁵⁴ dan b) peran aktor-aktor non negara. Teknologi dan mentalitas teknologis beroperasi seturut kaidah yang jelas, pasti, sistematis, efektif, efisien dan transparan. Anomali, kekacauan, instabilitas, kesemerawutan, kelabilan dan keborosan merupakan musuh teknologi. Sejalan dengan dominasi teknologi, cara kerja teknologi dan mentalitas teknologis diterjemahkan ke wilayah sosial dan ditransformasikan sebagai perangkat normatif untuk mengatur kehidupan masyarakat.

⁵⁴ Victor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier. 2013. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Work, Live, and Think. New York: Eamon Dolan/ Houghton Mifflin Harcourt, 7-9.

⁵⁵ Bas Arts. 2003. *Non-State Actors in Global Governance. Three Faces of Power*. Bonn: Max Planck Institute for Research on Collective Goods, 5-11.

Perangkat-perangkat teknis dan pola kerja teknologis merupakan buah karya imaginasi, hasil kerja nalar manusia yang menemukan (*invention*) atau menciptakannya (*creation*). Dalam pengertian ini, teknologi merupakan ekspresi dan manifestasi pikiran, kehendak dan tujuan yang ingin diraih oleh sang pembuatnya. Bila dicermati dengan saksama, tokoh-tokoh *non* negara yang sangat berpengaruh di dunia adalah kalangan pengusaha yang bergerak di bidang teknologi. Mereka berhasil menetralisir pengaruh penguasa tradisional (negara) dan memposisikan lembaga pemerintahan sebagai wasit bagi semesta kepentingan masyarakat. Kedudukan dan peran mereka kini dibatasi oleh norma-norma yuridis yang dijaring dan disaring dari aspirasi masyarakat serta mendapat dukungan kuat dari kalangan pemodal, teknokrat dan intelektual. Maka, politik mempunyai aturan main yang harus dipatuhi oleh penguasa; politik berhiaskan etika.

Seiring dominasi teknologi dengan mentalitas teknologis dan peran aktor-aktor *non* negara, maka *trend* utama dalam lingkup global yang berkembang saat ini ialah hubungan etika politik dan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan institusi pemerintahan yang berwibawa dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ada tiga lembaga mondial paling berpengaruh yang mengusung lembaga pemerintahan yang berwibawa dan tata pemerintahan yang bersih sebagai syarat untuk menerima bantuan atau kriteria penilaian terhadap perkembangan politik di suatu negara, yaitu Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). ⁵⁶

Konsep tata kelola pemerintahan yang bersih ala IMF sebagai lembaga keuangan internasional menekankan aspek ekonomi yang mencakup penegakan hukum, efisiensi, akuntabilitas pada sektor publik dan pemberantasan korupsi. Bank Dunia hanya membatasi diri pada ruang ekonomi dan sosial dengan mengajukan 3 kategori besar sebagai parameter penilaian, yang meliputi bentuk regim yang berkuasa, kekuasaan yang berorientasi pada pembangunan serta kemampuan merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya. Adapun PBB memberikan beberapa kriteria yang representatif dan menyeluruh, meliputi konsensus, partisipatoris, taat kepada hukum, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, responsif, kesetaraan dan inklusif.

_

⁵⁶ Diunduh dari http://en.wikipedia.org/wiki/Good_governance#cite_note-Agere1-3, 21 April 2013, pkl.21.10

Pada lingkup akademisi kontemporer, elaborasi mengenai etika politik dan politik yang beretika menghasilkan suatu kategori pemerintahan yang berwibawa dan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai berikut: a) partisipasi, kesetaraan dan inklusivitas, b) peran hukum, c) pembagian kekuasaan, d) media yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, e) legitimasi pemerintahan, f) akuntabilitas, g) transparansi dan h) pembatasan dampak distortif uang dalam praksis politik.⁵⁷ Dewasa ini semua kategori ini praktis menjadi barometer yang permanen bagi banyak lembaga *non* pemerintah baik di tingkat global, regional maupun nasional untuk mengukur indeks demokrasi di suatu negara.

Langkah nyata dari perhatian dan kepedulian masyarakat internasional terhadap penerapan etika politik dalam tata kelola penyelenggaraan negara adalah publikasi tahunan indeks demokrasi⁵⁸ dan indeks persepsi korupsi⁵⁹ negara-negara di dunia. Publikasi tahunan ini merupakan salah satu strategi untuk menekan negara-negara yang kualitas demokrasi dan kualitas korupsinya parah agar segera memperbaiki diri.

17. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional

Secara regional ada dua isu utama yang berpengaruh besar terhadap upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas. Isu pertama mengacu pada Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) negara-negara di Asia Timur dan beberapa negara Asia Tenggara yang secara tradisional menjadi saingan Indonesia menduduki posisi yang jauh lebih baik daripada Indonesia. Indeks persepsi korupsi Singapura adalah 87, Brunei : 55, Malaysia : 49, Thailand : 37, Philipina : 34, dan Timor Leste: 33.60 Isu kedua yang penting sekali dicermati berkenaan dengan bisnis haram yang tumbuh subur di kawasan Asia Timur dan menyertai kemajuan ekonomi di kawasan Asia Pasifik seperti termuat dalam laporan tahunan PBB, hasil kajian Kantor Urusan Narkoba dan Kejahatan PBB (UNODC) yang dipublikasikan di Sydney, Australia tanggal 6 April 2013 lalu.⁶¹

⁵⁷ Dikutip dari ibid. Nayef Al-Rodhan, Nayef R.F. 2009. Sustainable History and the Dignity of Man: A Philosophy of History and Civilizational Triumph, Berlin: LIT Verlag.

⁵⁸ Lih. https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?p_doc_id=1034, indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit. Untuk tahun 2012 Indonesia menduduki posisi 53 dari 167 negara. Diunduh tgl. 21 April 2013, pkl. 21.15.

⁵⁹ Lih. http://cpi.transparency.org/cpi2012/, indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International. Diunduh tgl. 21 April 2013, pkl. 21.20.

⁶⁰ Lihat Lampiran 3.

⁶¹ UNODC- PBB. 2013. Transnastional Organised Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment. Sydney. Dikutip dari Harian Kompas, 21 April 2013, 10.

Posisi CPI sebuah negara yang dirilis *Transparency International* merupakan gambaran tentang tata kelola pemerintahan negara bersangkutan. Posisi yang baik dalam CPI menandakan bahwa organisasi pemerintahan bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku, prinsip-prinsip etika politik yang menjiwai aturan perundang-undangan ditaati dan dipatuhi oleh semua pemangku kepentingan, aparatur negara, pejabat pemerintahan dan masyarakat luas. Dalam lingkup politik, posisi CPI menyatakan bahwa etika politik sudah diterapkan dan dipatuhi secara tertentu oleh semua komponen bangsa.

Contoh paling tepat untuk menggambarkan efektivitas laporan *Transparency International* adalah China yang CPI-nya menduduki posisi 80. Faktor yang sangat memainkan peranan menentukan dalam kebangkitan negeri China bukan terletak pada penerimaan kapitalisme sebagai *mainstream* ekonomi nasional seperti yang disangka para pengamat internasional, meskipun secara ideologis tetap menganut komunisme. Kunci sukses China terletak pada kesungguhan pejabat negara memimpin, menata dan mengelola semua potensi nasional secara jujur, transparan, berjenjang dan akuntabel. Ada dua hal mendasar yang dilakukan pemerintah China.

Hal *pertama* berkenaan dengan kepemimpinan. Dalam sistem kepemimpinan, proses pengkaderan calon pemimpin China diapresiasi dunia internasional, karena siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dalam rentang waktu 10 tahun ke depan sudah dapat diprediksi dari sekarang. Hal *kedua* adalah pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu. Hampir semua orang di dunia teringat dengan pernyataan Perdana Menteri China saat itu, Zhu Rongji: "Saya akan siapkan 100 peti mati: 99 akan saya kirimkan buat mereka yang korupsi dan 1 saya sisakan untuk diri saya".

Terkaitan laporan UNODC tentang pertumbuhan bisnis haram di Asia Timur, ada beberapa hal yang patut disimak. 62 *Pertama*, bidang usaha yang digarap sungguh beragam, dengan posisi delapan besar didominasi oleh barang palsu, produk kayu ilegal, heroin, metamfetamin (sabu), obat-obatan palsu, limbah elektronik, perdagangan hewan ilegal dan penyelundupan imigran. *Kedua*, pendapatan yang diraup dari bisnis ilegal ini berjumlah 90 miliar dolar AS atau 855 triliun rupiah per tahun. *Ketiga*, bisnis haram ini melibatkan kalangan pejabat negara, akuntan dan ahli pajak di negara bersangkutan dalam jaringan bisnisnya. *Keempat*, bisnis ilegal ini disamarkan dengan kegiatan bisnis resmi dan menggunakan jalur distribusi dan logistik formal. *Kelima*,

⁶² Ibid.

laba yang diperoleh digunakan untuk membeli properti, perusahaan-perusahaan dan menyebabkan **perilaku korup**.

Dari laporan UNODC ada dua hal yang relevan dengan tema menggalakkan etika politik dalam Sismennas guna memunculkan kepemimpinan yang berkarakter negarawan, yaitu a) keterlibatan para pejabat negara, akuntan dan ahli pajak dalam bisnis haram dan b) korupsi yang dipicu kerjasama di antara para pebisnis ilegal dengan pejabat pemerintahan.

18. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional

Trend dan isu aktual pada lingkup global dan regional turut mempengaruhi perkembangan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada lingkup nasional terutama dalam upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas guna memunculkan kepemimpinan yang negarawan. Maka, pengaruh perkembangan lingkungan nasional dipaparkan dalam Astagatra berikut ini.⁶³

a. Aspek Geografi

Dari sudut geografi, Indonesia merupakan negara yang penuh berkah dan diciptakan Tuhan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Negeri ini berada di antara dua samudera dan dua benua, menjadi pusat lalulintas barang dan jasa serta persilangan budaya. Selain posisi yang strategis, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lautan dan daratan, pulau-pulau besar dan kecil, tanah yang subur dan laut yang kaya sungguh menjadi keunggulan komparatif yang menggiurkan.

Negeri yang luas dan posisi yang strategis merupakan berkat sekaligus kutukan kalau bangsa kita tidak mampu mengontrol dan mengelolanya. Agar posisi dan kondisi geografis itu berguna dan memberikan nilai tambah, Indonesia memerlukan sosok pemimpin dan pola kepemimpinan yang luar biasa, pemimpin dengan pola kepemimpinan yang NEGARAWAN dan selalu berdasarkan etika politik.

Pemimpin yang dijiwai oleh etika politik akan memanfaatkan kondisi dan posisi geografis Indonesia menjadi keunggulan kompetitif demi pengembangan wilayah, mempercepat pemerataan hasil pembangunan dan pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebaliknya, pemimpin yang miskin etika politik

_

⁶³ Bdk. Lemhannas. 2013. Perkembangan Lingkungan Strategis Tahun 2013 (Manuscripto). Jakarta: Lemhannas.

hanya melihat kondisi geografis itu sebagai persoalan. Kalaupun kondisi geografis itu dimanfaatkan, orientasinya bukan untuk meningkatkan pembangunan dan kemakmuran seluruh bangsa, melainkan demi keuntungan pribadi dan kroni, partai dan golongan.

b. Aspek Demografi

Penduduk Indonesia hingga pertengahan tahun 2013 berjumlah sekitar 247 juta jiwa dan dengan jumlah ini kita menduduki posisi nomor 4 setelah China, India dan USA. Dengan jumlah penduduk yang besar ini, Indonesia merupakan negeri yang mempunyai potensi luar biasa ditinjau dari aspek ekonomi, kepemimpinan nasional dan Tannas. Dari sudut ekonomi-finansial, Indonesia merupakan pasar yang sangat menjanjikan, ditinjau dari kepemimpinan, bangsa kita memiliki segudang kandidat pemimpin nasional dan dari aspek Tannas, terdapat banyak personil cadangan untuk bela negara.

Namun demikian, jumlah penduduk yang besar dan tersebar secara tidak merata menyiratkan pula segudang persoalan yang harus ditangani dan dipecahkan pemimpin nasional. Semakin banyak penduduk dengan sebaran yang tidak merata dan tingkat perbedaan di segala bidang yang sangat kentara, maka semakin sulit menggalakkan etika politik dan menjadikannya sebagai jiwa bangsa. Kesulitan menggalakkan etika politik dalam Sismennas tentu akan memperumit upaya memunculkan kepemimpinan yang negarawan.

c. Aspek Sumber Kekayaan Alam

Ditinjau dari aspek sumber kekayaan alam (SKA) bangsa Indonesia sungguh patut bersyukur kepada Yang Kuasa. Di laut dan di perut bumi terkandung bermacam ragam kekayaan alam dengan kuantitas yang melimpah dan kualitas yang unggul, ditambah lagi dengan tanah yang subur dan musim yang selalu mendukung usaha pertanian, sehingga cukup wajar bila tanah air kita disebut tanah surga, kesayangan para dewa.

Persoalan yang muncul adalah SKA masih berupa barang mentah yang terpendam di perut bumi. Untuk memanfaatkannya, pengelolaan SKA perlu melibatkan banyak pihak: pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat (adat) dan investor. Persoalan yang tidak kalah berat adalah konflik kepentingan yang melibatkan banyak pihak dalam tata kelola SKA dan tata kelola SKA yang sarat

dengan KKN, sehingga hanya dinikmati oleh segelintir orang. Untuk mencegah KKN, jalan terbaik adalah menggalakkan etika politik dalam Sismennas supaya muncul pemimpin yang berhati dan berkemampuan negarawan sehingga sanggup mengelola SKA untuk kesejahteraan seluruh bangsa.

d. Aspek Ideologi

Bangsa Indonesia memiliki ideologi yang disebut PANCASILA. Sebagai ideologi nasional Pancasila merupakan ajaran yang memuat *nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis* dan berfungsi sebagai landasan ideal, lentera peradaban, norma dalam perilaku pribadi, interaksi sosial dan mendarat dalam realitas. Sebagai ideologi Pancasila mesti diaktualisir dan diselaraskan dengan realitas yang berkembang secara dinamis lewat refleksi, elaborasi, interpretasi, reinterpretasi yang kritis dan konstruktif. Aktualisasi dan realisasinya harus selalu mempertimbangkan *dimensi teleologis* (tujuan nasional), *dimensi etis* (sikap hormat kepada Tuhan, sesama dan alam) dan dimensi *integral-integratif* (konteks personal dan sosial yang utuh dan terpadu).

Menyangkut aktualisasi dan realisasi dimensi etis Pancasila, menggalakkan etika politik dalam Sismennas berhadapan dengan beragam ideologi besar dunia, terutama liberalisme-kapitalisme. Kedua ideologi ini menyebarkan materialisme, konsumerisme dan hedonisme yang melahirkan sikap individualis, materialis, hedonis, oportunis dan foya-foya. Akibatnya manusia Indonesia menjadi serakah: serakah harta, serakah kuasa, serakah nama, sehingga KKN merajalela. Dalam konteks realitas sosial yang begitu rakus dan tumpul hati nuraninya, maka upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas sungguh relevan dan pada taraf tertentu merupakan langkah solusional yang wajib dilakukan. Dengan demikian, bangsa kita diharapkan mampu mengembalikan ideologi dan politik kekuasaan yang humanis dan bernurani bagi Indonesia sesuai dengan amanat luhur Pancasila.

e. Aspek Politik

Indonesia patut berbangga diri karena skor dari 5 *item* yang digunakan *Economist Intelligence Unit* (EIC)⁶⁴ sebagai parameter untuk mengukur indeks demokrasi berada di atas angka 5. Skor untuk proses Pemilu dan pluralisme : 6,92,

⁶⁴ Lih. EIU. 2012. https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?, tgl. 21 April 2013, pkl. 21.30.

fungsi pemerintah: 7,50, partisipasi politik: 6,11, budaya politik: 5,63, kebebasan sipil: 7,65. Jadi, klaim pemerintah bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bukan isapan jempol, melainkan berdasarkan data-data yang cukup obyektif dan pengakuan dunia internasional.

Di balik semua keberhasilan itu, catatan tentang budaya politik perlu mendapat perhatian. Budaya politik mengandaikan bahwa semua komponen bangsa, terutama partai-partai politik hendaklah menunjukkan pola sikap dan tata laku yang dijiwai oleh nilai-nilai etis-moral. Catatan EIU dijustifikasi oleh perilaku anarkis yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang kalah dalam perebutan kekuasaan di banyak daerah, kecurangan dalam Pemilu, praktek KKN yang kental mewarnai dunia politik nasional, pembangunan di daerah dan pelayanan publik cenderung menurut pertimbangan basis pendukung partai atau *incumbent*. Semua fakta ini menandakan bahwa etika politik masih belum menjadi *opsi* di dunia perpolitikan nasional.

f. Aspek Ekonomi

Di tengah krisis keuangan global yang melanda negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang, perekonomian nasional tetap mampu bertahan. Bahkan kinerja ekonomi nasional sungguh patut diacungi jempol karena berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6% per tahun. Berdasarkan proyeksi Kamar Dagang Indonesia (Kadin), pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 berkisar pada angka 6,14%. Kondisi yang baik ini merupakan indikasi bahwa tata kelola keuangan negara berada pada jalur yang benar dan menganut kebijakan yang hati-hati. Jadi, ketahanan ekonomi nasional cukup kuat.

Sejumlah persoalan besar menghadang ekonomi Indonesia seperti daya saing yang rendah, infrastruktur yang belum memadai, kebijakan dan regulasi pemerintah yang tidak pasti, kualitas ketrampilan tenaga kerja rendah, ketidaksiapan teknologi, subsidi BBM yang demikian besar dan tidak tepat sasaran, konektivitas yang jauh dari memadai serta tingkat pengangguran yang tinggi. ⁶⁶ Persoalan ekonomi yang bertalian langsung dengan upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas adalah inefisiensi dan prosedur yang berbelit-belit, sehingga membuat praktek KKN begitu subur dalam aktivitas ekonomi bangsa.

66 Ibid.

⁶⁵ Kadin. 11 Desember 2012. Siaran Pers: Waspadai Daya Saing Nasional. Proyeksi Ekonomi 2013.

g. Aspek Sosial Budaya

Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya secara sosial budaya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), bangunan kebudayaan Indonesia terdiri atas 1340 suku bangsa yang tersebar di ribuan pulau. ⁶⁷ Seribuan suku bangsa ini merupakan modal sosial yang sangat memperkaya khazanah kebudayaan nasional Indonesia tidak hanya dari aspek ekonomis sebagai komoditi wisata, tetapi terutama dalam arti keunikan adat istiadat, rasa kemanusiaan, toleransi dan warisan peradaban.

Kekayaan sosial budaya ini sekaligus menjadi bom waktu. Berdasarkan data hasil pantauan Direktorat Kewaspadaan Nasional, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri, pada tahun 2012 terjadi 128 konflik sosial di seluruh Indonesia. ⁶⁸ Sebanyak 91 kasus dipicu oleh persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya, 17 kasus disebabkan oleh konflik bernuansa SARA, 12 peristiwa dipicu sengketa sumber daya alam dan 8 konflik akibat distribusi sumber daya alam. Konflik ini mengisyaratkan bahwa Indonesia memerlukan pemimpin dan kepemimpinan yang berpedoman pada etika politik agar kemanusiaan dijunjung tinggi, kemajemukan budaya dihargai dan kepentingan umum diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan.

h. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas mempunyai keterkaitan langsung dengan pertahanan dan keamanan. Kita adalah bangsa yang besar dalam jumlah penduduk dan kaya raya dari sudut potensi SKA. Namun kebanggaan itu dapat berubah seketika menjadi tangis dan ratapan karena problematika bangsa ini demikian banyak dan sensitif. Indonesia pun kaya dengan masalah dan persoalan. Konflik demi konflik yang terjadi di seluruh tanah air, wabah KKN yang terus menggerogoti birokrasi, ketidakadilan, kemiskinan, kriminalitas, pengangguran merupakan ancaman bagi pertahanan dan keamanan.

Semua masalah nasional tersebut berakar pada keabsenan etika politik dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Aparat negara dan pejabat pemerintahan masih belum bekerja menurut kaidah-kaidah etis-moral yang harus berlaku dalam ruang

⁶⁸ Diunduh dari http://www.indonesiamedia.com/2013/01/22/instruksi-presiden-memperuncing-konflik/, tgl. 21 April 2013, pkl. 21.55.

⁶⁷ Lih. http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html, tgl. 21 April 2013, pkl. 21. 40.

publik. Jika bangsa Indonesia ingin memperkuat pertahanan dan keamanan, solusi terbaik adalah menggalakkan etika politik dalam Sismennas untuk memunculkan calon-calon pemimpin nasional dengan pola kepemimpinan yang negarawan.

19. Peluang dan Kendala

Dari kajian dan pendalaman atas perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, kita dapat mengidentifikasikan beberapa peluang dan kendala terhadap upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas supaya memunculkan kepemimpinan yang negarawan dalam rangka memperkokoh Tannas.

a. Peluang

- 1. Secara global terdapat dukungan dan tekanan yang kuat untuk politik etis dan kepemimpinan yang berwawasan kemanusiaan dan keadilan (negarawan). Dukungan dan tekanan itu berupa laporan tahunan dari lembaga-lembaga internasional tentang indeks persepsi korupsi dan indeks demokrasi dari negaranegara di dunia. Hal ini memberikan optimisme bahwa politik Indonesia akan dijiwai dan dikelola seturut norma-norma etika politik, sehingga terbuka lebar peluang untuk memunculkan kepemimpinan yang negarawan.
- 2. Peluang kedua adalah persaingan klasik di antara negara-negara Asean untuk menjadi yang terbaik di kawasan, pembentukan komunitas Asean yang akan segera berlaku pada tahun 2015 dan pasar bebas Asean. Semua ini akan mempercepat transformasi politik di Indonesia menjadi lebih bersih, transparan dan akuntabel seturut kaidah-kaidah etis-moral; karena bagaimana pun bangsa Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton dan sekedar pasar bagi produk dari negara Asean.
- 3. Peluang ketiga adalah dukungan penuh dari masyarakat luas dan lembagalembaga swadaya masyarakat terhadap politik yang beretika atau politik yang bernurani. Saat ini ada kejengahan di kalangan masyarakat luas terhadap praktek KKN yang demikian masif dalam birokrasi pemerintahan mulai dari strata yang paling tinggi hingga yang paling rendah.
- 4. Peluang keempat adalah dukungan nyata dari pemerintah untuk menciptakan *good government and clean governance* dalam bentuk regulasi maupun aksi konkret, seperti pembentukan UU partai politik, UU pegawai negeri sipil,

lembaga Ombudsman dan pemberantasan korupsi yang ditindaklanjuti dengan reformasi birokrasi dan pembentukan KPK.

b. Kendala

- Secara global kendala utama menggalakkan etika politik dalam Sismennas ialah inkonsistensi sikap dan kebijakan dari negara-negara besar dalam mendukung perubahan yang benar di suatu negara. Di balik kebijakan dan sikap mereka, "selalu ada udang di balik batu". Sejauh kepentingan mereka terakomodir, negara-negara besar ini tenang-tenang saja, meskipun negara itu menganut sistem politik yang otoriter, diskriminatif dan melanggar HAM. Namun begitu kepentingannya terusik, mereka dengan segera mengembuskan beragam isu negatif tentang negara tertentu.
- 2 Dalam lingkup regional kendalanya adalah persaingan tidak sehat dan sikap saling curiga di antara negara-negara sekawasan. Persaingan tidak sehat dan kecurigaan itu terutama berkaitan dengan upaya merebut investor, sehingga memunculkan sikap acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di suatu negara.
- Dalam lingkup nasional, kendala pertama adalah partai-partai politik yang kurang mendukung secara nyata upaya menciptakan politik yang beretika. Justru partai-partai politik merupakan dalang inefisiensi, lembaga yang sumber keuangannya tidak jelas, sarat KKN, diskriminatif, kurang memperhatikan rekruitmen dan kaderisasi yang berjenjang. Yang terjadi adalah loncat partai dan sistem kaderisasi karbitan, mengandalkan citra, dana dan SARA belaka.
- 4) Kendala keempat ialah mentalitas dari sebagian besar birokrat yang masih menganut *mindset* lama sebagai kelas penguasa tak tersentuh hukum, wawasan yang ego sektoral, wabah KKN yang menggerogoti semua lini pemerintahan dan penyingkiran pendidikan budi pekerti dari kurikulum pendidikan nasional, sehingga ada kesan bahwa pemerintah terfragmentasi antara kelompok yang *pro* dan yang *kontra* terhadap pemberantasan korupsi.

BAB V

KONDISI ETIKA POLITIK YANG DIHARAPKAN DALAM SISMENNAS

20. Umum

Upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas guna memunculkan kepemimpinan yang negarawan selalu berada dalam konteks ruang dan waktu. Berbeda dari gagasan Yunani klasik dan Romawi yang memahami waktu secara linear, kaum bijak bestari dan kaum beriman dari tiga agama monoteis (Ibrani, Kristiani, Islam) selalu memandang waktu dari saat ini dan di sini. Kemarin adalah waktu yang berlalu diukur dari sekarang ini dan besok merupakan saat yang sedang menjelang dipandang dari saat ini. Karena itu, dalam konsep waktu yang berpusat pada kekinian selalu terbentang harapan untuk berbenah diri guna menyongsong masa depan yang lebih baik. Dalam segala hal, terutama dalam malam gelap kehidupan manusia, tiga penganut agama monoteis ini sepakat bahwa harapan adalah kunci untuk bertahan dan mengubah keadaan. *Spes ultima dea – harapan merupakan dewa (sandaran) terakhir*.

Bertolak dari harapan akan masa depan yang dapat diwujudkan, pokok kajian dalam Bab ini berupaya memberikan deskripsi dan proyeksi tentang kondisi etika politik yang diidam-idamkan dalam Sismennas yang merupakan prasyarat utama untuk memunculkan kepemimpinan yang negarawan di tanah air. Upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas akan memberikan pengaruh positif dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kaderisasi kepemimpinan nasional yang berkarakter negarawan. Tatkala etika politik sudah menjadi jiwa bangsa, tata kehidupan berbangsa dan bernegara selalu dilandasi oleh kaidah-kaidah etis, maka secara langsung ketahanan nasional Indonesia akan sekokoh karang di samudera.

Harapan bahwa upaya menggalakkan etika politik memberikan kontribusi positif bagi kemunculan kepemimpinan yang negarawan bukanlah sekedar impian utopis untuk membesarkan hati. Harapan ini tentu mempunyai landasan teoretis berdasarkan beragam tanda, gejala dan isyarat yang tertera dan terbaca dari fenomena yang sedang berlangsung dalam kehidupan sosial. Maka, dalam era praksis politik plus nurani, negara berhiaskan keadilan dan kemunculan pemimpin dengan kepemimpinan yang negarawan merupakan harapan yang dapat diwujudkan oleh bangsa Indonesia.

21. Kondisi yang Diharapkan

Perbedaan seorang yang pesimis dari pribadi yang optimis terletak pada cara dan sarana untuk melihat sebuah permasalahan dan rangkaian persoalan. Seorang pesimistis memandang bermacam persoalan dengan kacamata hitam, sehingga semua tampak gelap gulita, sedangkan seorang optimistis menatap persoalan dengan kacamata putih, sehingga realitas yang ada tampak berwarna-warni. Analogi yang sama dapat digunakan untuk mendeskripsi dan memproyeksi kondisi etika politik yang diharapkan dalam Sismennas. Di tengah beragam persoalan yang menggerogoti semua bidang kehidupan, bangsa Indonesia tetap memandangnya dalam kacamata seorang beriman yang dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa solusi-solusi akan ditemukan. Bangsa ini berpegang pada prinsip bahwa setiap persoalan mempunyai jawabannya.

a. Memasukkan Etika Politik dalam Kurikulum SMU dan PT

Harapan dan keyakinan untuk menemukan solusi dari bermacam persoalan bangsa yang timbul dari keabsenan peran etika politik dalam tata kehidupan masyarakat, tata politik nasional, tata administrasi negara dan tata laksana pemerintahan bertumpu pada kecerdasan dan keberanian kita memasukkan etika politik dalam kurikulum SMU dan PT. Kecerdasan dan keberanian ini sangat diperlukan karena etika politik merupakan fondasi dan orientasi, prinsip dan penunjuk arah bagi semua warga dalam menghidupi hak-hak dan kewajibannya sebagai individu di ruang publik dan anggota masyarakat. Jadi, etika politik merupakan kunci untuk menata struktur sosial, kultur, proses relasi dan interaksi di antara sesama warga dalam mencapai tujuan bersama sebagai sebuah bangsa.

Secara sosio-kultural, pendidikan etis-moral mengandaikan keterlibatan tripartit, yaitu keluarga, sekolah dan lingkungan sosial. Pada fase awal, pembentukan pemahaman konseptual dan pembinaan kesadaran individual tentang baik dan buruk, benar dan salah, adil dan durjana selalu berawal dari dalam keluarga sebagai sel inti masyarakat. Internalisasi nilai dilangsungkan entah melalui tutur kata (*verbal*) maupun keteladanan hidup dengan prinsip pujian-ganjaran dan hukuman.

Namun, ruang cakupan pendidikan etis-moral dalam lingkup keluarga dibatasi oleh perkembangan individu yang secara inheren terarah ke luar untuk menemukan tujuan hidupnya. Maka pada fase tertentu, pembentukan kesadaran individu tentang nilainilai etis moral dipengaruhi oleh institusi sekolah sebagai pusat pendidikan formal untuk mengasah kecerdasan, meningkatkan ketrampilan dan memperluas wawasan dan oleh aneka kelompok atau institusi sosial dalam masyarakat di mana individu menjalin relasi

dan berinteraksi dengan sesama. Jadi, pembentukan kesadaran individu ditentukan oleh faktor intelektual, edukasional dan sosio-kultural.

Pembentukan wawasan pengetahuan dan kesadaran individu tentang nilai-nilai etis-moral di lingkungan sekolah hendaklah didasarkan pada tingkat perkembangan intelektual subyek bina. Untuk tingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pola pengajaran lebih menitikberatkan pada internalisasi nilai-nilai moral dasar (baik-buruk, benar-salah, adil-tidak adil, sikap hormat, berani bertanggung jawab) melalui contoh dan keteladanan, mengingat daya tangkap subyek bina masih sangat konkret dan faktual serta berada dalam proses transisi untuk menemukan identitas melalui proyeksi diri dalam tokoh-tokoh ideal. Adapun sasaran yang hendak dicapai pada fase ini adalah pembentukan sikap dan perilaku yang berani berkata jujur, mengakui kekeliruan dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

Pada tingkat SMU hingga PT pola pengajaran berfokus pada pemantapan karakter, penajaman kesadaran etis-moral dan penumbuhkembangan kemampuan berpikir subyek bina supaya sungguh memahami realitas sosial yang kompleks dan sarat kepentingan. Pengembangan kesadaran kritis dimaksudkan untuk menemukan landasan argumentatif tatkala berhadapan dengan praksis hidup yang berbenturan dengan aneka prinsip moral dasar dan mengelaborasi varian turunan sistem etis-moral dasar dalam ruang sosial.

Melalui elaborasi yang serius individu akan mampu memberikan justifikasi dan evaluasi terhadap tata laku yang tumbuh dan berkembang dalam relasi dan interaksi sosial menurut prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah etis moral yang telah dipelajari dan dielaborasi. Ringkasnya, pada taraf SMU dan PT subyek bina membuka wawasan pengetahuan tentang hubungan antara hidup konkret baik pada lingkup individual maupun sosial, norma-norma etis moral dan yuridis yang mengatur hak dan kewajiban setiap pribadi.

Berdasar pemahaman tentang perkembangan mental, intelektual dan psiko-spiritual individu, maka menggalakkan etika politik dalam Sismennas dilaksanakan dengan cara memasukkannya dalam kurikulum pendidikan menengah atas dan tinggi. Ada *tiga* pertimbangan besar yang melandasi penulis memilih penggalakkan etika politik sejak SMU hingga PT.

Pertimbangan *pertama* adalah karakter etika secara umum dan etika politik sebagai sebuah bidang ilmu yang memahami dan menilai perilaku individu seturut kriteria baik dan buruk dapat saja menjebak dan menghasilkan kesimpulan banal bahwa

etika merupakan diskursus ilmiah yang gampang dan gamblang. Dalam kenyataan, diskursus etika, termasuk etika politik berada dalam ranah filsafati yang abstrak dan konseptual, sehingga upaya untuk membangun landasan argumentatif yang ilmiah dan obyektif mengandaikan kemampuan berpikir yang sudah terstruktur, terlatih, logis, kritis dan kategoris. Persyaratan ini hanya terpenuhi pada jenjang pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi.

Pertimbangan *kedua* mengacu pada fakta bahwa tidak semua peserta didik tingkat SMU melanjutkan ke PT. Menurut data dari Kemendikbud, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di tingkat PT hanya berkisar 23%, sementara 77% berhenti setelah SMU. Faktor-faktor yang menyebabkan 77% tamatan SMU tidak melanjutkan ke PT adalah kesulitan ekonomi, ingin cepat bekerja dan menikah. Realitas ini menegaskan bahwa para tamatan SMU berkontak langsung dengan dinamika kehidupan manusia yang sarat dengan konflik kepentingan, pola pemikiran yang saling bertolak belakang, sikap dan perilaku yang menghalalkan segala cara. Mereka yang terjun langsung di tengah masyarakat dengan segera merasakan tarik menarik pemikiran, sikap hidup dan tingkah laku yang bersifat dikotomis antara yang baik dan yang buruk, yang jujur dan yang culas, yang adil dan yang durjana, penolong dan penipu, kawan dan lawan serta kategori rasialis dan diskriminatif bernuansa SARA.

Petimbangan *ketiga* adalah persyaratan administratif minimal bagi calon pemimpin nasional, yaitu setingkat SMU dan sederajat, seperti diatur dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pasal 5 poin p dan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD pasal 12 poin e. Yang hendak digariskan dalam peraturan perundang-undangan ini bukanlah soal kemampuan intelektual maupun kualitas etis-moral bahwa tamatan SMU kurang pintar, kurang bermoral atau kurang bertanggung jawab daripada lulusan PT. Persyaratan administratif minimal ini hanya menegaskan bahwa setiap (calon) pemimpin nasional wajib mampu membaca, menulis dan mengerti pokok-pokok pembicaraan dan pemikiran.

Secara yuridis formal dan faktual, kesempatan menjadi pemimpin tingkat nasional terbuka lebar bagi semua warga bangsa walau hanya tamatan SMU dan peluang tersebut kini sudah menjadi kenyataan. Peluang dan kenyataan ini terjadi karena wajah perpolitikan nasional mengutamakan aspek pencitraan, kekerabatan, kesukuan, kedaerahan, kepartaian, keseagamaan dan kemampuan finansial daripada kualitas intelektual dan integritas etis-moral. Carut-marut tatanan kehidupan sosial-politik disebabkan pula oleh rendahnya kualitas pemahaman anak bangsa terhadap sejarah

pembentukan bangsa dan kejernihan nurani mereka yang saling berebut kekuasaan, sehingga orientasi politik berpusat pada kepentingan yang sektoral, pragmatis dan fragmentaris.

Dengan memasukkan etika politik sejak pendidikan tingkat menengah atas, maka bangsa Indonesia dapat memutus mata rantai kemunculan para calon pemimpin tingkat nasional yang dilakukan secara instan dan semua perilaku politik yang egoistis, pragmatis, nepotis, fragmentaris dan politik biaya tinggi. Dalam lingkup tata kelola negara, pendidikan etika politik pada tingkat SMU akan turut mengurangi secara signifikan banalitas KKN yang menggerogoti semua aspek administrasi-birokrasi pemerintahan dan meminimalisir beragam kebijakan nasional-lokal yang lebih mementingkan ego sektoral daripada sinergitas di antara instansi pemerintahan, lebih mengutamakan aspek SARA daripada profesionalitas, kapabilitas, integritas individu, prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Begitu mempelajari etika politik sejak awal, para calon pemimpin nasional sudah dibekali dengan konsepsi dan visi yang jelas tentang prinsip-prinsip moral dasar dan kaidah-kaidah etis-moral yang mesti menganimasi tata kehidupan bermasyarakat, tata perpolitikan nasional dan tata kelola negara. Bagi sebagian kecil yang meneruskan ke PT, pengajaran etika politik menjadi pegangan dan rujukan dalam menggali ilmu dan belajar berorganisasi, sehingga cakrawala wawasan dan pengambilan kebijakan organisatoris bersifat terbuka, toleran, menghargai pluralisme bangsa dan mengutamakan kepentingan bersama. Harapan bahwa kehidupan bermasyarakat, dunia politik dan pemerintahan Indonesia akan dijalankan oleh pemimpin dan kepemimpinan yang negarawan bukan sekedar impian dan khayalan, melainkan realitas yang tergapaikan.

b. Reorientasi Politik: Politik Plus Nurani

Tatkala upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas berjalan lancar dan pengajaran etika politik dilaksanakan sejak SMU hingga PT, maka yang terjadi dalam dunia perpolitikan nasional adalah reorientasi politik. Kehidupan politik yang ditandai oleh keabsenan etika dan menimbulkan disorientasi politik dengan praksis politik minus nurani kini ditata ulang dengan praksis politik plus nurani. Eforia kebebasan yang cenderung ke arah pemberhalaan individu dan segenap kepentingannya sebagai efek dari dominasi sistem liberalis dalam perpolitikan nasional kini dilengkapi dengan aneka macam rambu dan kaidah etis-moral.

Perangkat normativ-yuridis, nilai-nilai luhur Pancasila, norma etis dan doktrin keagamaan dikembalikan sebagai pedoman dan acuan, kekayaan budaya dan warisan bijak bestari yang menjadi lentera untuk menerangi gerak pembangunan bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Dengan demikian, upaya untuk menggalakkan etika politik dalam Sismennas guna memunculkan kepemimpinan nasional sedang berada di jalur yang benar dan mendapat sokongan yuridis formal yang kokoh.

Praksis politik yang bersendikan prinsip-prinsip etika politik akan sanggup mengurangi dampak dan pengaruh paham liberal dan egosentrisme, sehingga memunculkan stabilitas politik dan kebijakan politik nasional yang berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat. Kebijakan politik yang *pro* rakyat memberi peluang dan ruang bagi kemajemukan dalam kesatuan, kemanusiaan yang berazaskan keadilan dan keadaban, demokrasi yang bertata aturan dan bersendikan moralitas politik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan tetap menjunjung tinggi sistem meritokrasi, kontribusi dan yurisdiksi masing-masing pemangku kekuasaan. Dengan kata lain, reorientasi politik nasional yang bernafaskan etika politik bukan untuk menghapus kewenangan, fungsi dan peran partai-partai politik, melainkan justru mempertegas dan memperjelasnya supaya terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan praksis politik yang manipulatif-eksploitatif.

Dengan merekonstruksi dunia perpolitikan nasional dan prinsip yang menjiwainya atau mengembalikan praksis politik yang beretika dalam kehidupan sosial dan tata kelola negara, bangsa Indonesia telah melewati jalan terjal dan rimba raya yang gelap gulita. Azas yang kuat bertahan hidup, yang lemah menuju ke alam maut telah menjadi usang dan cerita masa lalu. Penerapan hukum rimba dibatalkan dari praksis politik nasional dan reorientasi politik mengubah makna kompetisi sekedar memangku kekuasaan yang melestarikan *status quo* dan pengutamaan kepentingan kelompok ke arah pembangunan nasional untuk mewujudkan kepentingan umum.

Pada fase politik etis dan bernurani demikian, amanat luhur Pancasila agar politik memperjuangkan kebaikan bersama, keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warga perlahan-lahan mulai mendominasi pikiran, kesadaran dan tindakan manusia Indonesia, terutama kalangan pejabat negara dan pemerintahan. Internalisasi dan aplikasi etika politik di ruang publik melahirkan sikap yang menghargai pribadi manusia, mengedepankan asas kepantasan dan sikap hormat bahkan terhadap lawan politik sekalipun. Penerapan etika politik dalam semesta diskursus politik membentuk

budaya politik yang santun dan komunikasi politik yang saling menghargai satu sama lain, walaupun perbedaan keyakinan dan kompetisi politik tetap berlangsung. Jadi, dalam terang etika politik kepentingan partai dan golongan disubordinasikan ke bawah kepentingan seluruh bangsa.

Reorientasi politik yang menjunjung tinggi praksis politik plus nurani pasti menafikan hegemoni kepentingan yang bersifat ego sektoral dan bernuansa SARA, menetralisir perilaku korup yang melanda hampir semua aparatur negara dan pejabat pemerintahan di segala jenjang birokrasi. Konsekwensi dari penataan ulang orientasi politik dan afirmasi terhadap peran kunci etika politik dalam praksis perpolitikan nasional melahirkan budaya baru dan kesadaran baru yang tahu malu, dihinggapi rasa bersalah dan memunculkan sikap ksatria dari para pelaku yang melakukan kebejatan dan kejahatan entah diketahui maupun tidak diketahui publik. KKN diposisikan kembali sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang menistakan harkat dan martabat pelaku serta sesama, sehingga tiada lagi persepsi yang memandang KKN sebagai hiasan birokrasi dan bunga-bunga administrasi.

Lebih konkret lagi reorientasi politik dengan praksis politik plus etika pasti akan membalikkan kelemahan menjadi kekuatan nasional, tantangan menjadi peluang yang sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional dan memperteguh ketahanan nasional. Kandungan etis dalam praksis politik memampukan bangsa kita mencegah perilaku partai politik dan politisi yang kerap memperlakukan masyarakat sebagai obyek manipulasi dan instrumen politik dominasi.

Ketika politik kembali ke esensinya sebagai kecakapan untuk mengatur, mengelola dan memberdayakan masyarakat sebagai entitas sosial yang bermartabat dan elemen penting dalam menyeimbangkan tarik-menarik kepentingan di antara elit politik, maka setiap orang dan seluruh warga menjadi subyek politik yang justru menentukan praksis politik dan nasib politisi nasional. Karena itu harus selalu dibuka peluang bagi rakyat untuk mengakses informasi terutama informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara.

Dalam ruang lingkup organisasi, reorientasi politik dengan prinsip etika politik akan memberi dampak positif bagi tata kelola pengorganisasian masyarakat terutama dalam rekruitmen keanggotaan, pengkaderan dan pengelolaan segenap potensi warga masyarakat. Dampak positif demikian tampak dalam pola rekruitmen keanggotaan, sistem pengkaderan dan pengelolaan seluruh potensi bangsa yang dijalankan secara

terukur, terpadu, terarah dan obyektif seturut kaidah-kaidah normatif, sistem politik yang memberi ruang pada demokrasi dan keadilan sosial.

Politik plus etika membuat tata kelola organisasi massa dan organisasi politik dilakukan secara transparan, jujur, adil dan bertanggung jawab, lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas, profesionalitas daripada familiaritas, akuntabilitas daripada spontanitas serta pertimbangan-pertimbangan yang bernuansa SARA dan sempit. Penataan ulang demikian memberikan kontribusi signifikan pada perbaikan sarana-prasarana, pelatihan, permodalan, akses distribusi dan pemasaran, dukungan yang lebih nyata, memadai, efisien dan efektif terhadap proses pengembangan unit-unit produksi sosial dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam lingkup tata politik nasional, reorientasi politik yang dianimasi etika politik memperkuat transparansi, demokratisasi yang sehat dalam dunia politik, menghidupkan dialog yang terbuka, jujur, setara dan konstruktif. Dialog yang berwawasan kemanusiaan dan berkeadilan mempermudah proses pertukaran gagasan, pengalaman dan pembelajaran di kalangan anggota masyarakat dan di antara organisasi-organisasi sosial, penyaluran aspirasi dan komunikasi dua arah antara *outer setting* dan *inner setting*, masyarakat sipil serta partai politik dengan pihak pemerintah dan aparatur negara lainnya. Komunikasi yang positif dan konstruktif di antara semua komponen bangsa ini memperkecil peluang bagi pelanggaran terhadap hak-hak politik rakyat dan sekaligus meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam Pemilu.

Selain mempermudah penyampaian aspirasi, mengakses informasi, membuka jalur komunikasi dua arah yang konstruktif dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat luas dalam tata kehidupan politik, reorientasi politik dengan menggalakkan dan menerapkan etika politik secara otomatis mempersempit peluang bagi hegemoni partai-partai politik dalam kancah perpolitikan nasional. Peluang hegemoni kepartaian diminimalisir melalui rotasi kepemimpinan nasional, pendistribusian kekuasaan dan pembatasan kewenangan secara adil dan merata di antara semua lembaga negara untuk mencegah kesewenangan dan kekacauan dalam kepemimpinan.

Pada tataran tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara, penggalakkan etika politik dalam Sismennas pasti turut memberantas dan mencegah wabah korupsi dan ketidaktransparan yang terjadi di masyarakat maupun wadah organisasionalnya. Ketika korupsi dan ketidaktransparan berhasil diberantas dan dicegah, maka kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap pemerintah dan program pembangunan nasional akan pulih kembali. Kepercayaan dan kepedulian rakyat

terhadap pemerintah merupakan modal sosial yang sangat berguna dan kunci untuk memimpin, mengelola dan memberdayakan semua potensi bangsa serta memunculkan masyarakat madani.

c. Surplus Keteladanan

Keberhasilan menggalakkan etika politik dalam Sismennas melalui jalur edukasi/ pendidikan dan reorientasi politik yang berlandaskan etika politik memberikan peluang yang besar bagi upaya untuk memunculkan kepemimpinan yang negarawan dalam dunia politik nasional. Internalisasi prinsip-prinsip etika politik dengan sendirinya mengurangi perilaku politik yang saling jegal dan saling jagal, menghindari perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara, mencegah dan membatasi keinginan untuk terus mengeruk keuntungan secara tidak *fair*. Sebagai rambu dan lampu, etika politik membuat praksis politik nasional menjadi manusiawi, mengutamakan semua kepentingan masyarakat dan menghalangi pelestarian kemapanan oleh sekelompok orang atau satu kalangan.

Gambaran dunia politik yang dianalogikan secara sarkastis dengan panggung teater di mana semua pemain tunduk pada keinginan sutradara belaka sudah tidak berlaku tatkala etika politik meraja di hati sanubari. Gambaran panggung politik yang dipedomani prinsip-prinsip etis-moral adalah sang sutradara bekerja, memadu dan meramu keinginan semua pemain dalam satu narasi dan aksi yang integral, komprehensif dan representatif.

Semangat yang menganimasi panggung politik bukan lagi *aku* dan *kamu* dalam logika tesis, antitesis dan hubungan hirarkis-antagonis penguasa dan hamba. Panggung politik nasional diiringi oleh semangat ke-kita-an menurut logika semua untuk semua, semua untuk satu dan satu untuk semua dengan langgam relasi dan pola interaksi yang mementingkan kesetaraan antara rakyat dan pejabat, pemimpin dan yang dipimpin.

Dalam pola wicara yang idealis, bangsa Indonesia memposisikan pemimpin dan segenap aparatur negara sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, sementara rakyat adalah pemangku kekuasaan tertinggi yang suaranya disejajarkan dengan suara Tuhan. Karena itu, wawasan, sikap dan tingkah laku semua aparat negara, pejabat pemerintah dan terutama pemimpin nasional harus selalu mengutamakan kelembutan hati, kesiapsediaan melayani, kerendahan hati, kepekaan, kepedulian, keterbukaan dan tanggung jawab.

Para pemimpin menjauhkan diri dari kekerasan, menentang moralitas yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, mengutuk sikap dan perilaku yang sarat dengan kecurangan, tipuan, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Para pemimpin bangsa mencegah ketidakadilan, memberangus perampokan terhadap kepemilikan pribadi atau kelompok dan memelopori kehidupan yang nyaman, aman, tentram, damai dan sejahtera bagi semua. Dengan demikian, pengajaran etika politik sejak SMU hingga PT dan penerapan etika politik dalam tata hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara otomatis mencegah degradasi sosial, konflik antar kelompok, diskriminasi dan praduga yang rasialis.

Reorientasi politik nasional yang berpedoman pada kaidah-kaidah etis menghindarkan para pemimpin dari kepemimpinan yang abai terhadap kebenaran, menutup telinga terhadap jeritan ketakutan dan ketidakadilan, menutup mata terhadap kekerasan dan kemelaratan. Penerapan etika politik mencegah sikap lari dari tanggung jawab yang melemparkan kesalahan kepada orang/pihak lain, menciptakan musuh bersama untuk mengalihkan perhatian atau sengaja menciptakan tumbal politik-kekuasaan.

Berkat etika politik para pemimpin nasional memimpin, mengatur, mengelola dan memberdayakan semua potensi bangsa dengan berlandaskan sikap hormat terhadap sesama, menghargai keragaman budaya, perbedaan cakrawala, meminimalisir jurang sosial serta pola relasi dan interaksi yang manipulatif, eksploitatif dan dominatif. Penggalakkan etika politik dalam ruang publik niscaya menghasilkan kepemimpinan nasional surplus keteladanan, pemimpin yang dapat diyakini dan diamini, ditiru dan digugu, pedoman, acuan dan teladan bagi semua kalangan.

Idealisme politik berwajah etis dan tatanan sosial berpedoman ajaran suci nan ilahi berhasil mengatasi godaan kekayaan, kekuasaan dan kesenangan. Bahu membahu kaum awam dan agamawan terus menyuarakan keadilan dan kebenaran dengan memberikan contoh dan teladan, supaya etika politik terus berakar kuat dalam kesadaran anak bangsa dan menerangi semua keputusan politik nasional. Aksi turun gunung para punggawa religius dan cerdik pandai guna memasyarakatkan etika politik dalam pola pikir, sikap dan tindakan merupakan kombinasi jenius dari asketisme Platonis dan realisme Aristotelian.

Kaum agamawan dan para bijak bestari yang terjun ke dunia politik senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip etis-moral yang diyakini, sehingga mampu mengelola kekuasaan besar yang mereka genggam, tetap bertahan terhadap godaan kekayaan,

aneka kemudahan, kenyamanan dan *service* yang disodorkan. Kehadiran dan tata laku mereka yang sarat dengan pertimbangan dan kearifan merupakan kritik terhadap perilaku politisi lama yang sudah berkubang dalam kebejatan dan sekaligus undangan untuk berbalik arah ke jalan Tuhan. Era para nabi dan imam yang berkeliaran mencari kenikmatan dan massa kebanyakan yang berjalan tanpa tujuan telah berlalu karena nurani warga Indonesia telah pulih kembali dan berfungsi lagi sebagai kompas yang menuntun mereka mengarungi dinamika kehidupan yang sarat kepentingan.

Perbedaan antara kalangan bijak bestari yang masih memiliki nurani dengan perbuatan terpuji dan pejabat pemerintah yang berada di lingkaran kekuasaan sudah ditiadakan. Surplus keteladanan terus memperlihatkan kemampuannya untuk mengubah situasi dan kondisi bangsa yang "buruk rupa" dan "sakit-sakitan" menjadi bertambah jelita dan gagah perkasa. Dengan politik etis tiada lagi cerita bahwa kejahatan menang melawan kebajikan, KKN unggul atas sikap dan tingkah laku para pemimpin yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, iman dan takwa, kesetiakawanan dan kebijaksanaan. Jadi, upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas untuk memperkuat reorientasi politik nasional dan praksis politik plus nurani dalam rangka memunculkan kepemimpinan yang negarawan sedang memperlihatkan hasil yang menggembirakan.

d. Hukum Berpadu dengan Etika

Hukum mengajarkan apa yang harus/wajib dilakukan, sedangkan etika menegaskan apa yang boleh dilakukan. Sekilas pandang ada kesan bahwa antara harus dilakukan dan boleh dilakukan tidak terdapat hubungan sama sekali atau berada dalam ketegangan yang mustahil didamaikan. Kesan ini hanya superfisial, karena antara *apa yang wajib* dan *apa yang boleh* berakar dan berdasar pada individu yang sama, yaitu manusia sebagai subyek hukum dan subyek etika. Jadi, secara substansial hukum dan etika bertitik tolak dari konsep manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang secara hakiki terarah pada finalitas tertentu.

Etika sebagai sebuah diskursus keilmuan bergerak dalam dua wilayah yang saling terkait, yaitu menyelami seluk beluk manusia dalam dan melalui tindakantindakannya dan mengarahkan manusia untuk menjadi insan yang baik secara etismoral. Wilayah garapan etika adalah perbuatan-perbuatan manusia sejauh dinilai baik atau buruk pada lingkup pribadi maupun lingkup sosial atau etika individual dan etika sosial. Jadi, secara esensial etika individual dan etika sosial terarah pada bagaimana

individu mencapai hidup yang berkebajikan entah sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Titik temu antara etika dan hukum berada pada dimensi sosial manusia, yaitu manusia sebagai warga masyarakat yang secara khusus digagas oleh etika sosial. Etika sosial mendasarkan diri bukan pada nilai-nilai keutamaan personal seperti kebaikan, keberanian, kesederhanaan, melainkan pada hak-hak yang melekat pada individu sebagai warga negara. Secara hurufiah hak merujuk pada kemampuan (*fakultas*) seseorang untuk melakukan sesuatu hal secara bebas dan bertanggung jawab dan dalam kemampuan tersebut secara implisit tersirat kekuasaan dan kepemilikan atas apa yang telah dilakukan. Karena itu, pengertian tentang hak secara otomatis bersinggungan dengan keadilan atau sikap tidak memihak, tidak merugikan, berada di tengah-tengah.

Ikatan kesatuan dalam kehidupan bersama yang dapat menjamin keterjaminan hak-hak individu adalah hukum. Hukum adalah sesuatu yang secara struktural adil, sehingga secara substansial hukum adalah abdi keadilan dan keadilan merupakan tolok ukur hukum. Dalam konteks ini hukum membuat hidup bersama dan kepentingan umum, relasi dan interaksi antar manusia menjadi mungkin dihidupi secara konkret. Namun demikian, hukum bekerja dalam kerangka menghormati dan mengabdi manusia dan bukan melawan manusia.

Kalau pun hukum memiliki daya paksa terhadap semua orang yang berada di bawahnya pemaksaan demikian tetap berada dalam koridor mengatur dan menata individu supaya dapat melangkah bersama sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di dalam komunitas, tujuan hidup bersama dan kepentingan umum yang hendak diwujudkan. Dalam konteks ini, hukum *an sich* mengungkapkan kebenaran tentang manusia sebagai makhluk personal dan sosial yang harus mewujudkan diri dalam ruang sosial, sehingga ketaatan pada hukum bukanlah karena hukum *in se* melainkan karena nilai-nilai kebaikan yang berada di balik hukum.

Secara konkret, perpaduan kembali hukum dengan etika dalam sistem hukum nasional membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keputusan-keputusan pengadilan yang melukai rasa keadilan perlahanlahan dikurangi, sehingga masyarakat kembali menaruh kepercayaan terhadap dunia peradilan nasional. Praksis hukum yang "tajam ke bawah", tetapi "tumpul ke atas" sudah berlalu; penjatuhan hukuman didasarkan pada berat-ringan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam lingkup politik pertalian hukum dengan etika menghasilkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak politisi yang lebih beradab, berkeadilan dan selalu mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, partai dan golongan. Produk-produk legislasi bersifat integral, integratif dan komprehensif, sehingga tiada lagi peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang bersifat sektoral, tumpang tindih dan mendua, apalagi sikap yang menjadikan pembuatan aturan perundang-undangan sebagai proyek atau komoditi di gedung parlemen.

Dengan politik yang beretika, politisi menjalankan fungsi penganggaran dengan baik, jujur dan adil. Kongkalikong, mafia anggaran dan sejenisnya dipahami sebagai musuh keadilan dan tindak kejahatan terhadap rakyat karena merampok uang negara, mengkhianati kepercayaan masyarakat, menista agama yang diyakini, menghadang pelaksanaan pembangunan. Politisi bertugas dengan dedikasi tinggi, berintegritas dan bertanggung jawab, memahami tata aturan sebagai rambu-rambu yang memberikan landasan struktural untuk mempermudah dan memperlancar kerjasama lintas instansi dan antarlembaga dalam proses pembangunan bangsa serta sekaligus mencegah benturan kepentingan di antara pemangku kekuasaan dan praksis politik kekuasaan yang menindas rakyat.

Dalam lingkup tata kelola pemerintahan negara perpaduan etika dengan politik akan mengubah pola kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sistem administrasi dibenahi dengan serius, sistematis, akurat dan kontinyu, sehingga lebih akurat, lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan dan lebih akuntabel. Pola kerja birokrasi yang mengandalkan ketepatan, kecepatan, kemudahan, transparansi dan akuntabilitas otomatis meminimalisir kekeliruan, penyimpangan, pemalsuan, manipulasi, eksploitasi, kebijakan pembangunan yang sektoral dan bermotif SARA, sarat KKN serta berbagai macam aktivitas yang buruk secara etis-moral.

Dalam perspektif tata kelola negara yang menganut asas pemerintah yang baik dan pemerintahan yang bersih, tiada seorang Indonesia pun yang tersisih dari aktivitas hidup berbangsa dan bernegara, terpinggirkan dari proses dan penikmatan hasil pembangunan. Malah, negara hadir sebagai organisme yang melindungi, mengayomi dan menyediakan dana, sarana dan prasarana yang memberikan kesempatan kepada setiap warga dan kelompok untuk memenuhi semua kebutuhan dalam rangka mewujudkan diri sebagai pribadi yang utuh dan kelompok yang menjaga semua anggotanya.

22. Kontribusi menggalakkan etika politik dalam Sismennas terhadap upaya memunculkan kepemimpinan yang negarawan dan kontribusi kepemimpinan yang negarawan terhadap Tannas

Aktivitas menggalakkan etika politik dalam Sismennas akan memberikan dampak positif dan perubahan signifikan terhadap langkah-langkah konkret memunculkan pola kepemimpinan yang negarawan. Dengan berpedoman pada etika politik, tata kelola negara bebas dari KKN, hubungan antarkelompok dalam masyarakat berjalan harmonis, proses politik berlangsung jujur, bersih dan adil, proses rekruitmen, seleksi dan kaderisasi calon-calon pemimpin nasional dilaksanakan menurut parameter yang obyektif, mengutamakan kemampuan intelektual, keahlian organisatoris, kecakapan teknis dan kebeningan hati nurani individu.

Aktivitas sosial-politik yang terukur dan terkontrol, adil dan jujur, terbuka dan bertanggung jawab, lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas, pertimbangan serta kepentingan umum daripada pertimbangan dan kepentingan yang sektoral dan bernuansa SARA secara tidak langsung merupakan upaya nyata untuk membenahi, meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional. Sebab antara etika politik, kepemimpinan yang negarawan dan ketahanan nasional terdapat hubungan sebab-akibat yang korelatif.

a. Kontribusi menggalakkan etika politik dalam Sismennas terhadap upaya memunculkan kepemimpinan yang negarawan

Menggalakkan etika politik dalam Sismennas merupakan aktivitas pembinaan individu menurut norma-norma etis-moral yang berhubungan langsung dengan realitas kehidupan sosial. Titik tekan dan fokus menggalakkan etika politik adalah internalisasi atau pembatinan nilai-nilai etis-moral baik dalam ruang lingkup kebajikan personal atau sistem nilai yang menata relasi dan interaksi dalam ruang publik ke dalam pikiran dan kesadaran individu. Dengan internalisasi sistem nilai tersebut, individu akan memiliki karakter yang teruji dan terpuji, pola pikir, pola sikap dan pola tindaknya selalu terarah dan mengutamakan kepentingan umum seturut kriteria baik-buruk, adil-tidak adil, benar-salah, demokratis-otoritarian. Dengan begitu, aktivitas menggalakkan etika politik dalam Sismennas merupakan sebuah pendidikan politik yang terstruktur dan terukur.

Pembukaan ruang dan peluang bagi semua warga negara Indonesia dalam seluruh proses kehidupan sosial secara adil, jujur, terukur, transparan dan akuntabel

merupakan sarana terbaik untuk memunculkan orang-orang dari beragam latar belakang sebagai calon-calon pemimpin nasional. Tatkala prinsip-prinsip etika politik menjadi jiwa dasar bagi semesta relasi dan interaksi sosial bangsa Indonesia, maka pada momen itulah terbentang ruang dan peluang untuk mendapatkan pemimpin yang sungguh mempunyai kemampuan mumpuni dan kebesaran hati untuk memimpin, mengatur, menata, mengelola dan memanfaatkan semua potensi warga, sumber dana dan kekayaan alam Indonesia.

Singkat kata, aktivitas menggalakkan etika politik dalam Sismennas merupakan prasyarat utama bagi kemunculan pemimpin yang unggul dengan kepemimpinan yang luar biasa. Seorang pemimpin yang mumpuni dengan kepemimpinan yang luar biasa merupakan manusia setengah dewa. Pikiran, sikap dan tindakannya berada dalam koridor kebaikan, kebenaran dan keadilan. Karena pemimpin yang extra berbakat jikalau tanpa disertai keutamaan-keutamaan etis moral akan memimpin dan memanfaatkan semua kesempatan untuk memperkokoh dan melestarikan kepentingan, keuntungan, kekuasaan dan kelestarian dinastinya. Manusia tanpa etika akan menjadi serigala bagi sesama. Jadi tampak jelas bahwa upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas merupakan conditio sine qua non – persyaratan mutlak bagi kemunculan kepemimpinan yang negarawan.

b. Kontribusi kepemimpinan yang negarawan terhadap Tannas

Proses pemunculan kepemimpinan tingkat nasional yang dilaksanakan secara berjenjang dan berdasarkan kriteria yang jelas, obyektif dan mengutamakan aspek kualitatif dalam segala dimensinya secara otomatis akan membantu kemunculan manusia-manusia yang berjiwa negarawan. Kepemimpinan yang negarawan lebih mengutamakan altruisme dan bukan egoisme, mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri-keluarga-kelompok-agama, memilih menjadi kurban dan bukan menciptakan korban, lebih memprioritaskan kedamaian daripada ketegangan. Dia menomorsatukan hidup manusia dan menomorduakan kuasa, setia pada janji dan bersemangat mengabdi, dianugerahi daya prediksi seperti nabi atau mampu melihat sebelum terjadi. Dia adalah pribadi yang luar biasa, anak manusia setengah dewa yang senantiasa ditunggu oleh semua bangsa.

Kesuksesan memunculkan kepemimpinan yang negarawan memberikan kontribusi langsung pada penyempurnaan tata kelola negara dan keberhasilan pembangunan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Kepemimpinan yang negarawan bersikap anti terhadap semua ketidakteraturan, kebobrokan, ketidak-efektifan, ketidak-efisienan dan KKN. Kepemimpinan yang negarawan ialah kekasih kebenaran, keadilan, kejujuran, kerapian, keteraturan, demokrasi, toleransi dan transparansi. Karena itu, tata kelola pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang negarawan akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, luhur dan terpuji dan sanggup mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anak bangsa.

Kepemimpinan negarawan akan mentransformasi Indonesia dari negara yang sarat KKN menjadi bersih dari KKN, dari tata kelola negara yang bersemangat sektoral, mementingkan kelompok dan golongan, ke pengelolaan pemerintahan negara yang lintas sektoral, mengedepankan kualitas intelektual, etis-moral, profesionalitas dan kapabilitas. Kepemimpinan yang negarawan akan mencegah konflik dan kekerasan, memberantas sikap dan tindakan yang intoleran, menciptakan kondisi hidup yang aman, nyaman dan tenteram bagi semua orang.

Pada titik ini, pembangunan fisik, mental dan spiritual yang digalakkan dalam kepemimpinan negarawan secara langsung merupakan wujud dari pembangunan Tannas Indonesia. Karena Tannas yang sejati mengacu pertama-tama pada ketahanan fisik, mental dan spiritual, daya hidup dan daya juang manusia dalam menghadapi, menghidupi dan menyikapi berbagai permasalahan, persoalan, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam hidup pribadi maupun hidup bersama.

23. Indikasi Keberhasilan

Harapan bahwa upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas dapat memunculkan kepemimpinan yang negarawan bukan sekedar impian siang hari yang tanpa dasar apapun. Sebaliknya, harapan tersebut bertumpu pada beraneka macam gejala, tanda, isyarat dan petunjuk positif (indikasi) yang dapat dilihat, dicermati dan dikaji secara ilmiah, meskipun belum menjadi petunjuk yang terukur dan teruji (indikator). Berikut ini adalah beberapa indikasi keberhasilan yang dapat ditemukan.

a. Meningkatnya peran etika politik pada jenjang SMU – PT

1) Pengajaran dan penerapan etika politik yang semakin intensif pada jenjang SMU – PT akan mengurangi dan mencegah kebiasaan menyontek yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa semasa ulangan atau ujian semester dan bahkan yang dianjurkan oleh pengurus sekolah dan tenaga pengajar akibat target mengejar status 100% tingkat kelulusan siswa pada

- saat Ujian Nasional. Berkat pengajaran dan penerapan etika politik, semua pihak pasti mengamini bahwa tindakan menyontek merupakan keburukan etis-moral dan akar dari kebiasaan buruk seperti KKN, sikap tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, menghalalkan cara untuk mencapai tujuan.
- 2) Kehadiran dan penerapan etika politik di SMU dan PT menyebabkan tawuran antarsekolah, antarfakultas dan antarkampus semakin menurun, turut mengurangi dan mencegah tindak kekerasan, penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa terutama pada saat pekan orientasi siswa dan mahasiswa baru dan sewaktu melakukan demonstrasi.
- 3) Pengajaran dan penerapan etika politik yang terus digalakkan di sekolah dan kampus akan mengurangi dan mencegah aneka macam pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh pengurus sekolah dan PT, meminimalisir dan menghambat tindakan korupsi terhadap dana bantuan operasional yang diambil dari anggaran pendidikan.
- 4) Pengajaran dan penerapan etika politik di sekolah akan mengubah perilaku anak dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji seperti membolos dari pelajaran menjadi rajin belajar, sering melihat gambar/tayangan porno menjadi anak yang gemar membaca, menulis, berolahraga, bermusik dan terlibat dalam organisasi sekolah.
- 5) Dengan pengajaran dan penerapan etika politik di sekolah, diskriminasi, rasisme dan praduga yang bernuansa SARA makin berkurang dalam proses interaksi antar pribadi (guru dengan murid, murid dengan murid, guru dengan orangtua murid, orangtua murid dengan orangtua murid) di sekolah dan kehidupan masyarakat.

b. Meningkatnya politik plus nurani

- 1) Indikasi pertama bahwa politik plus nurani semakin meningkat dalam kehidupan bersama adalah makin berkurang jumlah konflik dan kekerasan bernuansa SARA yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat aspirasi, hak-hak dan kepentingan mereka yang selama ini tidak tersalurkan atau karena mereka dimanipulasi oleh kalangan tertentu.
- 2) Peran politik plus nurani menguat di kancah perpolitikan nasional tercermin dari perilaku politisi yang semakin jarang terlibat KKN atau "loncat partai" dan perpecahan internal partai. Praktek KKN, perpecahan internal partai

- dan fenomen loncat partai terus terjadi karena uang diterapkan sebagai tolok ukur kesetiaan, dedikasi, militansi dan kemurahan hati seseorang terhadap partai politik, sehingga memunculkan *high cost politic*.
- 3) Meningkatnya politik plus nurani tampak pula dari jumlah partai politik yang makin menyusut pada Pemilu 2014 dan 5 tahun berikutnya. Sekedar catatan untuk diketahui bahwa selama ini kehadiran partai yang demikian banyak dalam perpolitikan nasional lebih didorong oleh keinginan untuk merebut kekuasaan, memperoleh kekayaan, memperjuangkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan daripada kepentingan nasional.
- 4) Indikasi keberhasilan dari politik plus nurani dalam praksis politik adalah semakin berkurang jumlah penduduk yang tidak terdata sebagai pemilih, sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat menggunakan hak-hak politik mereka sebagai mana mestinya. Secara jujur hendaklah diakui bahwa warga yang tidak terdata sebagai pemilih kerap kali bukan hanya karena kelalaian petugas sewaktu mengadakan pendataan, melainkan juga merupakan suatu keputusan politik untuk meminimalisir perolehan suara dari partai tertentu.
- 5) Keberhasilan politik plus nurani tampil pula dari semakin meningkat jumlah penduduk yang berpartisipasi menyalurkan aspirasinya dalam Pemilu 2014 nanti atau semakin berkurang orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau yang disebut dengan golongan putih (golput) karena kecewa atau tidak percaya lagi dengan pemerintah.

c. Meningkatnya keteladanan

- Tanda bahwa mulai berlangsung surplus keteladanan adalah masyarakat menaruh hormat terhadap tokoh-tokoh formal seperti politisi dan semua pejabat negara dan pemerintahan, sehingga yang mereka katakan dituruti, kebijakan dan program pembangunan selalu didukung secara maksimal oleh seluruh masyarakyat.
- 2) Meningkatnya keteladanan ditandai pula oleh fakta bahwa berbagai berita negatif dan fakta yang selalu menghiasi media massa tentang politisi serta kalangan pejabat negara yang tersandung perbuatan tercela, perbuatan kriminal dan perkara KKN semakin sedikit.
- 3) Indikasi keberhasilan etika politik meningkatkan keteladanan tampak juga pada semakin jarang demonstrasi massa menuntut pemerintah menarik atau

- membatalkan suatu kebijakan yang dianggap tidak *pro* rakyat atau akibat krisis bahan kebutuhan pokok, listrik, bahan bakar minyak, sarana dan prasarana umum yang rusak dan terabaikan, tuntutan kenaikan upah dan caci maki terhadap pejabat.
- 4) Petunjuk bahwa keteladanan para pemimpin sudah diakui oleh masyarakat adalah semakin berkurang jumlah anggota masyarakat yang memilih para pemimpin mereka karena alasan atau pertimbangan yang bernuansa SARA, kedaerahan dan finansial.
- 5) Surplus keteladanan ditandai juga oleh semakin sedikit kalangan agamawan yang terjun ke dunia politik dan kemudian terjerat korupsi. Keterlibatan kalangan agamawan dalam politik, selain karena keputusan pribadi untuk mengabdikan diri, sebagian besar didorong oleh rasa kecewa dan kurang percaya kepada politisi dan aparat negara-pemerintahan yang dianggap tidak becus mengurus negara.

d. Meningkatnya peran etika dalam hukum

- Indikasi bahwa etika dan hukum kembali berpadu terbaca dari semakin menurun judicial review yang diterima oleh MK akibat ketidakpuasan dari beberapa pihak terhadap kehadiran dan implikasi dari aturan perundangundangan tertentu.
- 2) Perpaduan etika dengan hukum yang semakin erat dan meningkat ditandai pula oleh sikap respek masyarakat terhadap instansi peradilan Indonesia dan keputusan hukum yang ditetapkan. Sindiran bahwa hukum "tajam ke bawah" dan "tumpul ke atas" sudah jarang didengungkan oleh masyarakat.
- 3) Semakin berkurang jumlah aparat hukum yang berurusan dengan penegak hukum, khususnya KPK, karena terlibat berbagai macam skandal tindak kejahatan seperti mengkonsumsi narkoba, sabu-sabu dan jual beli perkara (KKN).
- 4) Indikasi meningkatnya peran etika dalam hukum adalah keberanian aparat penegak hukum baik yang termasuk dalam lembaga yudikatif maupun lembaga non yudikatif (Polisi dan Kejaksaan Agung) membuka kepada publik jumlah harta kekayaan mereka dan tulus hati membiarkan KPK untuk memverifikasinya.

5) Petunjuk bahwa etika berpadu kembali dengan hukum tampak dalam sikap ksatria semua lembaga penegak hukum mengakui eksistensi mafia perkara dalam dunia peradilan (dari penyidikan hingga pengambilan keputusan di pengadilan). Pengakuan ini merupakan bukti nyata dan langkah awal bahwa aparat penegak hendak berbenah diri.

BAB VI

KONSEPSI MENGGALAKKAN ETIKA POLITIK DALAM SISMENNAS GUNA MEMUNCULKAN KEPEMIMPINAN YANG NEGARAWAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

24. Umum

Kepemimpinan yang negarawan merupakan dambaan dan impian semua bangsa di dunia. Kepemimpinan yang negarawan merupakan kombinasi kejeniusan dengan wawasan pengetahuan yang ekselen, kesungguhan hati, kebeningan nurani dan keluhuran budi yang tak tertandingi. Kepemimpinan yang negarawan berawal dari manusia langka dengan bekal kemampuan mumpuni untuk mempengaruhi, mempersuasi, mempedomani dan memimpin semua orang yang berada di bawah kewenangannya serta dibentuk dan dibina oleh *sekolah kehidupan* yaitu keluarga, sekolah formal, informal maupun non-formal dan lingkungan sosial. Kombinasi dari kejeniusan serta kemampuan ekselen pribadi dengan pendidikan dan pembinaan melahirkan karakter budi dan hati yang *quasi* ilahi, manusia setengah dewa.

Kombinasi dari kecemerlangan pribadi dan efektivitas edukasi serta formasi dalam melahirkan kepemimpinan yang negarawan menandakan bahwa sekolah kehidupan adalah faktor dominan dan determinan dalam pembentukan wawasan pengetahuan, karakter dan hati nurani pribadi. Sekolah kehidupan merupakan faktor dominan dan determinan karena kejeniusan dan kecemerlangan seseorang bersifat potensial alias kemampuan yang belum menjadi nyata. Kejeniusan dan kecemerlangan pribadi dapat menjadi realitas, nyata dan fakta hanya melalui proses edukasi dan formasi yang sistematis, intensif, terencana, terukur dan obyektif seperti digagas Aristoteles dan Ronggowarsito. Dengan kata lain, untuk memunculkan kepemimpinan yang negarawan diperlukan konsepsi yang jelas, langkah-langkah yang kontinyu, capaian yang rasional dan parameter yang obyektif.

Konsepsi menggalakkan etika politik dalam Sismennas secara niscaya terarah pada dan sekaligus menginginkan relasi dan interaksi sosial rakyat dengan pejabat yang selalu berpedoman pada kaidah-kaidah etis-moral. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara hendaklah bersandar pada prinsip-prinsip etika politik supaya

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan seperti diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Untuk membuat etika politik menjadi jiwa bangsa, energi yang memacu dan memicu pembangunan, lentera yang menerangi langkah-langkah peradaban, tali yang mengikat dan merekat keberagaman menjadi kesatuan yang berkemanusiaan dan kunci yang membuka sekat-sekat kepentingan sektoral dan SARA dalam tata kelola negara diperlukan sebuah kemauan politik yang tegas dan bernas dari trias politika. Dalam artian bahwa praksis etika politik dalam ruang publik dan ranah sosio-politik memerlukan kesepahaman, kesepakatan, kebulatan tekad dan keteguhan hati semua komponen bangsa serta mensyaratkan kekuasaan yang tangguh untuk membuatnya operasional. Jadi, etika politik mensyaratkan kekuasaan yang *pro* rakyat dan pejabat yang memahami otoritas sebagai *vocatio* – amanah suci.

Kemauan politik yang bernas dan lugas untuk menerapkan etika politik dalam relasi dan interaksi masyarakat di ruang publik ditunjukkan dalam kebijakan yang dibuat, disertai dengan strategi yang jelas, langkah-langkah konkret untuk realisasinya dan pihak-pihak yang terlibat dan harus dilibatkan dalam pelaksanaannya. Karena itu, menggalakkan etika politik dalam Sismennas merupakan bentuk konkret dari upaya untuk memunculkan pola kepemimpinan yang negarawan secara terencana, intensif, kontinyu, jujur dan terbuka dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat, pemangku kepentingan dan kekuasaan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional Indonesia.

25. Kebijakan

Sejak periode reformasi bangsa Indonesia menikmati alam kebebasan dan politik kekuasaan yang demokratis dan bahkan cenderung liberalistik. Distribusi kekuasaan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di antara trias politika dan pemangku kepentingan, desentralisasi tata kelola penyelenggaraan negara dalam bentuk otonomi daerah dan penghapusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara merupakan bentuk nyata dari penghargaan terhadap suara rakyat sebagai pemangku tertinggi kekuasaan negara.

Namun demikian, demokratisasi politik kekuasaan belum berjalan paralel dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak banyak warga negara yang menghargai keberagaman dalam segala dimensi dan perbedaan pendapat secara dewasa yang justru menjadi ciri dasar negara demokratis. Relasi dan interaksi di tengah masyarakat masih

diwarnai oleh cara pandang, sikap dan perilaku yang dikotomistik, ego sektoral dan bernuansa SARA antara rakyat dan pejabat, kelompok-*ku* dan kelompok-*mu*, mayoritas dan minoritas, golongan A dan golongan B, kaya dan miskin, kawan dan lawan, seiman dan lain keyakinan. Ringkas kata, praksis demokrasi di Indonesia masih terus diwarnai oleh pemaksaan kehendak dari kelompok yang lebih kuat, berpunya dan mayoritas serta praduga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Ketidaksejalanan sistem demokrasi dengan cara berpikir, pola sikap dan tata laku warga negara yang belum demokratis dan bahkan secara eksplisit amat anti demokrasi telah menghambat upaya untuk menciptakan sebuah negara yang harus bersendikan ketuhanan, kemanusiaan dalam keberadaban, kesatuan yang menghargai kemajemukan, demokrasi yang mengutamakan kerakyatan dan kegotong-royongan dalam semangat keadilan sosial bagi semua warga bangsa. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa nilai-nilai etis-moral, terutama prinsip-prinsip etika politik belum mendapat tempat dalam kesadaran anak bangsa dan menjadi prioritas utama dalam sekolah sosial.

Secara sosio-kultural dan antropologis bangsa Indonesia sungguh paham dan sadar bahwa pembangunan nasional pertama-tama merupakan pembangunan manusia Indonesia atau proses mewujudkan diri menjadi pribadi yang utuh, integral, humanis dan sosial. Maka, pembangunan nasional secara esensial merupakan pembangunan kebudayaan dan peradaban bangsa yang berorientasi pada kemanusiaan (humanisme), menghargai kemajemukan (multikulturalisme) dan berkeadilan sosial (etis-moral). Itulah intisari, arah dasar dan tujuan sejati Sismennas yang bersendikan prinsip-prinsip etika politik. Karena itu, bertitik tolak dari realitas aktual atau praksis terkini dalam Tata Kehidupan Masyarakat, Tata Politik Nasional, Tata Administrasi Negara dan Tata Laksana Pemerintahan, konsep dan cita-cita tentang situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diharapkan, maka KEBIJAKAN yang diambil dan dilaksanakan untuk menggalakkan etika politik dalam Sismennas guna memunculkan kepemimpinan yang negarawan dalam rangka ketahanan nasional adalah

RESTORASI KEHIDUPAN SOSIAL DENGAN MENJADIKAN ETIKA POLITIK SEBAGAI JIWA BANGSA

Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan di bidang yuridisformal yang memposisikan HUKUM SEBAGAI PANGLIMA. Hukum dapat menjadi panglima yang tangguh dalam mencegah dan memperbaiki dampak yang muncul dari tindakan melawan hukum hanya jika memiliki jiwa yang kuat, yaitu prinsip-prinsip etika politik. Nilai-nilai etis khususnya yang berhubungan dengan tingkah laku individu di ruang publik hendaklah selalu menganimasi dan mengaliri setiap urat nadi hukum agar mencegah arogansi kekuasaan dan menumbuhkan rasa keadilan bagi semua warga negara. Dengan begitu, dari perpaduan etika politik sebagai jiwa dan hukum sebagai panglima dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita yakin bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama akan bermunculan di seluruh pelosok tanah air figur-figur calon pemimpin nasional dengan pola kepemimpinan yang negarawan.

Selanjutnya, kebijakan ini akan ditindaklanjuti dengan merumuskan strategistrategi supaya dapat menjadi operasional dan memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan manusia Indonesia yang berkeadaban, berkeadilan, berkemanusiaan dan terutama bagi upaya memunculkan kepemimpinan yang negarawan.

26. Strategi

Secara hakiki strategi berkaitan dengan pendekatan, perencanaan dan tindakan untuk membantu orang perseorangan atau anggota-anggota kelompok mengerti apa yang harus dilakukan, eksistensi diri macam apa yang hendak direalisasikan, hal ihwal mana yang paling penting diperhatikan dan dilaksanakan, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang teridentifikasi dan tujuan tertentu yang hendak direalisasikan. Singkat kata, strategi merupakan ide penyatu dan peramu yang menjamin koherensi dan kesatuan aksi yang sudah rencanakan dan dirancang untuk mewujudkan visi, misi dan aksi dalam rangka melindungi, memperbaiki, menyempurnakan dan mencapai tujuan tertentu.

Untuk mewujudkan kebijakan *restorasi kehidupan sosial dengan menjadikan etika politik sebagai jiwa bangsa*, maka semua komponen masyarakat, baik yang berperan sebagai sasaran maupun pelaksana kebijakan dilibatkan dan dinyatakan secara tegas dan jelas. Partisipasi dan afirmasi peran masing-masing pihak merupakan langkah nyata untuk membuat kebijakan diketahui publik dan rencana aksi mendapat dukungan luas dari semua lapisan masyarakat. Dengan partisipasi aktif dan afirmasi peran yang jelas dari semua pihak, diharapkan bahwa praduga, salah paham, kecurigaan, penolakan, perlawanan dan politisasi oleh kalangan tertentu terhadap kebijakan ini dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan sama sekali.

Adapun strategi-strategi yang digunakan untuk mengkonkretkan upaya merestorasi kehidupan sosial dengan upaya menggalakkan etika politik sebagai jiwa bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut.

Strategi 1: Memasukkan etika politik dalam kurikulum SMU dan PT untuk membentuk karakter pribadi dan bangsa yang mengutamakan keadilan, kepentingan umum, toleransi, kebenaran, kesetiakawanan melalui evaluasi dan pengumuman hasil evaluasi terhadap praksis pendidikan yang berlangsung selama ini, sosialisasi tentang esensialitas pendidikan etika masuk dalam kurikulum, koordinasi lintas sektor untuk menemukan kesepakatan bersama tentang bidang studi etika politik dalam kurikulum pendidikan menengah atas dan PT, membuat regulasi yang mewajibkan pendidikan etika politik dalam kurikulum SMU dan PT, dan diberlakukan paling lambat 2015

Etika politik merupakan kunci kehidupan bersama. Ketika prinsip-prinsip etis-moral lenyap dari kesadaran individu dan kelompok atau baik dan buruk, benar dan salah disingkirkan dari daftar kriteria nilai hidup pribadi dan bersama, maka pada momen itu hidup sosial menjadi medan laga yang tidak berperikemanusiaan. Setiap individu dan kelompok akan mengejar semua keinginan dan tujuan hidupnya tanpa aturan main atau pertimbangan apapun selain dorongan instingtif dan ambisi yang egoistis. Ketidakhadiran etika dalam ruang wacana maupun tindakan membuat manusia kehilangan orientasi dasar dalam mengarahkan langkah hidupnya, dan kemangkiran etika politik membuat relasi dan interaksi antar manusia dan antar kelompok dalam ruang publik akan didominasi oleh logika *homo homini lupus – manusia adalah serigala bagi sesamanya*.

Bertindak seturut prinsip-prinsip etis-moral, keterarahan pada kebaikan, kebenaran, keadilan, toleransi, saling pengertian, solidaritas dan kepentingan umum bukanlah bawaan sejak lahir. Pola pikir, pola sikap dan pola tindak individu secara hakiki merupakan produk pendidikan dan pembinaan yang panjang, intensif dan berkelanjutan. Individu harus belajar dari sejak dini untuk berpikir dan bertindak menurut standar nilai adiluhung, sehingga dalam perjalanan waktu terbentuk suatu *insight* dan karakter yang mengedepankan

pertimbangan etis-moral. Tanpa pendidikan dan pembinaan yang serius dan kontinyu mustahil manusia menjadi bijak.

Bertitik tolak dari premis ini, maka strategi untuk menggalakkan etika politik sebagai jiwa tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memunculkan kepemimpinan yang negarawan adalah memasukkan etika politik ke dalam kurikulum SMU dan PT. Etika politik hendaklah menjadi salah satu bidang studi prioritas dalam kurikulum pendidikan nasional tingkat SMU dan PT supaya proses pembentukan pemahaman, kesadaran, sikap dan perilaku yang bersendikan prinsip-prinsip etis dan berorientasi pada nilai-nilai etis dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Strategi 2: Melakukan reorientasi politik agar politik dijiwai oleh etika dengan cara membuat evaluasi terhadap praksis politik yang berlangsung selama ini, mengadakan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral agar lahir kesepahaman tentang betapa penting etika politik dipahami dan dijadikan pedoman dalam relasi dan interaksi antarpribadi di ruang publik, melaksanakan pendidikan (edukasi) politik yang bermaterikan etika politik dan membuat regulasi baru agar keuangan partai menjadi transparan serta mencegah perilaku korupsi, dan dilaksanakan paling lambat 2015

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan sebuah gerak bersama menuju ke tujuan tertentu yang sudah ditetapkan bersama. Sebagai langkah bersama, kehidupan sosial dapat melenceng ke kiri atau ke kanan karena kehilangan orientasinya. Kehilangan orientasi disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalkan saja kelalaian-ketidakawasan, kebingungan dalam membaca atau kesengajaan untuk melanggar dan mengabaikan petunjuk-petunjuk arah yang sudah dipasang karena alasan-alasan tertentu.

Kehidupan bangsa Indonesia pernah mengalami 3 (tiga) kali disorientasi politik, yaitu semasa kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru yang ditandai oleh politik kekuasaan yang sentralistis dan otoritarian serta Era Reformasi yang diwarnai oleh praksis politik yang liberalistik. Disorientasi politik terjadi manakala prinsip-prinsip etika politik disingkirkan dari wacana dan praksis politik bangsa dan penguasa lebih mengutamakan kepentingan *status quo*.

Untuk mencegah disorientasi dan memelihara agar politik kekuasaan selalu melangkah di jalan yang benar dan melaksanakan program politik yang berwawasan kemanusiaan, kemajemukan dan keadilan, maka reorientasi politik yang bersendikan etika harus dilaksanakan secara serius dan menyeluruh. Reorientasi politik berwawasan etika merupakan sebuah restorasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan kembali ke semangat awal dan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

Strategi 3: Membangkitkan kembali (reanimasi) keteladanan para pemimpin tingkat nasional supaya tumbuh kembali kepercayaan rakyat terhadap negara dan lembaga pemerintah dengan cara mengevaluasi kebijakan, kinerja dan harta kekayaan para pemimpin tingkat nasional, mensosialisasikan betapa etika politik harus selalu dipahami dan dipedomani oleh para pemimpin tingkat nasional dan mendorong terus menerus pendidikan politik yang bernafaskan etika politik, dan rencana ini hendaklah dilaksanakan paling lambat 2015

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara digerakkan secara alam bawah sadar oleh dorongan kultural. Dorongan kultural merupakan cermin dari derajad perkembangan intelektual manusia dalam mengembangkan diri, mengatur dan mengorganisasikan kehidupan sosial untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dorongan kultural dan tingkat perkembangan intelektual tersebut memanifestasikan diri dalam pemahaman individu tentang kosmos, realitas material, martabat pribadi, hak dan kewajiban, bentuk pemerintahan dan cara-cara menyelesaikan konflik dalam hidup sosial. Singkat kata, dorongan kultural dan tingkat peradaban suatu kelompok tampak dalam pranata-pranata sosial yang digunakan untuk menata seluruh relasi dan interaksi individu dalam wilayah sosial.

Dorongan kultural dan tingkat perkembangan peradaban bangsa kita masih berada pada fase transisi dari masyarakat agraris dengan bentuk pemerintahan yang feodalistis ke masyarakat industri dengan pola pengelolaan pemerintahan yang demokratis. Ciri transisi kebudayaan tampak sekali dari pola pemahaman, cara bersikap dan bertindak yang masih campur aduk antara yang rasional dan magis-ritual, berpikir menurut kalkulasi faktual dan empiris,

untung-rugi, analisa seturut kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan serta sekaligus mencari sebab musabab pada dunia gaib.

Dalam banyak kasus, ditekankan persamaan hak dan kewajiban, pada saat bersamaan aspek ketokohan masih mendapat tempat istimewa. Pemimpin tetap dianggap sebagai yang paling tahu dan paling mampu, sehingga harus menjadi teladan. Bertolak dari pemahaman ini, maka strategi yang digunakan untuk menggalakkan etika politik dalam hidup bersama sebagai sebuah bangsa adalah menggalakkan keteladanan para pemimpin nasional dalam ruang publik.

Strategi 4: Merajut kembali relasi etika dengan hukum untuk menghindari hukum sebagai alat kekuasaan yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas melalui evaluasi terhadap praksis hukum selama ini, regulasi baru tentang pengajaran etika terutama etika dasar dan etika sosial di fakultas hukum, menjalin kerjasama lintas sektoral untuk terus berkomitmen memberantas KKN dengan mulai membersihkan lembaga masing-masing dari aparatur yang korup atau bejat secara moral serta edukasi (pendidikan etika) bagi aparat penegak hukum, dan hendaklah ditindaklanjuti paling lambat 2015

Secara sarkastis wajah hukum di tanah air disimpulkan dalam kesan publik bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebagian besar masyarakat telah bersikap apriori dan bahkan tidak percaya lagi pada (aparat penegak) hukum, karena semua terkesan diatur dan dapat diperjualbelikan seperti produk-produk industri yang lain. Karena itu, hukum lebih tampak sebagai alat pemaksa penguasa daripada alat bantu untuk mendapatkan keadilan bagi semua warga negara.

Keganasan hukum terjadi manakala dipisahkan dari etika. Hukum dan etika merupakan dua sisi dari satu mata uang: keduanya merupakan produk nalar untuk membantu manusia berjalan mencapai tujuan hidupnya. Etika merupakan energi, daya hidup yang mengarahkan langkah kaki (orientatif) berdasarkan pertimbangan baik-buruk menuju sasaran akhir. Sedangkah hukum merupakan penunjuk arah, buku panduan, perintah yang memaksa manusia (berdasarkan benar-salah, adil-tidak adil, sah-tidak sah) untuk mengambil arah yang benar agar tidak tersesat, tak merugikan orang lain dan sampai ke tujuan. Singkat kata, etika

adalah alat pemaksa dari dalam, sedangkan hukum merupakan alat pemaksa yang berasal dari luar.

Moderasi keganasan hukum dan pencegahan terhadap manipulasi hukum oleh aparat penegak hukum sebagai representasi kekuasaan hanya dapat dilakukan jikalau kebenaran dan keadilan menjadi landasan pengambilan keputusan. Untuk itu, strategi yang digunakan supaya etika berfungsi sebagai jiwa bangsa, energi yang memberi daya hidup dan lentera yang menerangi jalan bagi semua warga sebangsa menuju masyarakat yang dicita-citakan adalah menalikan kembali etika dengan hukum. Etika dan hukum hendaklah beriringan mengawal langkah kehidupan agar keadilan mekar di hati warga.

a) Metode

Beberapa metode yang termuat dalam strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengkonkretkan kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Evaluasi

Cara kerja yang pertama dan utama harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mengadakan evaluasi secara komprehensif, jujur, terbuka dan obyektif terhadap praksis pendidikan nasional, kehidupan politik, sepak terjang para pemimpin tingkat nasional dan praksis hukum nasional selama ini. Hanya jika ada pengakuan yang jujur dan terbuka terhadap realitas bangsa yang apa adanya kita dapat membuat langkah-langkah yang strategis dan aksi yang signifikan.

2. Sosialisasi

Hasil evaluasi terhadap dunia pendidikan, dunia politik, kehidupan para pemimpin dan dunia hukum hendaklah disosialisasikan kepada segenap lapisan masyarakat. Lewat sosialisasi ini diharapkan timbul pemahaman dan kesepakatan tentang pentingnya kita semua mencegah degradasi karakter anak bangsa dengan menggalakkan etika politik.

3. Koordinasi

Langkah strategis berikut adalah mengadakan koordinasi lintas sektoral untuk mulai merencanakan dan merumuskan muatan doktrinal dan semua perangkat teknis guna mendukung pengajaran bidang studi etika dan etika

politik. Kesepahaman, kesepakatan dan kebulatan hati untuk memperbaiki kehidupan berbangsa melalui pendidikan etika dan etika politik di semua jenjang kehidupan sosial hanya mungkin terlaksana ketika ego sektoral disingkirkan. Keberhasilan menekan ego sektoral dari masing-masing pihak yang berwenang mengatur dan mengelola negara terwujud dalam intensitas koordinasi antar lembaga negara dan atau pemerintahan.

4. Regulasi

Langkah decisif untuk mengejawantahkan kebijakan merestorasi kehidupan sosial melalui upaya nyata menggalakkan etika politik sebagai jiwa kehidupan sosial dengan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan nasional adalah membuat regulasi, sehingga mempunyai landasan hukum dan daya ikat yang kuat. Pendidikan etika politik memerlukan dasar hukum, yaitu dengan memasukkannya ke dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional.

5. Edukasi

Langkah konkret dan maha penting dalam menggalakkan etika politik supaya terwujud restorasi kehidupan sosial adalah edukasi atau proses pendidikan yang dilaksanakan secara intensif, obyektif, kontinyu dan sistematis. Edukasi mencakup pengembangan aspek kognitif dalam bentuk pengajaran, aspek kesadaran melalui internalisasi sistem nilai etis-moral dengan pertukaran peran subyek bina/peserta dalam ruang sosial dan aspek hati nurani lewat pembentukan sikap dan tindakan subyek bina/peserta dalam kehidupan konkret. Dengan demikian, edukasi akan melahirkan manusia yang memiliki wawasan suci, kesadaran murni dan tingkah laku yang terpuji dalam relasi dan interaksi terutama di ruang publik.

b) Sarana

Dalam lingkup strategi, sarana atau instrumen yang sering digunakan sering berciri organisasional baik yang ditangani secara langsung oleh lembaga pemerintah maupun oleh pihak swasta atau lembaga swadaya masyarakat. Berikut adalah beberapa institusi yang cukup berperan dalam mendukung upaya merestorasi kehidupan sosial dengan menjadikan etika politik sebagai jiwa seluruh bangsa Indonesia.

1. Keluarga

Keluarga merupakan sarana institusional yang sangat fundamental dan sentral dalam pembentukan karakter dan internalisasi sistem nilai ke dalam kesadaran individu. Karena begitu sentral dan fundamental bagi kehidupan manusia, keluarga sering disebut sebagai mikrokosmos dan laboratorium sosial. Beragam persepsi, pola sikap dan pola tindak individu ditentukan oleh pengalaman masa kecil selama berada di dalam keluarga.

2. Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan merupakan wadah terpenting dan decisif dalam proses pembentukan kesadaran yang berwawasan etis. Karena itu, upaya memasukkan etika politik dalam kurikulum SMU dan PT mensyaratkan peranserta lembaga atau institusi pendidikan sebagai mentor dan eksekutornya. Institusi pendidikan harus menjadi sarana terdepan dan terunggul dalam mendesain model manusia yang akan dihasilkan dari dunia pendidikan.

3. Organisasi Massa

Sarana organisasional yang tidak kalah penting dalam mewadahi pendidikan etika politik di lingkup tata kehidupan masyarakat adalah organisasi massa. Peran-serta mereka bukan sekedar mendukung atau mengkritik, melainkan memberikan gambaran yang utuh mengenai konsepsi dan persepsi masyarakat secara keseluruhan tentang karakter individu dan bangsa yang ingin dibentuk oleh dunia pendidikan.

Secara umum, konsepsi dan praksis, wawasan pemahaman dan sepak terjang sebuah organisasi massa merupakan gambaran yang konkret dan *quasi* obyektif tentang pola pikir, pola sikap dan pola tindak atau secara umum mengekspresikan situasi dan kondisi riil tentang sistem nilai yang dianut dalam partai politik yang menjadi wadah organisasionalnya.

4. Institusi Pemerintahan

Institusi pemerintahan merupakan instrumen institusional yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sangat menentukan karena institusi ini mempunyai dukungan sarana, dana dan kewenangan dari pemerintah untuk melakukan semua tahapan dengan kekuatan yuridis yang tak dimiliki oleh sarana institusional mana pun. Karena itu, perangkat institusional pemerintahan diandaikan mempunyai hampir semua sarana dan prasarana yang diperlukan untuk membuat kebijakan dan rencana aksi menjadi operasional.

5. Media Komunikasi Massa

Di era modern kontemporer salah satu kekuatan raksasa dalam kehidupan sosial adalah media (komunikasi) massa. Media massa sebagai produk unggulan teknologi komunikasi telah menjadi sarana yang menembus sekat-sekat primordial SARA, budaya dan Negara. Sebagai perpanjangan dari kemampuan penginderaan manusia, media komunikasi massa merupakan instrumen yang sangat efektif dan berdaya jangkau luas guna mensosialisasikan dan menginternalisasikan keyakinan, ideologi, kebijakan dan aneka warta lainnya, termasuk dalam restorasi kehidupan sosial sebuah bangsa seturut orientasi prinsip etis-moral tertentu.

6. Institusi Politik

Peran institusi politik sebagai instrumen organisasional dalam merestorasi kehidupan sosial dengan menggalakkan etika politik sebagai jiwa bangsa tidak boleh dipandang sebelah mata. Bagaimanapun juga institusi politik berperanserta dalam mendidik massa pendukung di akar rumput yang dipersiapkan menjadi kader-kader politiknya. Pada fase ini peran partai politik dominan sekali untuk menjadi edukator dan promotor bagi pembentukan kesadaran dan perilaku politik yang mengutamakan nilai etis-moral daripada kepentingan sesaat dan pragmatis yang kerap menjadi *trade mark* dunia politik.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat

Kehadiran lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan salah satu ciri dasar kehidupan demokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan partisipasi aktif warga negara sebagai pemegang tertinggi kedaulatan dalam negara untuk mengontrol sepak terjang semua aparatur negara dan lembaga pemerintahan yang dipercayakan mengelola suatu negara. Untuk merestorasi kehidupan sosial menjadi lebih humanis, berkeadilan dan mengedepankan bonum commune, LSM dapat menjadi sarana yang signifikan dalam edukasi

dan internalisasi nilai-nilai etis-moral ke dalam kesadaran dan *formatio* karakter individu yang berkeutamaan.

c) Tujuan

1. Kesamaan Visi

Rencana aksi yang telah didesain dengan tahapan-tahapan strategis melalui pola kerja dan sarana instrumental tertentu diarahkan pada satu tujuan, yaitu kesamaan visi di antara semua pihak tentang makna sejati tata kelola negara di segala bidang karya yang ada serta kehidupan bersama sebagai satu bangsa dan satu negara. Ada pun visi yang dimaksud tiada lain adalah kesamaan cara pandang tentang manusia Indonesia yang didambakan sejak dari awal pendirian bangsa ini hingga akhir nanti, yaitu menjadi manusia yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkeadilan, mengutamakan kesetiakawanan dalam musyawarah dan mufakat dalam wadah kesatuan Negara Republik Indonesia dan semangat persatuan sesuai dengan amanat Pancasila.

2. Kesatuan Aksi

Kesatuan aksi merupakan konsekwensi langsung dan sekaligus tindak lanjut dari kesamaan visi yang telah berhasil disepakati oleh semua pihak. Keseragaman aksi yang dimaksud bukanlah tindakan yang dilakukan dengan memperlakukan manusia sebagai obyek aksional yang harus begini dan begitu. Keseragaman aksi yang ingin dilakukan adalah proses pendidikan yang dilakukan tahap demi tahap, intensif, kontinyu dan sistematis dengan menempatkan individu sebagai subyek yang berkesadaran dan bermartabat guna mengaktualisir semua potensinya seturut prinsip-prinsip etis-moral yang berlaku secara universal.

3. Pembentukan Karakter Bangsa

Kesamaan visi dan kesatuan aksi dalam menerapkan semua strategi yang telah diuraikan di atas berorientasi pada pembentukan karakter manusia Indonesia. Restorasi kehidupan sosial dengan menjadikan etika politik sebagai jiwa bangsa hanya dapat dicapai jikalau pendidikan etika politik berlangsung di segenap lapisan sosial, mulai dari kalangan masyarakat biasa, kalangan politikus hingga aparatur Negara dan pemerintahan. Pendidikan etika politik

yang dilakukan secara sistematis, intensif, masif dan kontinyu akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki karakter bijak bestari, berwatak etis, kepemimpinan yang negarawan.

27. Upaya

- a. Upaya dari strategi 1: Memasukkan etika politik dalam kurikulum SMU dan PT untuk membentuk karakter pribadi dan bangsa yang mengutamakan keadilan, kepentingan umum, toleransi, kebenaran, kesetiakawanan melalui evaluasi dan pengumuman hasil evaluasi terhadap praksis pendidikan yang berlangsung selama ini, sosialisasi tentang esensialitas pendidikan etika masuk dalam kurikulum, koordinasi lintas sektor untuk menemukan kesepakatan bersama tentang bidang studi etika politik dalam kurikulum pendidikan menengah atas dan PT, membuat regulasi yang mewajibkan pendidikan etika politik dalam kurikulum SMU dan PT, dan diberlakukan paling lambat 2015
- 1. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera mengadakan evaluasi menyeluruh atau sejenis telaah investigatif terhadap sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) terkait penghapusan pendidikan budi pekerti yang telah memberikan kontribusi begitu besar terhadap pembentukan karakter manusia Indonesia yang berbudi luhur dan mulia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Evaluasi yang komprehensif tersebut dilakukan secara serentak di seluruh tanah air dengan melibatkan terutama kalangan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerhati serta praktisi pendidikan dan kalangan birokrasi.
- 2. Pemerintah melalui Kemendikbud mengumumkan hasil evaluasi investigasi tersebut secara jujur, terbuka dan obyektif, agar terbuka pemahaman dan kesadaran bahwa penghapusan budi pekerti (etika) dari kurikulum pendidikan menyebabkan degradasi etis-moral dalam kehidupan sosial dewasa ini.
- 3. Pemerintah melalui Kemendikbud berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga penyiaran publik baik

media cetak maupun elektronik, tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum cerdik pandai dan LSM mensosialisasikan pendidikan etika politik dan perannya dalam pembentukan karakter bangsa terutama melalui sekolah formal informal maupun nonformal.

- 4. Pemerintah melalui Kemendikbud mengadakan suatu koordinasi dengan kalangan akademisi, organisasi massa, lembaga politik, lembaga keagamaan dan LSM untuk menemukan kesepakatan bersama tentang pentingnya memasukkan etika politik dalam kurikulum pendidikan nasional sebagai kelanjutan dari pendidikan budi pekerti yang diajarkan di tingkat SD dan SMP menurut Kurikulum 2013.
- 5. Pemerintah melalui Kemendikbud mewajibkan pelaksanaan pendidikan budi pekerti di tingkat SD dan SMP secara nasional seperti diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dan 36 ayat 3a menyangkut pembentukan akhlak mulia.
- 6. Pemerintah melalui Kemendikbud membuat regulasi baru yang mewajibkan pendidikan etika politik di tingkat SMU dan PT sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 dan 36 ayat 3a berkenaan dengan pembentukan akhlak mulia.
- 7. Pemerintah melalui Kemendikbud merevisi kurikulum 2013 yang masih belum memuat pendidikan etika politik di tingkat SMU dan PT dan menunda pemberlakuannya sampai akhir 2014.
- 8. Pemerintah melalui Kemendikbud bekerjasama dengan kalangan akademisi yang pakar di bidang etika dan etika politik untuk segera mempersiapkan modul pendidikan budi pekerti dan etika politik yang akan digunakan pada semua jenjang pendidikan untuk tahun ajaran 2015.
- 9. Pemerintah melalui Kemendikbud mendorong Komite Sekolah mengadakan pertemuan bulanan dengan orangtua murid agar mereka sadar sebagai guru utama dan pertama dalam pendidikan etis-moral anak dan terlibat aktif dalam pembentukan karakter anak-anaknya.

- b. Upaya dari strategi 2: Melakukan reorientasi politik agar politik dijiwai oleh etika dengan cara membuat evaluasi terhadap praksis politik yang berlangsung selama ini, mengadakan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral agar lahir kesepahaman tentang pentingnya etika politik dipahami dan dijadikan pedoman dalam relasi dan interaksi antarpribadi di ruang publik, melaksanakan pendidikan (edukasi) politik yang bermaterikan etika politik dan membuat regulasi baru agar keuangan partai menjadi transparan dan mencegah perilaku korupsi, dan dilaksanakan paling lambat 2015
- 1. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) membuat evaluasi yang menyeluruh dan obyektif terhadap praksis politik nasional yang berlangsung selama ini. Karena sejak reformasi berlangsung, politik nasional mengalami disorientasi: meninggalkan prinsip hormat terhadap manusia, keaneka-ragaman sebagai bangsa, keadilan sosial bagi setiap dan semua warga negara, rasa setia kawan dan semangat gotong-royong serta kepentingan umum sebagai tujuan dasar politik. Yang lebih ditonjolkan adalah politik yang sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan nuansa SARA, sehingga terkesan gedung parlemen menjadi pasar dan nasib bangsa berubah sebagai komoditi politik yang diperjualbelikan.
- 2. Pemerintah melalui Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenko Polhukam berani mengumumkan hasil evaluasi terhadap praksis politik yang terjadi selama ini dan segera mengadakan koordinasi dengan kalangan akademisi, kaum cerdik pandai, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama supaya mendesak secepatnya kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) tentang etika politik bagi setiap orang yang ingin terjun di dunia politik.
- 3. Pemerintah melalui Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenko Polhukam mendesak semua partai politik menyatukan visi dan misi partai sesuai dengan

- cita-cita bangsa dan tujuan nasional sebagaimana tertera pada Mukadimah UUD 1945.
- 4. Pemerintah melalui Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenko Polhukam mendesak setiap partai politik menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang etika politik bagi setiap kader partai yang akan terjun dalam kegiatan politik baik di tingkat Kabupaten dan Provinsi (daerah) maupun di tingkat nasional (pusat).
- 5. Pemerintah melalui Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenko Polhukam mewajibkan setiap partai politik menyediakan anggaran khusus untuk Diklat tentang etika politik secara reguler bagi setiap kader dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
- 6. Pemerintah melalui Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenko Polhukam membuat regulasi baru yang mewajibkan setiap partai politik untuk mengumumkan kepada publik sumber finansial partai dan pertanggungjawaban atas penggunaannya demi asas transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Regulasi ini hendaklah diberlakukan pada Pemilu 2019.
- 7. Pemerintah bekerjasama dengan semua lembaga negara menyepakati regulasi baru yang mewajibkan semua aparatur negara melakukan *Sumpah Kejujuran*. Isinya: DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH UNTUK 1) MENJUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA, 2) BERLAKU ADIL, 3) BERTINDAK JUJUR, 4) MEWUJUDKAN KEPENTINGAN UMUM. SEMOGA ALLAH MENGUATKAN SAYA DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH INI. AMIN Sumpah ini hendaklah diucapkan oleh semua aparatur negara sebelum memulai pekerjaan di ruang kerja atau di aula. Pengulangan sumpah kejujuran ini secara bersama-sama bermaksud membatinkan prinsip-prinsip etika politik dalam kesadaran, mencegah perilaku KKN, meningkatkan kinerja dan tepat waktu.
- 8. Pemerintah melalui Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenko Polhukam mewajibkan semua politikus yang mendaftar menjadi calon anggota legislatif membuat Sumpah Kejujuran secara massal dan serentak di hadapan umum

- bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Regulasi ini mesti diberlakukan pada Pemilu 2019.
- 9. Pemerintah melalui Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenko Polhukam, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu bekerjasama dengan LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama menelusuri rekam jejak setiap orang yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (caleg) baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat dan berkoordinasi dengan partai politik untuk mencegah caleg 'hitam' terlibat dalam politik nasional. Kerjasama dan koordinasi ini hendaklah dimulai setelah Pemilu 2014.
- c. Upaya dari strategi 3: Membangkitkan kembali (reanimasi) keteladanan para pemimpin tingkat nasional supaya tumbuh kembali kepercayaan rakyat terhadap negara dan lembaga pemerintah dengan mengevaluasi kebijakan, kinerja dan harta kekayaan para pemimpin tingkat nasional, mensosialisasikan betapa etika politik harus selalu dipahami dan dipedomani oleh para pemimpin tingkat nasional dan mendorong terus menerus pendidikan politik yang bernafaskan etika politik, dan rencana ini hendaklah dilaksanakan paling lambat 2015
- 1. Presiden dan Wakil Presiden dengan melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM mendesak setiap kementerian agar mengadakan evaluasi yang komprehensif, jujur, obyektif dan terbuka terhadap kinerja dan memeriksa harta kekayaan aparatur Negara dan pemerintahan mulai dari eselon tiga ke atas dengan cara memberikan nilai dari yang paling rendah 0 hingga yang paling tinggi 10 dan mengumumkannya secara publik di media massa nasional dan website masing-masing lembaga.
- 2. Pemerintah melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN), Kementerian Agama dan Kemendagri segera bekerjasama dengan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Ombudsman, KPK, dan Komisi Yudisial (KY), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM untuk mengevaluasi secara komprehensif, jujur, obyektif dan terbuka semua kebijakan, kinerja dan memeriksa harta kekayaan para gubernur, bupati dan

- walikota seluruh Indonesia dengan cara memberikan nilai dari yang paling rendah 0 hingga yang paling tinggi 10 dan mengumumkannya secara publik di media massa nasional dan *website* masing-masing lembaga.
- 3. Pemerintah melalui Kemeneg PAN, Kementerian Agama dan Kemendagri bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM mengevaluasi secara menyeluruh, jujur, terbuka dan obyektif semua produk, kinerja dan harta kekayaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat daerah dan pusat dengan cara memberikan nilai dari yang paling rendah 0 hingga yang paling tinggi 10 dan mengumumkannya secara publik di media massa nasional dan website masing-masing lembaga.
- 4. Pemerintah melalui Kemeneg PAN, Kementerian Agama, Kemendagri, Ombudsman bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM mengadakan evaluasi yang komprehensif, jujur, obyektif dan terbuka terhadap kebijakan, kinerja dan harta kekayaan aparat kepolisian terutama dari tingkat Kepala Polisi Resor (Kapolres) hingga Perwira Tinggi di Markas Besar Polri dengan memberikan nilai dari yang terrendah 0 hingga yang paling tinggi 10, mengumumkannya secara publik di media massa nasional dan website masing-masing lembaga.
- 5. Pemerintah melalui Kemenko Polhukam, Kementerian Agama dan Kemendagri bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM untuk mengevaluasi secara menyeluruh, jujur, terbuka dan obyektif kebijakan dan tindak tanduk para pemimpin organisasi massa baik yang berbasis keagamaan maupun sosial politik dengan cara memberikan nilai dari yang paling rendah 0 hingga yang paling tinggi 10 dan mengumumkannya secara publik di media massa nasional dan website masing-masing lembaga.
- 6. Pemerintah melalui Kemenko Polhukam, Kementerian Agama dan Kemendagri bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM mensosialisasikan pendidikan etika politik bagi semua kandidat yang dipersiapkan sebagai kader

- pemimpin dalam organisasi massa yang secara umum merupakan bagian integral dari partai-partai politik.
- 7. Pemerintah melalui Pemerintah melalui Kemenko Polhukam, Kementerian Agama dan Kemendagri mewajibkan tiap organisasi massa menyelenggarakan Diklat tentang etika politik bagi semua anggotanya dan terutama bagi kaderkader yang dipersiapkan menjadi pemimpin organisasi. Diklat ini hendaklah dilaksanakan paling lambat tahun 2015.
- 8. Pemerintah melalui Kemenko Polhukam, Kementerian Agama dan Kemendagri bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM mendesak semua lembaga politik dan lembaga penyiaran publik agar mematuhi kode etik pemberitaan, menaruh hormat terhadap harkat dan martabat manusia dan mengedepankan prinsip-prinsip etis-moral dalam pemberitaan supaya segera terbangun budaya politik dan komunikasi politik yang beradab dan berbudaya.
- 9. Pemerintah bekerjasama dengan DPR, MA, MK, KY, KPK, Polri, TNI dan Kejaksaan Agung dan Ombudsman mengusahakan dengan serius agar Sumpah Kejujuran diucapkan bersama-sama oleh semua pegawai di ruang kerja atau di aula sebelum memulai pekerjaan. Pengulangan Sumpah Kejujuran ini secara bersama-sama bermaksud membatinkan prinsip-prinsip etika politik dalam kesadaran, mencegah perilaku yang cenderung kolusif, korup dan nepotis, meningkatkan kinerja dan disiplin waktu dalam bekerja.
- d. Upaya dari strategi 4 : Merajut kembali relasi etika dengan hukum untuk menghindari hukum sebagai alat kekuasaan yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas melalui evaluasi terhadap praksis hukum selama ini, regulasi baru tentang pengajaran etika terutama etika dasar dan etika sosial di fakultas hukum, menjalin kerjasama lintas sektoral untuk terus berkomitmen memberantas KKN dengan mulai membersihkan lembaga masing-masing dari aparatur yang korup atau bejat secara moral serta edukasi (pendidikan etika) bagi aparat penegak hukum, dan hendaklah ditindaklanjuti paling lambat 2015

- 1. Pemerintah melalui Kemenkumham dan Kemeneg PAN bekerjasama dengan Polri, MA, Kejaksaan Agung, MK, KY, Ombudsman, Perhimpunan Advokad dan sejenisnya, kalangan akademisi dari Fakultas Hukum dan Fakultas Filsafat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM mengadakan evaluasi secara menyeluruh terhadap praksis hukum yang sudah berlangsung selama ini dan mengumumkan hasil evaluasi tersebut di media massa nasional dan website lembaga penegak hukum.
- 2. Pemerintah Pusat bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan akademisi dan LSM mendesak dengan keras lembaga yudikatif untuk mereformasi diri dengan mengumumkan kepada publik kinerja, pelanggaran dan harta kekayaan dari semua aparat penegak hukum.
- 3. Pemerintah melalui Kemendikbud membuat regulasi baru yang mewajibkan filsafat moral atau filsafat etika terutama etika dasar dan etika sosial sebagai bidang studi wajib di fakultas hukum.
- 4. Pemerintah melalui Kemenkumham dan Kementerian Bidang Pemberdayaan Aparatur Negara bekerjasama dengan Polri, MA, Kejaksaan Agung, MK, KY, Ombudsman, Perhimpunan Advokad dan sejenisnya mengadakan Diklat terpadu dan berkala tentang pendidikan etika dan etika politik bagi semua anggotanya.
- 5. MA, MK dan KY (lembaga yudikatif) harus menjadi pelopor keadilan, penegak kebenaran dan ungkapan tertinggi hati nurani bangsa dengan mengumumkan harta kekayaannya secara jujur kepada publik setiap enam bulan sekali di media massa nasional dan *website* lembaga masing-masing. Mereka harus sadar diri sebagai representasi Sang Adil, Sang Benar dan Sang Suci, sehingga setiap sabda dan keputusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan ilahi.
- 6. MA, MK dan KY harus bersikap mandiri dengan membuat terobosan hukum yang memenuhi rasa keadilan, memberikan efek jera dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, aparatur negara, pejabat pemerintahan terutama terkait kasus KKN.

- 7. MA, MK dan KY wajib bersikap transparan dalam merumuskan, mengeksekusi dan mengevaluasi kebijakan dengan memperhatikan dan menindaklanjuti temuan-temuan yang disodorkan oleh LSM terkait rekam jejak aparatur yudikatif.
- 8. MA, MK dan KY harus memulihkan kepercayaan rakyat dengan cara mengakui secara jantan eksistensi mafia peradilan yang telah mencoreng wajah hukum nasional, berkolusi dengan pengusaha hitam dan para koruptor serta berani mengumumkan di media cetak nasional dan website lembaga bersangkutan daftar nama hakim-hakim dan atau pengacara-pengacara yang masuk dalam kategori 'hitam' alias bejat.
- 9. MA, MK dan KY wajib secara nyata menunjukkan niat baik dan kesungguhan untuk menjadikan diri sebagai benteng terakhir keadilan bagi seluruh masyarakat dengan menyederhanakan dan membuat transparan proses birokrasi di lingkungan kerja masing-masing, terutama di lingkungan kehakiman.
- 10. MA, MK dan KY harus secara konkret mendukung kerja keras KPK dalam memberantas korupsi di seluruh tanah air dengan cara membersihkan setiap lembaga dari aparat yang bejat.
- 11. MA, MK dan KY mengusahakan Sumpah Kejujuran diucapkan semua pegawai di ruang kerja atau di aula sebelum memulai pekerjaan. Pengulangan Sumpah Kejujuran ini secara bersama-sama bermaksud membatinkan prinsip-prinsip etika politik dalam kesadaran, menjadi alat kontrol untuk mencegah perilaku KKN, meningkatkan kinerja dan disiplin waktu.

BAB VII

PENUTUP

28. Kesimpulan

Perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia sejak reformasi mempunyai dinamika yang sangat menarik dicermati, dikritisi dan disikapi dengan kesungguhan hati. Harus diakui dengan jujur bahwa sejak era reformasi sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara mengalami perubahan yang dapat dikategorikan sebagai radikal-revolusioner. Dua bidang karya yang paling kentara menunjukkan adanya perubahan radikal-revolusioner itu adalah dunia ekonomi yang menganut paham kapitalisme murni dan praksis politik yang mengoper total sistem liberal.

Dalam kacamata kepentingan nasional, terutama ditinjau dari aspek Tannas terdapat fenomen yang cukup mengkhawatirkan. Tannas secara esensial merupakan konstruksi sosial yang dibangun oleh warga masyarakat atau bangsa berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan modal sosial yang sungguh-sungguh bermanfaat untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh setiap individu dan seluruh bangsa. Tannas merupakan instrumen untuk menyaring segala sesuatu yang datang dari luar dan untuk pertahanan diri seseorang dan kelompok dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang membahayakan eksistensi dirinya. Karena itu, Tannas merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menjamin eksistensi dirinya di tengah peradaban dunia.

Karena Tannas merupakan konstruksi sosial, modal sosial dan instrumen pertahanan diri, situasi dan kondisinya dapat mengalami naik-turun, maju-mundur tergantung pada situasi dan kondisi manusia yang berada di dalamnya. Perlu disadari bahwa Tannas secara hakiki mengacu pada aspek mental, rasional dan spiritual dan bukan aspek instrumental dan teritorial. Tannas yang sejati terletak dalam pikiran, kesadaran, hati sanubari setiap individu yang bermartabat, mandiri dan berkarakter.

Seseorang yang memiliki daya tahan kokoh dan ulet berpikir kritis, menghargai diri sendiri dan sesama, percaya pada kekuatan sendiri, berpendirian dan berkeyakinan teguh, tidak bergantung atau tergantung pada orang lain. Karena itu, kalau bangsa kita menginginkan Tannas yang kokoh, semua komponen bangsa Indonesia harus mendidik

manusia-manusianya menjadi individu yang berpikir cerdas, berwawasan humanis, bersikap ksatria, mandiri dan bertanggung jawab terhadap hidup sendiri dan hidup bangsanya. Semangat *pro patria* akan tumbuh dan mekar hanya ketika orang merasa dimanusiakan di tanah airnya oleh negara. Itulah jiwa dasar dan rahasia Tannas.

Fenomen yang cukup mengkhawatirkan bangsa kita dari sudut Tannas adalah sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintah negara atau Sismennas yang sarat dengan KKN, pola pikir, pola sikap dan pola tindak warga masyarakat yang semakin mengedepankan isu SARA, politik yang menjual citra dan berbantal dana, dunia pengadilan yang diributkan dengan isu mafia perkara dan lembaga hukum yang lebih tampil sebagai alat kekuasaan penguasa daripada instrumen keadilan bagi semua warga. Semua persoalan ini berpotensi meluluhlantakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terbesar bagi sebuah peradaban bukanlah musuh yang datang dari luar, melainkan musuh dalam selimut.

Semua peristiwa dan fakta negatif yang menghiasi wajah Sismennas berujung pada krisis kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintahan dan semua lembaga negara yang lain. Krisis ini tampaknya terus berlanjut dan belum ada tanda-tanda yang menunjukkan segera berakhir, sehingga menghambat kemunculan fajar baru bagi Indonesia. Konsekwensi dari krisis kepercayaan rakyat terhadap aparatur negara dan pejabat pemerintahan adalah krisis kepemimpinan nasional.

Kepemimpinan yang negarawan merujuk pada kemampuan seorang pemimpin dalam menggunakan wewenang yang dimiliki untuk memimpin, mengatur, mengkoordinasi, mengelola dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Landasan kebijakan dan pedoman aksi bagi kepemimpinan yang berkarakter negarawan bertumpu pada rasa keadilan, kemanusiaan dan kepentingan umum. Dalam kepemimpinannya, dia berani mengatasi sekat-sekat SARA dan bahkan melampaui interes partai politik yang telah menjadi kendaraan dan mengantarnya mendapatkan kekuasaan. Jadi, kepemimpinan yang berkarakter negarawan ialah pemimpin yang menuntun, mengatur dan mengelola negara dengan wawasan seluas samudera, hati sebening kaca dan tekad sekeras baja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi sesama; dia adalah manusia setengah dewa.

Untuk mengatasi krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan yang berkarakter negarawan, jalan keluar terbaik adalah kembali ke prinsip dasar yang membuat manusia menjadi rekan, bukan serigala bagi sesama, yaitu etika politik. Etika politik merupakan

kombinasi dari kemampuan nalar (*intellectus*) dan kemauan yang kuat (*voluntas*), teori dan praktek, pengertian - pengetahuan dan pelaksanaan- penerapan. Intelek mencari kebenaran, sehingga landasan pengetahuan adalah kebenaran. Namun pengetahuan ilmiah yang hanya berputar pada dunia teoretis-konseptual akan tetap tinggal sebagai utopia, sehingga harus diturunkan ke tataran praksis supaya kebenaran itu dapat diterjemahkan ke dalam perilaku dan menjadi perilaku yang mencintai kebenaran.

Dalam tataran perilaku, mencintai kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran berada pada ruang kesesuaian nalar dengan realitas - *adaequatio intellectus et rei* - ranah kajian epistemologis: seseorang tahu bahwa korupsi adalah keburukan, tetapi dalam praksis ia turut terlibat korupsi. Karena itu, tata perilaku dilengkapi dengan rasa cinta akan kebaikan dan kaidah perilaku dinilai menurut kriteria baik dan buruk, sehingga seseorang tahu bahwa korupsi adalah keburukan dan dengan sadar menolak terlibat korupsi.

Ruang dan bidang yang menumbuhkan sikap cinta akan kebaikan dan menolak keburukan adalah etika pada umumnya dan dalam relasi-interaksi individu di ruang publik terkait tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara adalah etika politik. Dalam konteks ini, upaya menggalakkan atau menggiatkan dengan penuh semangat dan komitmen tinggi etika politik dalam Sismennas merupakan *conditio sine qua non* bagi restorasi sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta sebuah upaya konkret untuk memunculkan kepemimpinan yang negarawan.

Restorasi sosial dapat berjalan lancar tatkala upaya menggalakkan etika politik berjalan lancar, intensif, sistematis, kontinyu dan terkoordinasi. Praksis politik yang mengindahkan etika politik merupakan instrumen terbaik bagi fajar kepemimpinan yang negarawan dan secara tidak langsung membuat Tannas semakin tangguh. Dari realitas bahwa praksis Sismennas belum sepenuhnya bernafaskan etika politik dan konsepsi yang hendak dibangun untuk menjawab persoalan tersebut, kita dapat menyimpulkannya secara demikian.

1. Persoalan dasar yang merongrong kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah degradasi kualitas hidup sosial yang berdimensi etis-moral sebagaimana tercermin secara kuantitatif dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang mengantongi nilai 32 dari skala 0 sampai dengan 100, jumlah pejabat dan politisi yang masuk penjara, kekerasan demi kekerasan yang berbau SARA. Untuk memecahkan persoalan dasar ini dalam rentang waktu yang

- panjang ke depan, solusi terbaik adalah memasukkan etika politik dalam kurikulum pendidikan SMU dan PT. Etika politik merupakan rambu-rambu yang akan menerangi langkah laku setiap orang yang akan terjun di dunia politik dan pedoman arah yang menunjukkan tujuan yang hendak dicapai seturut kriteria baik dan buruk, adil dan tidak adil.
- 2. Ibarat pendulum jam, kehidupan politik Indonesia sedang berada pada titik mencari suatu keseimbangan setelah berada pada sudut ekstrim otoritarian dan sentralistik ke sudut ekstrim liberalistis dan desentralistik. Sejak era reformasi hingga sekarang praksis politik nasional mengalami disorientasi dengan tendensi yang disebut politik minus nurani atau minus etika. Langkah konkret untuk mengatasi problem krusial ini adalah melakukan reorientasi politik yang bersendikan etika. Dunia politik yang berkaitan dengan tata kelola negara demi perwujudan keadilan sosial bagi semua, dengan asas satu untuk semua, semua untuk satu dan semua untuk semua hanya mungkin terlaksana jikalau kalangan politikus berpikir, bersikap dan bertindak menurut prinsip-prinsip yang mengedepankan rasa kemanusiaan, peduli keadilan, cinta pada keberagaman dan selalu memprioritaskan kepentingan umum yang menjadi core etika politik.
- 3. Carut marut yang mendera dunia pendidikan dan praksis politik minus nurani yang terus mempertontonkan arogansi kekuasaan, yang rakus akan kekayaan dan berujung pada impotensi diri dalam mengontrol hawa nafsu menyebabkan rakyat sinis terhadap hal ihwal yang berhubungan dengan pejabat dan aparat. Para pemimpin tingkat nasional dari trias politika seakan antri terjerat kasus korupsi dan yang berada di luar lingkaran kekuasaan hanya menunggu kesempatan untuk terjun dalam permainan KKN agar dapat mengeruk uang rakyat. Indonesia mengalami krisis keteladanan. Untuk mengembalikan langkah para pemimpin pada fitrah kekuasaan yang mengabdi pada kepentingan umum, solusi yang wajib dilakukan adalah menyadarkan para pemimpin tingkat nasional bahwa mereka merupakan citra bangsa Indonesia di hadapan bangsa lain dan panglima yang berada di garis depan dalam perjuangan bangsa. Karena itu, mereka hendaklah menjadi contoh dan teladan bagi semua warga negara baik dalam ruang privat maupun ruang publik.
- 4. Sinisme masyarakat terhadap praksis hukum di tanah air terungkap dalam ujaran "hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas". Ungkapan tersebut

menjadi sintesis dari praksis hukum yang telah kehilangan jiwa dasarnya, yaitu etika dan tujuan yang hendak diraih, yakni perwujudan nilai keadilan dalam hidup sosial. Pada fase ini hukum menjadi alat kekuasaan untuk melestarikan status quo daripada merealisasikan bonum commune. Tindakan kuratif untuk membuat hukum menjadi abdi keadilan dan kemanusiaan tercetus dalam pepatah Latin: Fiat iustitia ruat caelum – tegaklah keadilan meski dunia runtuh atau Fiat iustitia et pereat mundus – tegaklah keadilan, meskipun dunia tersakiti. Membuat keadilan berdiri tegak di tengah arus politik minus nurani dan khaos keteladanan merupakan tugas etika. Karena itu, upaya mencegah hukum menjadi alat kekuasaan yang mengkhianati tujuan asalinya tiada lain adalah merajut kembali hubungan intrinsik hukum dengan etika.

29. Saran

Di sini diajukan beberapa saran yang sangat penting dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait dengan upaya menggalakkan etika politik dalam Sismennas guna memfasilitasi kemunculan kepemimpinan yang negarawan, sehingga semakin menegaskan eksistensi NKRI.

Saran **pertama** adalah Pemerintah mendirikan **Pusat Pendisiplinan Bangsa** di setiap kabupaten sebagai *locus* untuk membentuk karakter kebangsaan dan disiplin. Aktivitas di Pusat Pendisiplinan Bangsa merupakan bentuk lain atau semacam Lemhannas kecil yang focus pada penambahan wawasan, memupuk kerjasama dan disiplin kerja.

Saran **kedua** adalah Pemerintah segera **menerapkan** UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta pasal 12: "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masingmasing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran". Penerapan regulasi ini akan memberikan dampak positif, yaitu meredam dan meminimalisir agresivitas media massa terutama televisi yang sangat liberal dalam pemberitaan, hampir tata krama dan etika dalam menggalang opini massa.

Saran **ketiga** adalah DPR dan Pemerintah **membentuk** regulasi baru yang mewajibkan Sumpah Kejujuran bagi semua pejabat negara (eksekutif, legislatif dan

yudikatif). Sumpah Kejujuran memiliki tuntutan moral dan tanggung jawab yang jauh lebih serius daripada Pakta Integritas karena kehadiran Tuhan sebagai Saksi bagi tindakan pribadi. Dengan sumpah ini Pemerintah akan dapat mempercepat reformasi birokrasi di semua lembaga negara.

Sarana **keempat** adalah Pemerintah **merevisi** UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena tidak mencantumkan etika dan etika politik sebagai bidang studi wajib dalam kurikulum pendidikan nasional dan **membentuk** dengan segera **Komite Pendidikan Independen** sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tersebut untuk mengevaluasi, mengawasi dan merancang sebuah Sistem Pendidikan Nasional yang lebih komprehensif, integral dan terpadu dalam rangka menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045 guna melahirkan generasi bangsa yang berwawasan keilmuan, berketrampilan teknis mumpuni serta berhati setulus Nabi dan berwatak kesatria sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Saran **kelima** adalah Pemerintah memperkuat dan mempermanenkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *leading sector* pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dengan dukungan sarana, dana dan tenaga yang memadai, mengingat korupsi merupakan persoalan yang senantiasa menyertai praksis tata kelola penyelenggaraan pemerintahan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Rodhan, Nayef R.F. 2009. Sustainable History and the Dignity of Man: A Philosophy of History and Civilizational Triumph, Berlin: LIT Verlag.
- Aristotele. 1994. *Etica Nicomachea* (Vol. 1-2), Milano: Biblioteca Universale Rizzoli.
- Arts, Bas. 2003. Non-State Actors in Global Governance. Three Faces of Power, Bonn: Max Planck Institute for Research on Collective Goods.
- -----. 1996. Politica, Roma Bari: Laterza.
- Cicero. 1995. De Re Publica, Cambridge: Cambridge University Press.
- Suseno, Franz Magnis-. 1994. Etika Politik, Jakarta: Gramedia.
- Haryatmoko. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Dharmawan, HCB, dkk (ed.). 2004. *Surga Para Koruptor*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kadin. Desember 2012. Siaran Pers: Waspadai Daya Saing Nasional. Proyeksi Ekonomi 2013, Jakarta: Kadin.
- Lemhannas. 2013. *Kepemimpinan Negarawan* (Manuscripto No. 15), Jakarta: Lemhannas.
- ----- 2013. Sistem Manajemen Nasional (Manuscripto No. 10), Jakarta: Lemhannas.
- ----- 2013. *Wawasan Nusantara* (Manuscripto No. 4), Jakarta: Lemhannas.
- ----- 2013. *Konsepsi Ketahanan Nasional* (Manuscripto No. 06), Jakarta: Lemhannas.
- ----- 2013. Perkembangan Lingkungan Strategis Tahun 2013, (Manuscripto). Jakarta: Lemhannas.
- Platone. 2001. Tutti gli scritti, Milano: Bompiani.
- Schönberger, Victor Mayer- and Kenneth Cukier. 2013. *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Work, Live, and Think*, New York: Eamon Dolan/ Houghton Mifflin Harcourt.
- Thompson, Dennis F. 2001. *Etika Politik Pejabat Negara* (Terj. Benyamin Molan), Jakarta: Obor.

UNODC- PBB. 2013. Transnastional Organised Crime in East Asia and the Pacific: A Threat Assessment, Sydney: UNODC.

B. ATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

UU No 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman

UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

PERPRES No. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010 - 2014

C. WEBSITES

http://cpi.transparency.org/cpi2012/

http://en.wikipedia.org/wiki/Good_governance#cite_note-Agere1-3

http://news.detik.com/read/2009/04/14/110000/1115094/700/pramono-45-jutaan-warga-tak-bisa-memilih

http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.

http://www.indonesiamedia.com/2013/01/22/instruksi-presiden-memperuncing-konflik/

http://www.kpk.go.id/id/. KPK. 2012. Laporan Tahunan 2012. Jakarta: KPK

http://www.kpu.go.id/

http://www.lettres-modeles.fr/definition/%C3%A9thique.html

http://www.tempo.co/read/news/2012/08/29/078426251/Ribuan-Pejabat-Daerah-Terlibat-Kasus-Korupsi

http://www.transparency.org/Corruption Perceptions Index 2012

https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?p_doc_id=1034

https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?p_doc_id=1034

https:/www.Scholar.harvard.edu/files/political_ethics/

https://www.wisegeek/political_ethics.com

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1 : ALUR PIKIR

2. LAMPIRAN 2 : POLA PIKIR

3. LAMPIRAN 3 : INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA

4. LAMPIRAN 4 : INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

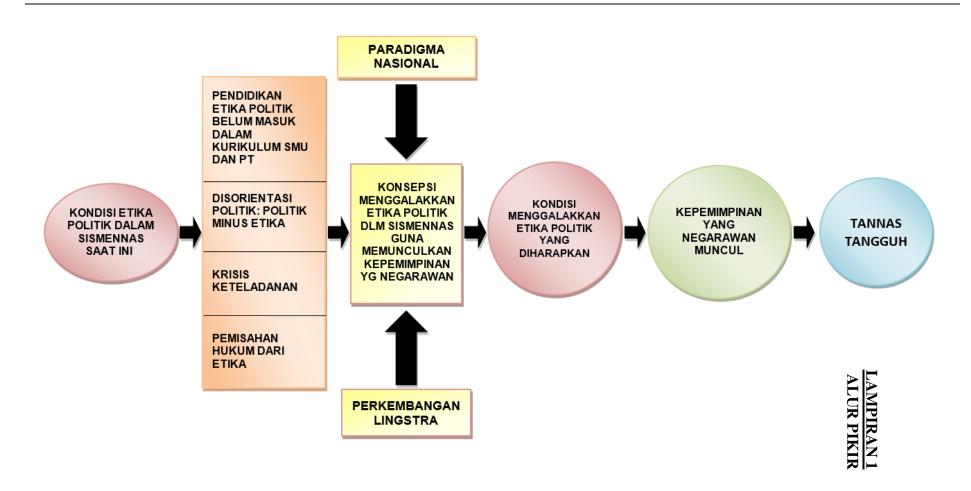
5. LAMPIRAN 5 : JUMLAH KASUS KORUPSI 2012 MENURUT KPK

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



ALUR PIKIR TASKAP

MENGGALAKKAN ETIKA POLITIK DALAM SISTEM MANAJEMEN NASIONAL GUNA MEMUNCULKAN KEPEMIMPINAN YANG NEGARAWAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

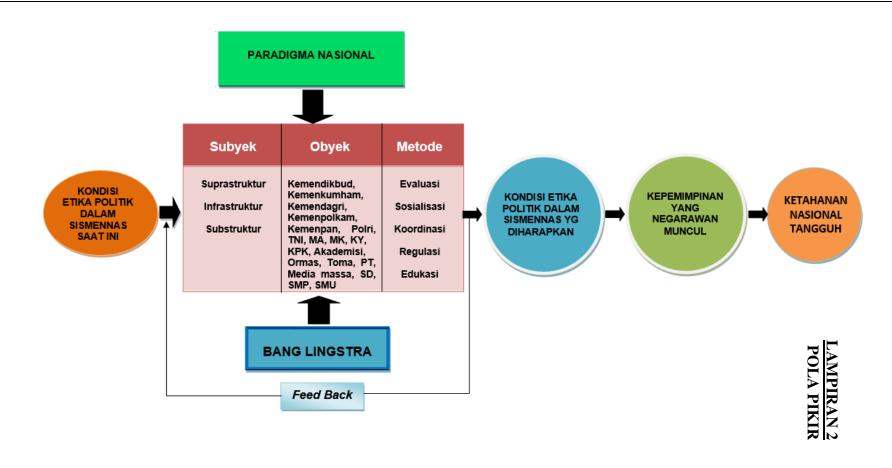


LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



POLA PIKIR TASKAP

MENGGALAKKAN ETIKA POLITIK DALAM SISTEM MANAJEMEN NASIONAL GUNA MEMUNCULKAN KEPEMIMPINAN YANG NEGARAWAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA

PERINGKAT KORUPSI INDONESIA TAHUN 2012 MENURUT TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Di Tingkat Dunia

Urutan	Negara	Skor
94	Senegal	36
102	Tanzania	35
113	Guatemala	33
113	Timor Leste	33
118	Indonesia	32
118	Madagaskar	32
118	Ekuador	32
123	Sierra Leone	31
128	Togo	30
130	Pantai Gading	29

Di Tingkat ASEAN

Urutan	Negara	CPI
5	Singapura	87
46	Brunei	55
54	Malaysia	49
88	Thailand	37
108	Filipina	34
118	Indonesia	32
123	Vietnam	31
160	Laos	21
172	Myanmar	15

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy 2012

Category Score												
Country	Rank	Overall sore	I Electoral process and pluralism	II Functioning of Government	III Political participation	IV Political culture	V Civil liberties					
Norway	1	9.93	10.00	9.64	10.00	10.00	10.00					
Sweden	2	9.73	9.58	9.64	9.44	10.00	10.00					
Iceland	3	9.65	10.00	9.64	8.89	10.00	9.71					
Denmark	4	9.52	10.00	9.64	8.89	9.38	9.71					
New Zealand	5	9.26	10.00	9.29	8.89	8.13	10.00					
Australia	6	9.22	10.00	8.93	7.78	9.38	10.00					
Switzerland	7	9.09	9.58	9.29 7.78		9.38	9.41					
Canada	8	9.08	9.58	9.29 7.78		8.75	10.00					
Finland	9	9.06	10.00	9.64	7.22	8.75	9.71					
Netherlands	10	8.99	9.58	8.93	8.89	8.13	9.41					
	•••											
INDONESIA	53	6.76	6.92	7.50	6.11	5.63	7.65					
Thailand	58	6.55	7.83	6.07	5.56	6.25	7.06					
Malaysia	64	6.41	6.50	7.86	5.56	6.25	5.88					
Philippines	69	6.30	8.33	5.36	5.56	3.13	9.12					
Singapore	=81	5.88	4.33	7.50	3.33	6.88	7.35					
Cambodia	100	4.96	5.67	6.07	3.33	5.63	4.12					
Vietnam	=144	2.89	0.00	3.93	2.78	6.25	1.47					
Myanmar	155	2.35	1.50	1.79	1.67	5.63	1.18					
Laos	156	2.32	0.00	3.21	2.22	5.00	1.18					

 $\underline{https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?p_doc_id=1034}$

<u>LAMPIRAN 5</u> JUMLAH KASUS KORUPSI 2012 MENURUT KPK

Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2012

No.	Jenis Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
1	Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	11	107
2	Perizinan			5	1	3	1		0		10
3	Penyuapan		7	2	4	13	12	19	25	34	116
4	Pungutan			7	2	3			0		12
5	Penyalahgunaan Anggaran			5	3	10	8	5	4	3	38
	JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	48	283

Tersangka/Terdakwa Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2012

No.	Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
1	Anggota DPR dan DPRD				2	7	8	27	5	16	65
2	Kepala Lembaga/ Kementerian		1	1		1	1	2		1	7
3	Duta Besar				2	1		1			4
4	Komisioner		3	2	1	1					7
5	Gubernur	1		2		2	2	1			8
6	Walikota/Bupati dan Wakil			3	7	5	5	4	4	4	32
7	Eselon I. II dan III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	107
8	Hakim							1	2	2	5
9	Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	70
10	Lain-lain		6	1	2	4	4	9	3	3	32
	JUMLAH	4	23	29	27	55	45	65	39	50	337

Perkara TPK Berdasarkan Instansi Tahun 2012

No.	Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
1	DPR RI					7	10	7	2	6	32
2	Kementerian/Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	111
3	BUMN/BUMD		4			2	5	7	3	1	22
4	Komisi		9	4	2	2		2	1		20
5	Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4		3	13	38
6	Pemkab/Pemkot			4	8	18	5	8	7	10	60
	JUMLAH	2	19	27	24	47	37	40	39	48	283

Perkara TPK Berdasarkan Wilayah Tahun 2012

No.	Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jumlah
1	Pemerintah Pusat	1	15	11	12	23	24	20	21	18	145
2	NAD	1	1			1					3
3	Sumatera Utara				2			2	1		5
4	Sumatera Selatan						1	1			2
5	Riau dan Kepulauan Riau				3	4	3			13	23
6	Bengkulu								1	2	1
7	DKI Jakarta		1	3		1	1	4	5	2	17
8	Banten								1	1	1
9	Jawa Barat		2		1	5	3	7	4	2	24
10	Jawa Tengah			2	2		1		3	5	13
11	Jawa Timur					2	2		1		5
12	Lampung							3			3
13	Kalimantan Selatan			1							1
14	Kalimantan Timur			6	3	2					11
15	Sulawesi Utara					1		1	2	1	5
16	Sulawesi Selatan				1						1
17	Sulawesi Tengah									4	
18	NTB			1		2					3
19	Papua					1	2	1			4
20	Malaysia			3		3					6
21	Singapura					2		1			3
	JUMLAH	4	23	29	27	55	45	65	39	50	337

 $\frac{http://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/955-laporan-tahunan-kpk-2012?tmpl=component\&format=pdf$